

Milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH KALIMANTAN BARAT



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH KALIMANTAN BARAT

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
1978 / 1979**

PERPUSTAKAAN,
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala

NO INDUK *2073 A Hadiah*

TGL. *1 Maret 1984.*

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

”Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional”.

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL,
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH,
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di daerah meliputi:

Survei lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga disana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diha-

rapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Departemen P dan K di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH KALIMANTAN BARAT ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
5. Tim penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah Propinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari:
 - 1). Drs. Soedarto sebagai Ketua
 - 2). Widodo Adhisidharto sebagai Anggota
 - 3). Sugeng sebagai Anggota
6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:

— Konsultan/ Anggota	:	1. Prof.Dr. Haryati Soebadio 2. Abdurachman Surjomihardjo 3. A.B. Lopian
— Ketua	:	Sutrisno Kutoyo
— Sekretaris	:	M. Soenjata Kartadarmadja
— Anggota	:	1. Anhar Gonggong 2. Mardanas Safwan 3. Masjkuri 4. Surachman 5. Muchtaruddin Ibrahim 6. Sri Sutjiatiningsih

7. Editor : 7. Frans Hitipeuw
1. Frans Hitipeuw
2. Sutrisno Kutoyo
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo

NIP. 130117589

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN PENELITIAN	1
1. Tujuan Umum	1
2. Tujuan Khusus	2
B. MASALAH-MASALAH PENELITIAN	3
1. Masalah Umum	3
2. Masalah Khusus	3
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	4
D. PROSEDUR PENELITIAN	5
1. Personalia Tim Daerah	5
2. Metode Penelitian	5
E. HASIL AKHIR	6
BAB II. KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD XX	8
A. PEMERINTAHAN	8
B. KEADAAN SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI	10
BAB III. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1900 – 1928	15
A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI	15
B. TUMBUHNYA KESADARAN KEBANGSAAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT	20
C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN PARTAI/ORGANISASI	25
D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DU- NIA I (1914 – 1918)	30

E. PERJUANGAN DI DAERAH	38
BAB IV. KEADAAN DI DAERAH ANTARA 1928 – 1942	45
A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA SEKITAR TAHUN 1930	45
B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH	50
C. INTERAKSI DENGAN KEGIATAN PARTAI-PARTAI	53
1. Partai Indonesia Raya (PARINDRA)	54
2. Persatuan anak Borneo (PAB)	55
3. Muhammadiyah	56
D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA-BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG	57
1. Sikap Pemerintah Hindia-Belanda	57
2. Keadaan Masyarakat	61
3. Sikap Masyarakat terhadap Pemerintah	64
4. Keadaan Pemerintah Hindia-Belanda pada saat terakhir	66
E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG	68
1. Propaganda Jepang yang terasa di daerah ini	68
2. Kedatangan Tentara Jepang	70
3. Sikap Jepang terhadap aparatur Pemerintah Hindia Belanda	73
4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia	75
5. Sikap Bangsa Indonesia terhadap Jepang	78
DAFTAR NAMA INFORMAN	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
A. BUKU	88
B. MAJALAH DAN RISALAH	90
C. ENSIKLOPEDI	91
D. MANUSKRIP/NASKAH	91

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimantan Barat adalah penulisan Sejarah Daerah. Menulis suatu sejarah tidak dapat dilepaskan sama sekali dari usaha penelitian, karena usaha penelitian itu merupakan landasan pokok dari penulisan sejarah. Oleh karena itu maka komponen penelitian merupakan bahagian utama dari tugas yang harus dilaksanakan itu. Komponen penelitian ini terdiri dari empat pokok, ialah:

- A. Tujuan penelitian
- B. Masalah-masalah penelitian
- C. Ruang lingkup penelitian
- D. Prosedur penelitian

Ke empat pokok ini sebenarnya telah dirumuskan oleh Tim Pusat Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, yang menangani proyek ini.

A TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan penelitian meliputi: Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

1. *Tujuan Umum*

a. Penyelamatan Kebudayaan Nasional

Sejarah Daerah, sebagai salah satu unsur dari kebudayaan, merupakan hasil perkembangan kehidupan suatu bangsa, dengan daerah sebagai ruang lingkungannya. Perhatian terhadap Sejarah Daerah perlu diberikan, mengingat kedudukannya sebagai suatu komponen dari Sejarah Nasional secara keseluruhan.

Penyusunan Sejarah Nasional secara tepat akan sangat terbantu oleh pengemukaan data-data sejarah daerah yang benar serta tepat.

b. Pembinaan kelangsungan dan pengembangan kebudayaan nasional. Jika proses penyelamatan sudah dilampaui, ma-

ka tujuan selanjutnya adalah membina dan memupuk kelangsungan dan pengembangan kebudayaan tersebut. Penelitian Sejarah Daerah ini, sejauh yang dapat diusahakan, bermaksud dan berusaha mengemukakan bahan-bahan kelangsungan dan pengembangan kebudayaan nasional.

- c. **Pembinaan ketahanan kebudayaan nasional.**
Penelitian dan Pencatatan Sejarah Daerah ini memungkinkan diadakannya inventarisasi unsur-unsur budaya dalam ruang lingkup masing-masing. Hal ini dipandang amat penting artinya untuk dapat mengenal dan menghayati unsur-unsur budaya tersebut. Pengenalan serta penghayatan itu mempunyai arti besar dalam usaha pembinaan ketahanan budaya nasional.
- d. **Pembinaan Kesatuan Bangsa.**
Adanya perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak suku bangsa yang menghuni bumi nusantara ini, hanya dapat dikenal dan dihayati melalui penampilan bahan-bahan informasi yang komprehensif, diperoleh melalui kegiatan pengamatan, penelitian dan pencatatan. Proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa akan sangat dibantu dengan tumbuhnya rasa saling hormat-menghormati, yang timbul sebagai akibat saling mengenal dan saling mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada di antara mereka.
- e. **Memperkuat kepribadian**
Kebudayaan adalah milik suatu bangsa. Sebagai suatu milik, ia merupakan identitas bangsa yang memilikinya; ia menyatu dengan kepribadian bangsa itu, baik secara individu maupun suku bangsa atau bangsa itu secara keseluruhan. Kegiatan penelitian dan pencatatan ini akan membantu mengungkapkan identitas tadi, yang sangat penting artinya dalam usaha memperkuat kepribadian bangsa.

2. *Tujuan khusus*

Tujuan khusus dari kegiatan Penelitian dan Pencatatan Sejarah Daerah adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan sejarah daerah ini, untuk dapat disajikan sebagai salah satu komponen da-

lam penyusunan Sejarah Nasional Indonesia. Penyajian yang baik tentang sejarah daerah akan dapat dipergunakan sebagai:

- a. bahan dokumentasi
- b. bahan untuk lebih merangsang dan mendorong apresiasi terhadap budaya bangsa, khususnya apresiasi generasi muda kita, terhadap warisan budaya bangsanya.
- c. bahan untuk studi lanjutan.
- d. bahan pembantu untuk perumusan kebijaksanaan, baik di dalam lingkungan Pemerintah (dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) maupun instansi-instansi serta lembaga-lembaga lain dalam masyarakat, yang memerlukannya.

B. MASALAH-MASALAH PENELITIAN

1. *Masalah Umum*

- a. Masih banyak peninggalan serta warisan budaya yang belum terjamah dalam usaha penelitian maupun pencatatan.
- b. Masih terasa sangat kurangnya bahan-bahan budaya, terutama yang bersumber dari masyarakat di daerah-daerah, yang dapat dipergunakan untuk menyusun suatu kebudayaan Nasional.
- c. Masih belum sempurna tergarapnya "masa lampau" kehidupan bangsa Indonesia, khususnya masa lampau perkembangan daerah-daerah di Indonesia.

2. *Masalah khusus*

- a. Luasnya daerah Kalimantan Barat (kurang lebih 146.710 km²) dengan keadaan medan yang beraneka ragam dan penyebaran penduduk yang tidak merata, khususnya di daerah-daerah pedalaman, ditambah pula dengan keadaan komunikasi antar tempat yang masih sulit.
- b. Hampir tidak adanya bahan-bahan tertulis, baik yang berupa hasil penelitian maupun bukti-bukti sejarah tertulis di daerah ini, yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau landasan penulisan sejarah yang baik.

- c. Tidak adanya tenaga ahli yang dapat membantu pelaksanaan tugas penelitian dan pencatatan secara komprehensif, maupun tenaga ahli untuk penyusunan dan pembuatan analisa data yang masuk.
- d. Hampir punahnya sebahagian besar peninggalan sejarah di daerah ini, sebagai akibat kurang atau tidak adanya perawatan dan pemeliharaan; sehingga sulit untuk dapat diteliti atau ditelusuri (ditraceer).
- e. Banyak tokoh yang bisa merupakan saksi sejarah dari zamannya, telah meninggal dunia, baik karena kekejaman Jepang, pergolakan setelah kemerdekaan, ataupun karena usia yang sudah lanjut. Mereka tidak meninggalkan catatan atau bahan yang dapat diwariskannya kepada keturunannya, hingga banyak kesulitan timbul akibat sumber-sumber/bahannya tidak ada, untuk penyusunan suatu sejarah yang lengkap dan otentik.

Demikian pula belum ada kesadaran di kalangan masyarakat untuk menuliskan atau mencatat berbagai hal yang punya arti penting, kemudian menyimpan dan mewariskannya kepada generasi berikutnya.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Pengertian yang dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pencatatan Sejarah Daerah, adalah rumusan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 079/0/1975.

Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah tahun 1978/1979 pada aspek Sejarah Daerah, seyogyanya memang harus merupakan penelitian yang tuntas. Akan tetapi mengingat keterbatasan, baik yang berupa waktu kerja, kesulitan-kesulitan yang sudah diperhitungkan ataupun yang timbul secara mendadak, beban tugas pokok yang dipikul oleh tenaga yang diminta ataupun yang menyediakan diri untuk membantu pelaksanaan proyek ini, memaksa kami mengambil kebijakan untuk menuliskan garis-garis besar materi yang diteliti, yang sangat luas dan banyak seginya itu, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini, sejauh bisa didapat, akan dapat dipergunakan sebagai bahan studi lanjutan ataupun dikembangkan lebih lanjut menjadi bahan pene-

litian- lanjutan yang lebih komprehensif dan lebih cermat.

D. PROSEDUR PENELITIAN

Sesuai dengan *Terms of Reference* (TOR) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, pola Penelitian dan Kerangka Laporan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah serta Surat Keputusan Pemimpin Proyek P3KD Kalimantan Barat no. 140/P3KD/VII/1978 tertanggal 7 Juli 1978, maka organisasi penelitian disusun sebagai berikut:

1. Tim Pusat dan Tim ahli, berkedudukan di Jakarta.
2. Tim Daerah, yang terdiri dari penanggungjawab dan tenaga-tenaga peneliti, berkedudukan di Pontianak, ibukota propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

1. *Personalia Tim Daerah*

Personalia penanggungjawab, peneliti dan pencatat Sejarah Daerah Kalimantan Barat, terdiri dari:

- a. Ketua Tim: *Drs. Soedarto* (45 tahun), pendidikan: Sarjana Keguruan jurusan Sejarah Budaya (IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1969). Jabatan/Tugas pokok Pengawas pada Bidang PMU merangkap Kepala Sub. Bag. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Bagian Perencanaan pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Barat. Yang bersangkutan ini juga anggota KITLV (*Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde*).
- b. Anggota: 1). *Widodo Adhisidharto* (47 tahun), pendidikan SGA. Jabatan/Tugas pokok Staf pada Bidang Permuseum, Sejarah dan Kepurbakalaan, pada Kantor Wilayah Dep P. dan K. Prop. Kalimantan Barat.
2). *Sugeng* (40 tahun), pendidikan: Sarjana Muda jurusan Sejarah Budaya. Jabatan/Tugas pokok, Staf pada Bidang Permuseum, Sejarah dan Kepurbakalaan pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Prop. Kalimantan Barat.

2. *Metoda penelitian*

Metoda yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian dan

pencatatan Sejarah Daerah ini adalah:

- a. wawancara, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dapat memberikan keterangan yang hidup pada zaman itu, tentang peristiwa yang dapat dituturkan.
- b. penelitian atas keterangan-keterangan tertulis atau catatan-catatan yang ada di daerah ini.
- c. Penelitian kepastakaan, surat-surat kabar atau bahan tertulis lain.
- d. pengamatan (observasi) di lapangan.

Metoda-metoda tersebut di atas dipergunakan menurut keperluan, dan urgensinya. Observasi maupun wawancara dilaksanakan baik di lapangan (Kabupaten/Kecamatan/Desa) maupun di ibukota propinsi (Pontianak), dimana beberapa tokoh pada peristiwa masa lalu masih hidup. Sumber-sumber tertulis, para responden maupun informan, disebutkan semuanya dalam lampiran naskah ini.

3. *Aspek penulisan.*

Sistem penulisan, ilustrasi, bahasa serta penyusunan bibliografi, dilaksanakan menurut petunjuk dan saran Tim pusat, yang disampaikan baik pada penataran para Penanggungjawab Proyek di daerah, maupun melalui pedoman tertulis yang diterbitkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) tahun 1978/1979.

E. HASIL AKHIR

Naskah ini bentuk aslinya disusun oleh Tim Peneliti/ Penyusun di daerah Kalimantan Barat. Kemudian di Jakarta diadakan penyempurnaan terhadap naskah tersebut yang dilakukan bersama antara Tim daerah, Proyek di Pusat dan para Tenaga ahli. Sesudah itu dilakukan pekerjaan *editing* atau penyuntingan dengan menitik beratkan pada segi-segi materi, kebahasaan dan pendekatan.

Dalam hal materi diikuti hasil penyempurnaan; dalam hal bahasa sejauh mungkin diikuti ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan dan pembakuan istilah sedangkan segi pendekatan diusahakan agar mengikuti asas regiosentrisme sebagai metoda yang dianggap paling tepat untuk suatu penulisan kesejarahan dae-

rah.

Mengenai naskah ini dapatlah dikatakan, bahwa secara keseluruhan sudah sesuai dengan cakupan tugas (*terms of reference*). Pada akhirnya hendaknya naskah ini dilihat sebagai usaha perintisan.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-20

A. PEMERINTAHAN

Pada akhir abad ke-19, setelah selesainya operasi-operasi pasifikasi untuk menciptakan *rust en orde* di Jawa dan di sebagian besar Sumatra, perhatian pemerintah kolonial Belanda mulai diarahkan untuk memasukkan "daerah-daerah seberang laut" (*buiteng gewesten*) ke dalam *Pax Neerlandica*. Perhatian Belanda kepada daerah Kalimantan Barat makin menjadi besar setelah akhir pertengahan abad ke-20.

Hal ini disebabkan dua hal:

- Pertama*, Belanda merasa khawatir melihat ambisi-ambisi dari James Brooke, raja muda Serawak, yang sejak ia memperoleh pengakuan sebagai raja muda di Serawak, berusaha keras untuk dapat meluaskan daerah kekuasaannya. Lebih-lebih mengingat kenyataan bahwa pada masa ini garis batas antara Kalimantan Barat dengan daerah yang dikemudian hari dikuasai Inggris seperti Serawak, Brunai, dan sebagainya, memang belum ada.
- Kedua*, kelemahan kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini, sedang dilain pihak, semakin kuatnya kedudukan dari kongsi Cina, sangat menarik perhatian Belanda. Kongsi-kongsi Cina itu kaya raya sebagai akibat perladangan lada dan pertambangan emas, bahkan mereka telah pula mendirikan semacam "republik" dengan pusat-pusatnya di daerah Mandor dan Montrado. Sengketa antara kongsi-kongsi Cina itu dengan sesamanya dan antara mereka dengan penguasa-penguasa kerajaan, seperti misalnya dengan sultan Sambas, merupakan faktor lain yang menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda.

Sebagian besar kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat ini secara nominal telah menandatangani kontrak tanda

setia kepada kerajaan Belanda. Hal ini misalnya dapat diketahui dari laporan (*rapport*) Gubernur Borneo, tertanggal 11 Nopember 1848 (*rapport* no. 187) yang antara lain menyatakan bahwa "Gubernur Borneo, dengan menaiki kapal api *Onrust* telah berlayar memudiki sungai Kapuas, untuk menyampaikan surat kontrak yang telah disahkan kepada raja-raja dan untuk memberitahukan mereka apa yang wajib mereka lakukan serta bagaimana hubungan antara mereka dengan Pemerintah Belanda. Juga ditetapkan bahwa untuk seterusnya sejak saat itu, kerajaan-kerajaan tersebut harus mengibarkan bendera Kerajaan Belanda. ¹⁾

Sejak saat kerajaan-kerajaan di daerah ini mengakui kerajaan Belanda, dengan menandatangani kontrak pengakuan pertuanan (*contract tot erkenning van heerschappij*) itu, maka sejak itu pula kerajaan-kerajaan itu harus menyesuaikan tata pemerintahan kerajaan dengan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Belanda; serta mereka wajib untuk melaksanakan segala hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Raja-raja tadi juga diwajibkan untuk menerima pejabat Pemerintah Belanda di daerahnya, pejabat mana akan bertindak sebagai *adviseur* (penasehat) dari raja-raja tersebut. *Adviseur* Belanda itu secara resminya bertugas mendampingi raja-raja dalam melakukan pemerintahan, memberikan nasehat-nasehat kepada mereka serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan Gubernur dalam kerajaan-kerajaan itu. Tetapi dalam prakteknya, merekalah yang sebenarnya memegang kendali pemerintahan, karena para raja atau penguasa di kerajaan kerajaan itu hanyalah pemegang kuasa secara nominal saja.

Mereka telah merasa puas dengan tunjangan atau subsidi keuangan yang diterima dari Gubernur. Dengan berlakunya sistem perpajakan (*belasting systeem*) maka rakyat kerajaan-kerajaan itu diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah, suatu kewajiban yang dahulunya tidak pernah ada. Hasil dari pemungutan pajak ini harus disetorkan ke kas pemerintahan Belanda. Untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak itu maka Gubernur menetapkan petugas-petugas pajak (*collec-*

1). Besluit Gouverneur Borneo, no. 6, tanggal 7 Januari 1849.

teur), yang selanjutnya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada para *Controleur*,

Berlakunya sistem pajak ini menimbulkan rasa tidak senang di kalangan penduduk. Banyak gerakan perlawanan timbul sebagai akibat timbulnya rasa tidak senang itu. Pada umumnya sistem pajak yang dilaksanakan dengan keras dan teratur itu, dirasakan amat berat menekan rakyat jelata. Hal ini diakui pula oleh pejabat-pejabat pemerintahan Belanda. ²⁾

Banyak pergolakan dan gerakan perlawanan yang timbul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi sebagai akibat dilakukannya sistem pajak itu.

Gerakan-gerakan perlawanan rakyat melawan Belanda yang berkobar di daerah Sintang misalnya, merupakan gerakan perlawanan yang bermotifkan rasa tidak senang dan rasa benci rakyat jelata terhadap berlakunya sistem pajak itu.

Akan tetapi semua gerakan perlawanan rakyat itu dengan mudah dapat ditumpas oleh pemerintah, karena sifat perlawanan itu sendiri, yang tidak terorganisasi dengan baik dan lebih banyak bergantung kepada kepemimpinan seseorang tokoh atau pemimpin. Jika sang tokoh atau pemimpin tadi tertangkap atau pun tewas dalam perlawanan itu, maka habislah gerakan perlawanan itu.

Pada peralihan abad ke-19 ke abad 20 dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda telah terbenam dengan kokoh di daerah ini, khususnya pada kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah di pantai dan daerah sepanjang sungai Kapuas; walaupun perlu dikemukakan bahwa usaha-usaha pasifikasi masih terus dilakukan oleh pemerintah kolonial di daerah ini, khususnya gerakan pasifikasi terhadap suku-suku di pedalaman.

B. KEADAAN SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI

Pada umumnya kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini adalah kerajaan agraris; dengan rakyat yang hidupnya tergantung pada usaha bertani dan memungut hasil perkebunan serta penangkapan ikan. Di kerajaan-kerajaan pantai disamping usaha bertani dan berkebun, penduduk hidup juga dari usaha ber-

2). Koch, D.M.G. *Om de Vrijheid* (Jakarta, 1950), hal 12

dagang. Pertanian secara menetap terutama hanya terdapat di daerah-daerah kerajaan yang ada di pantai, sedang di daerah-daerah pedalaman penduduk masih tetap menyelenggarakan usaha bertani yang berpindah-pindah tempat. Hal ini antara lain juga didorong oleh luasnya daerah, tipisnya penduduk dan hasrat orang untuk memperoleh hasil secara mudah.

Perkebunan-perkebunan terutama dibuka oleh orang-orang Cina ataupun kemudian oleh pengusaha-pengusaha Belanda. Pengusaha-pengusaha Belanda ini terutama memusatkan usahanya pada perkebunan karet. Mereka itu memperoleh tanah dengan "hak guna usaha" dari raja-raja. Hal seperti ini terdapat di daerah kerajaan Sambas, Mempawah dan Sintang. Di daerah-daerah yang ada perkebunannya seperti ini, rakyat jelata dapat menjual tenaganya sebagai buruh, dengan memperoleh upah. Dengan demikian mulai timbul satu jenis mata pencaharian baru, ialah berburuh. Upah kerja di perkebunan-perkebunan seperti itu ditentukan berdasarkan bahagian dari hasil yang diperoleh, misalnya pada perkebunan kelapa, mereka memperoleh bagian tertentu dari perolehan hasilnya, yang kemudian dapat dijual.

Pada akhir abad ke-19, mata uang kerajaan Belanda telah berlaku umum dan diakui sebagai alat pembayar dan alat penukar yang sah dalam daerah ini. Selain karet, yang sebenarnya merupakan tanaman yang baru dikenal pada akhir abad itu di daerah ini, perkebunan lada dan kelapa telah lama diusahakan oleh rakyat. Perkebunan lada diusahakan secara intensif oleh orang-orang dan kongsi-kongsi Cina, dan mereka menjadi kaya karena hasil lada itu.

Sudah sejak akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 para imigran Cina ini tiba dari daratan Tiongkok. Banyak di antara mereka itu memang merupakan pelarian politik yang menghindari penindasan dinasti Ch'ing (Mancu), namun banyak pula di antara mereka itu yang memang meninggalkan tanah leluhurnya untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

De Groot.³⁾ menyebutkan antara lain bahwa pada sekitar tahun 1777, orang-orang Cina yang bermukim di Kalimantan Barat, telah membentuk kongsi-kongsi, yang dikatakannya sebagai "republik Cina". Mereka ini (orang-orang Cina) terke-

3). de Groot, J.J.M. *Het Kongsi - wezen in West Borneo*, (Den Haag, 1880). hal. 1.

nal sebagai pekerja dan petani yang ulet. Mereka membuka tanah ataupun menyewa tanah dari Sultan dan bangsawan, terutama di kesultanan Sambas. Tanah-tanah itu mereka olah dan kerjakan sehingga menjadi kebun-kebun yang produktif. Kemakmuran yang diakibatkan oleh kerja keras dan keuletan mereka itu, menjadikan kongsi-kongsi itu sangat kuat kedudukannya pada awal abad ke-19, sehingga mereka berani menentang usaha-usaha dari sultan dan pemerintah Belanda, untuk memungut pajak.

Setelah ditundukkannya kongsi-kongsi Cina, sebagai akibat gerakan operasi Belanda dalam menumpas kongsi-kongsi Cina yang berotak di sekitar 1857, maka anggota-anggota kongsi itu cerai berai. Banyak orang Cina itu meninggalkan permukiman dan perkebunan mereka di daerah pedesaan dan pandai menetap di kota-kota, seperti Pontianak dan Singkawang. Di kota-kota ini mereka beralih usaha dalam mencari nafkah, dan membuka usaha perdagangan. Selain penduduk asli dan penduduk Cina, di daerah pantai bermukim pula kelompok-kelompok pendatang dari suku lain, terutama suku Bugis dan Madura. Mereka memang merupakan pelaut-pelaut dan perantau yang berani mengadu nasib di negeri orang. Di daerah ini mereka beralih pencaharian menjadi petani-petani yang berhasil.

Pemukiman-pemukiman penduduk di daerah pedalaman pada umumnya terdapat di sepanjang sungai-sungai besar, yang sebenarnya berfungsi sebagai urat nadi perhubungan ekonomi maupun sebagai sumber kehidupan yang sangat penting artinya. Tanah di daerah pedalaman masih merupakan milik komunal, ialah milik suku yang mempunyai tempat permukiman di tempat itu. Terkecuali di daerah-daerah kerajaan, dimana para raja dan bangsawannya merupakan pengusaha atas tanah-tanah.

Hubungan antar daerah masih merupakan suatu masalah. Sungai masih merupakan "jalan" perhubungan yang sangat penting. Hubungan antara daerah dengan Pontianak, dilakukan dengan perahu milik penduduk atau pedagang. Pemerintah memiliki kapal api (*stoomboot*) yang menjalani rute Pontianak ke kota-kota yang menjadi ibukota kerajaan di pedalaman seperti Meliau, Sangau, Sekadau, Sintang dan Selimbau. Kapal api itu selain berfungsi mengangkut pejabat-pejabat gubernemen yang mengadakan turne ataupun untuk mengangkut

pasukan; selain itu juga untuk melakukan tugas-tugas pos. Angkutan barang dari Pontianak ke daerah-daerah sepanjang pantai barat sebelah utara, dilakukan dengan menggunakan kapal laut, terkecuali untuk jarak-jarak yang relatif pendek.

Jalan raya ke Singkawang, Sambas dan Bengkayang baru dibuat setelah tahun 1916, ialah setelah selesainya operasi-operasi pasifikasi., sebagai akibat timbulnya pemberontakan orang-orang Cina yang dibantu oleh orang-orang Daya dan Melayu di daerah Mempawah dan Montrado di tahun 1914. ⁴⁾

Hubungan antara daerah ini dengan pulau-pulau lain, khususnya dengan pulau Jawa, dilayani oleh kapal-kapal pemerintah dan KPM. Kapal-kapal gubernemen itu selain dipergunakan untuk melayani kepentingan dinas/pemerintah juga mengangkut barang dan penumpang umum. Pelabuhan yang dibangun pemerintah Belanda adalah pelabuhan Pontianak, sedang pelabuhan-pelabuhan lain belum diusahakan. Kebanyakan perahu rakyatlah yang menyinggahi pelabuhan seperti Sambas dan Singkawang itu.

Masih amat sulitnya hubungan antar tempat, menyebabkan tumbuhnya kelompok masyarakat, yang sebagai akibat isolasi, mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Pemerintah kolonial telah melakukan usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan itu dengan menekankan penerapan kekuasaan pemerintah, melalui pejabat-pejabat pemerintah yang ditempatkan di daerah-daerah, khususnya para *controleur* dan *district-hoofd* setelah para raja menandatangani contract van erkenning atas pertuanan Belanda, terhadap kerajaan-kerajaan itu. Dalam usaha pemerintah kolonial untuk menekankan kekuasaannya, maka suku-suku yang masih berpindah-pindah tempat, diperintahkan untuk menetap. Dan dengan mempergunakan pasukan tentara dan polisi, suku-suku Daya yang membandel ditundukkannya. Beberapa jenis adat, yang telah turun temurun berlaku dan menjadi bahagian dari kebudayaan suku-suku Daya, tetapi yang dianggap "biadab" dan "kejam" oleh pandangan peradaban Barat, seperti adat mengayau, dihapuskan dengan paksa oleh pemerintah Belanda.

Dengan masuknya kekuasaan Belanda dan dengan masuk-

4). Sejarah Gereja Katolik di Indonesia, jilid 3a (Ende, 1974). hal. 321.

nya peradaban Barat ke pedalaman sebagai konsekwensinya, maka kehidupan masyarakat mengalami perubahan-perubahan besar.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1900 – 1928

A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI.

Di ambang pergantian abad ke 19 ke abad ke 20, boleh dikatakan bahwa sebagian besar dari raja-raja dan pengusaha bumi-putera di daerah ini, telah mengakui kekuasaan kerajaan Belanda atasnya, dan telah menandatangani kontrak pengakuan kekuasaan Belanda. Kerajaan-kerajaan dan swapraja yang tergolong penting di daerah ini adalah: Pontianak, Sambas, Mempawah, Sanggau Tayan, Kubu, Landak, Matan, Sintang, Sekadau, di samping sejumlah swapraja kecil-kecilan lain.

Kontak politik itu kemudian diperkuat dengan apa yang disebut sebagai *Korte Verklaring*, yang harus ditandatangani oleh raja-raja yang telah mengikat kontak politik dengan Belanda. Kerajaan Sintang misalnya, menjelang awal abad ke 20, ialah pada masa pemerintahan Panembangan Ismail Kusuma Negara, telah menyerahkan wilayahnya sebagai daerah gubernemen (*gouvernements-gebied*). Kerajaan Tayan menandatangani *Korte Verklaring* pada 29 Nopember 1930. ⁵⁾, kerajaan Kubu pada 13 Oktober 1919 di masa pemerintahan Syarif bin Idrus, ⁶⁾ sedang daerah swapraja Simpang, yang terletak berdekatan dengan kerajaan Matan, menandatangani *Korte Verklaring* itu pada tahun 1911.

Satu dua swapraja kecil memang masih bertahan untuk tidak mengakui kekuasaan Belanda, seperti misalnya kerajaan kecil Piasak di hulu sungai Kapuas. Kerajaan ini memang terpencil letaknya, tetapi juga berkat kegigihan penguasanya yang sanggup menolak setiap usaha perembesan unsur-unsur asing dari luar. Sekalipun kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini telah mengakui kedaulatan kerajaan Belanda, dan telah pula memberlakukan perundang-undangan gubernemen dan tata pemerintahan menurut cara Eropa, namun menurut De Kat Angelino ⁷⁾, dalam kenyata-

- 5) Catatan Kepala Seksi Kebudayaan pada Kantor Dep. P dan K Kabupaten Sanggau, berdasarkan manuskrip (tanpa nama) tahun 1977, hal. 6.
- 6) Lontaan, J.U., *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat (Pontianak, 1975)* hal. 226.
- 7). De Kat Angelino, A.D.A., *Staatkundig beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch Indie* ('s Gravenhage, 1930) hal. 190.

annya, hanya sebahagian saja dari hukum pidana dan perdata Eropa yang diberlakukan, sedang hukum adat bumiputera tetap berlaku, di samping ketentuan dan peraturan yang berfungsi sebagai hukum, yang dibuat oleh para raja atau sultan. Hanya di kesultanan Pontianak, peradilan adat bumiputera sudah tidak diberlakukan lagi, demikian menurut De Kat Angelino.⁸⁾, sedangkan dalam kerajaan-kerajaan lain di daerah ini pun sudah amat jarang berlaku.

Berlakunya Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*, 1930) tidak segera mempunyai pengaruh ataupun akibat langsung yang dapat dilihat seketika di Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena masih banyak daerah kerajaan yang sedang dalam proses dipaksa untuk mengakui kedaulatan kerajaan Belanda, atau kalau menurut istilah pemerintah kolonial Belanda, masih dalam proses pasifikasi. Dan proses ini ternyata tidak selancar sebagaimana diharapkan oleh pemerintah Belanda. Sampai pada akhir tahun 1918 pemerintah Belanda masih melakukan aksi pasifikasi, karena masih ada suku ataupun golongan-golongan etnis di daerah ini yang baik karena memang tidak mau mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, maupun karena alasan-alasan lain. Baru setelah selesainya Perang Dunia I berdasarkan *Bestuurshervormingswet* 1922 (Undang-undang Reorganisasi Pemerintahan) yang tercantum dalam *Staatsblad* No. 216 tahun 1922 dimungkinkan adanya dekonsentrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Desentralisasi itu, maka *Borneo*, *Celebes* dan *Groote Oost* (Timur Besar) yang merupakan *buitengewesten* diberi status *Provincie*.

Sebagai langkah lanjutan dari *Bestuurshervormingswet* tahun 1922 itu, maka pada tahun 1936 baru pemerintah kolonial Belanda memandang perlu untuk membentuk *gouvernementen* untuk daerah-daerah *Borneo*, *Celebes* dan *Groote Oost* itu. Masing-masing akan merupakan sebuah daerah administratif, yang dikepalai oleh seorang gubernur, yang kekuasaannya lebih besar daripada kekuasaan seorang kepala *Gewest* gaya lama. Ordonansi itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1938 (*Staatsblad* no. 264 tahun 1938). Ordonansi itu disusul dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dimuat dalam *Staatsblad* No. 392 tahun 1938, yang mengatur lebih lanjut isi Ordonansi tahun 1936 itu.

8). *Ibid*, hal. 191.

Sampai dengan keluarnya Undang-undang Reorganisasi Pemerintahan, maka daerah Kalimantan Barat ini masih mempunyai status sebagai *gewest*. Raja-raja dan penguasa swapraja masih tetap memerintah kerajaan mereka sebagai seditakala, namun mereka kini didampingi oleh pejabat-pejabat Belanda yang bertindak mewakili pemerintah Belanda dalam kerajaan-kerajaan itu. Mereka bermula berpangkat *Controleur* kemudian menjadi *Assistent Resident* ketika Kalimantan Barat ini diberi status sebagai keresidenan. Di tingkat bawah, dengan berlakunya tata pemerintahan dan perundang-undangan Belanda, mulai dibentuk *District* (distrik) dan *Onder district* (onderan, semacam kecamatan sekarang). Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan Kepala Distrik dan Kepala Onder Distrik, diangkat oleh raja-raja atas "saran" dan "nasehat" *Assistent Resident* atau pejabat-pejabat Belanda yang bertugas dalam kerajaan-kerajaan bumiputera yang bertindak sebagai penasehat raja. Kebanyakan dari Demang (Kepala Distrik) itu memang memilih dari antara kaum elite tradisional yang memperoleh didikan Barat. Mereka telah mengerti dan mempergunakan bahasa Belanda dan mengetahui tata administrasi pemerintahan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Di daerahnya, mereka adalah wakil pemerintah kerajaan, tetapi juga melaksanakan pemerintahan sesuai dengan petunjuk-petunjuk *gezaghebber* Belanda yang ditempatkan di daerah mereka.

Sejalan dengan pembentukan distrik dan onder distrik tersebut, maka petugas-petugas kepolisian ditempatkan pula di daerah-daerah untuk membantu memperkokoh kekuasaan dan menegakkan wibawa pemerintah kolonial. Mereka ini, yang lebih dikenal dengan nama *veldpolitie* (polisi lapangan) melakukan tugas-tugas ini semua dilakukan oleh satuan-satuan militer Belanda. Pos-pos penting yang dahulunya banyak ditempati satuan-satuan militer, kemudian ditempati oleh anggota-anggota kepolisian itu. Sebagian besar dari kesatuan kepolisian di daerah ini, ditempatkan di Pontianak dan Singkawang, ialah kota besar kedua di daerah ini. Di Singkawang, Belanda merasa perlu menempatkan sejumlah besar anggota kepolisian, mengingat banyaknya penduduk di kota itu dan masih labilnya situasi keamanan, mengingat pernah berkobarnya kerusuhan-kerusuhan anti pemerintah yang digerakkan orang-orang Cina, tetapi yang kemudian diikuti pula oleh orang-orang dari suku Daya dan Melayu.

Di Singkawang terdapat dua orang *posthuiscommandant* (komandan pos polisi) orang Belanda, yang masing-masing memba-wahi sejumlah anggota *veldpolitie* dan reserse. Tugas lain dari pejabat kepolisian, adalah bertindak sebagai *magistraat*, ialah melaksanakan peradilan terhadap kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum-hukum dan perundang-undang pemerintah. Di kota-kota, di mana masyarakat campur aduk, orang-orang Eropa dan Cina tinggal di tempat-tempat pemukiman mereka, tidak ber-campur dengan penduduk bumiputera. Mereka tinggal di *wijk* (perkampungan khusus). Perkampungan Cina ini dikepalai oleh kepala *wijk*, yang diberi pangkat militer, letnan atau mayor (*majoor der Chineezen*) menurut banyak sedikitnya penduduk yang dibawahahi.

Kota-kota baru bermunculan sejak awal abad ke 20, terutama di daerah-daerah pantai, dan terutama sekali kota-kota itu tumbuh dan berkembang setelah ada jalan-jalan raya yang melaluinya. Per-dagangan merupakan mata pencaharian baru bagi penghuni-peng-huni kota, khususnya orang-orang Cina. Mereka dahulunya meru-pakan petani di pedesaan, yang meninggalkan tempat tinggal mereka semula sebagai akibat dari hancur dan bubarnya kongsi-kongsi Cina. Kebudayaan mereka sejauh dimungkinkan, tetap mereka pertahankan. Adat-istiadat dan agama/kepercayaan warisan dari leluhur mereka tetap dilestarikan. Rumah-rumah ibadat kepercayaan Konghucu (*toapekong*) bertebaran di kota-kota di mana penduduk Cina banyak terdapat, yayasan-yayasan yang ber-asa kekeluargaan dan upacara-upacara yang sesuai dengan pegangan adat leluhur, tetap dilestarikan. Namun penduduk Cina di kota-kota itu tidak pula bebas dari pengaruh kebudayaan Barat.

Pengaruh Barat ini menyusup masuk melalui pendidikan maupun melalui kegiatan penyebaran agama Kristen yang dilaku-kan oleh misi Katolik. Misi Katolik merupakan misi penyebar agama Kristen yang pertama memasuki daerah-daerah yang baru dibuka dan selesai diamankan.

Dengan dukungan dan dorongan pemerintah Belanda, mereka memasuki daerah-daerah itu dan melakukan tugas penyebaran agama. Salah satu sasaran penyebaran agama itu adalah penduduk Cina. Pemeluk-pemeluk agama Kristen/Katolik yang pertama memang banyak berasal dari golongan penduduk Cina itu. Pendu-duk Cina di kota-kota pantai itu sebagian telah berhasil mening-katkan kehidupannya dan mereka menjadi kaum elite dari golong-

annya. Mereka ini mulai membuka diri terhadap pengaruh kehidupan dan kebudayaan Barat. Di antara mereka itulah agama Kristen memperoleh pengikut. Para penyebar agama dan rohaniwan Katolik yang mendapat kesempatan kerja menyebarkan agama telah berhasil mendirikan paroki-paroki mereka yang pertama. Pada tahun 1905 mereka mendirikan paroki Katolik pertama di Singkawang, pada tahun 1907 di Pemangkat, pada tahun 1909 di Pontianak, sedang pada tahun 1913 di Sambas.⁹⁾ Sistem pendidikan Barat pun mulai dikenal setelah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tertanam kokoh.

Madrasah-madrasah yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan yang selama berabad-abad lamanya berfungsi sebagai lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang mendidik kaum elite tradisional dalam kerajaan-kerajaan di daerah ini, memang tidak diganggu eksistensinya oleh pemerintah kolonial. Tetapi di samping itu pemerintah Belanda mulai giat berusaha agar ikatan tradisional antara raja-raja dan keluarganya, dengan madrasah, mulai longgar. Secara sistematis dan berangsur, madrasah-madrasah itu mulai kehilangan peranannya, terdesak oleh mulai berfungsinya lembaga-lembaga pendidikan, yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lembaga-lembaga pendidikan yang memakai sistem pendidikan Barat ini, yang umumnya berbentuk sekolah rakyat (*volksschool*) mulai berdiri di mana-mana, sesudah penggantian abad ke 19 dengan abad ke 20. Di Sintang misalnya, *Volksschool* telah mulai berdiri di tahun 1907.

Di Pontianak, sekolah-sekolah serupa didirikan mula-mula oleh misi Katolik, dan beroperasi sejak tahun 1910, beberapa tahun setelah pemerintah kolonial mulai mengoperasikan sekolah-sekolah. Di samping *Volksschool*, pemerintah mendirikan pula Sekolah Rakyat Sempurna untuk anak-anak Indonesia dari golongan elite, yang disebut *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Sekolah yang serupa didirikan pula untuk golongan Cina yang telah menerima pengaruh kebudayaan Barat. Sekolah ini disebut HCS (*Hollandsch Chineesche School*) HCS di Pontianak didirikan oleh misi Katolik pada tahun 1924.¹⁰⁾

9) -----, *Archdiocese of Pontianak*, (Pontianak, 1977), halaman. 26

10) -----, *Archdiocese of Pontianak*, opcit, halaman 26.

Pendidikan dengan sistem Barat itu secara berangsur makin banyak dikunjungi oleh anak-anak golongan bumiputera dan golongan lain, karena sistem pendidikan ini menjanjikan tersedianya pekerjaan yang menghasilkan upah. Dengan demikian, mereka yang menghendaki untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah, baik pada pemerintahan Belanda (sebagai pegawai rendahan), atau pada dunia usaha yang memerlukan tenaga, perlu mempunyai dasar pendidikan seperti yang diberikan pada sekolah-sekolah itu. Dan hal semacam itu memang tidak dapat dijanjikan oleh madrasah-madrasah.

Pengaruh penanaman kekuasaan kolonial Belanda yang lain tampak dengan mulai dipergunakannya bahasa Belanda sebagai bahasa resmi pemerintahan. Dalam "cap" kerajaan-kerajaan, selain huruf yang secara tradisional dipergunakan (ialah huruf Arab), mulai diterakan pula kalimat dalam bahasa Belanda.

Perayaan-perayaan yang berkaitan dengan hari-hari besar yang diperingati oleh bangsa Belanda, kini wajib pula dirayakan oleh rakyat Indonesia. Di kota-kota, jalan-jalan yang penting mulai diberi nama dan pada tempat-tempat umum yang penting dicantumkan nama atau kalimat-kalimat dalam bahasa Belanda.

B. TUMBUHNYA KESADARAN KEBANGSAAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT

Seperti telah disebutkan di muka, dengan selesainya gerakan pasifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah membuka kesempatan bagi penduduk bumiputera dan terutama anak-anak dari golongan elite masyarakat, untuk memajukan dan menaikkan kehidupannya dengan menerima pendidikan. Pendidikan dengan sistem Barat itu memang membuka cakrawala baru bagi kaum bumiputera, karena membuka kesempatan untuk memasuki lapangan kerja, yang hanya bisa dimasuki jika seseorang telah memperoleh dan menamatkan pelajaran pada sekolah-sekolah ala Barat itu. Namun di lain pihak, pendidikan pulalah yang dapat memperkenalkan bangsa kita dengan faham-faham baru, yang umumnya masuk melalui buku, sedikit demi sedikit mulai dikenal dan direnungkan oleh mereka yang telah menerima pendidikan. Pengetahuan yang di-

peroleh daripadanya, perlahan-lahan mulai menumbuhkan kesadaran dan mendorong untuk berfikir. Namun karena sedikitnya jumlah mereka yang telah mengenyam pendidikan di daerah ini, dan karena mereka berasal dari kalangan yang ingin tetap menikmati status dan kurang bernafsu untuk mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus ke arah usaha menentang pemerintah yang berkuasa. Tetapi kiranya kurang tepat jika dikatakan bahwa timbulnya rasa kesadaran atau hasrat untuk mengadakan sesuatu perubahan, hanya terdapat di kalangan atas dari masyarakat.

Hubungan perdagangan yang terjalin antara pedagang-pedagang di daerah ini dengan pedagang-pedagang di daerah lain, terutama Jawa, sempat pula memasukkan faham-faham baru yang sedang berkembang di daerah lain yang lebih maju dan ikut pula berperan menumbuhkan kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat banyak. Orang-orang Minang yang tiba di daerah ini dalam usaha mencari nafkah, membawa serta cita-cita dan faham baru yang sedang berkembang di kalangan umat Islam. Faham pembaharuan yang diajarkan oleh Muhammad Abduh dan muridnya, Sayyid Rasyid Ridha, masuk secara berangsur melalui pendatang, yang disamping pedagang cerdik, juga adalah mubaligh ulung.

Di lain pihak, para saudagar intan dan jauhari yang banyak berdatangan dari Surabaya dengan maksud membeli dan memperdagangkan emas dan intan hasil pendulangan dari tambang-tambang di daerah kerajaan Landak, membawa serta gagasan dan cita-cita Haji Oemar Said Tjokroaminoto dan Serikat Islam-nya ke daerah ini. 11). Pengaruhnya memang tidak segera terasa. Pertama, karena gagasan dan cita-cita itu cenderung pada motif keagamaan ialah menebalkan semangat dan rasa keimanan, disamping membangkitkan kesadaran akan *ukhuwwah* Islam. Namun makin meresapnya ajaran baru yang masuk itu membuka mata rakyat kebanyakan di daerah ini akan kemajuan ummat Islam di daerah lain, khususnya di Jawa, dan menyadarkan mereka bahwa mereka harus mengejar ketinggalan jika mereka ingin disebut sebagai ummat Islam yang maju.

Masuknya faham serta ajaran baru dari Jawa dan daerah

11). Kodam XII/Tanjungpura, Tanjungpura berjoang, (Pontianak, 1970), hao. 83.

lain ini ternyata mampu mendorong pemuda-pemuda dari kalangan rakyat dan dari kalangan keluarga ulama, untuk belajar keluar daerah, bahkan juga ke luar negeri, ialah ke Hijaz dan Mesir. Mereka yang pergi belajar untuk berguru pada ulama ulama mashur di Hijaz dan Mesir itu, seperti Haji Abdurrahman dan Haji Basiuni Imran, merupakan orang-orang pertama dari daerah ini yang berhasrat mencari ilmu ke negeri asing; dan mereka segera diikuti oleh pemuda-pemuda lain dari zamannya. Pembaharuan dan semangat baru yang mereka bawa dari luar dilancarkan untuk me"muda"kan kembali dan memperkuat kembali (revitalisasi) keimanan yang boleh dikatakan merosot di daerah ini. Usaha mereka untuk mengadakan perubahan sikap dan cara berpikir di kalangan rakyat memang tidak mudah. Pikiran-pikiran tradisional, keadaan masyarakat yang masih terikat erat pada tradisi dan ketentuan-ketentuan yang secara turun-temurun mereka taat, merupakan penghalang yang tidak mudah untuk diatasi. Namun para ulama dan cendekiawan Islam muda itu tidak pula menyerah. Di kerajaan Sambas, usaha-usaha mereka banyak memperoleh bantuan dari Sultan, yang memiliki pikiran dan pandangan yang maju. Pendirian perguruan *Tarbiyatul Islamiyah* yang merupakan perguruan sejenis *Volks-school*, tetapi dengan memasukkan pengajaran agama Islam dalam program pengajarannya, mendapat dukungan dan bantuan dari Sultan; serta merupakan contoh dari kebebasan dan dukungan yang diberikan oleh Sultan Sambas terhadap usaha pembaharuan agama dan masyarakat Islam dalam daerah kerajaannya. Perguruan itu terbuka untuk semua lapisan masyarakat, sekalipun untuk keluarga dan kaum kerabatnya, Sultan Sambas juga mendirikan *Madrasah as Sulthaniyyah* yang mirip dengan perguruan HIS (jadi dengan memasukkan pengajaran bahasa Belanda sebagai program wajib) tetapi tetap dengan dasar ke-islaman.

Menjelang tahun duapuluhan, jumlah kaum terpelajar di daerah ini makin bertambah banyak. Anak-anak dari suku Daya tampil dalam lapisan kaum terpelajar berkat pendidikan yang diusahakan dan diberikan oleh misi Katolik untuk mereka, kaum muda dari golongan penduduk Cina semakin bertambah sebagai akibat dibukanya sekolah-sekolah untuk golongan itu, sedang di kalangan kaum ningrat, kaum mudanya yang terpelajar mulai menduduki jabatan dalam pemerintahan di daerah

ini, menggantikan kaum tua mereka.

Sampai dengan dekade ke tiga hari abad ke dua puluh ini, pendidikan lanjutan (menengah) belum terdapat di daerah ini. Mereka yang berhasrat melanjutkan pendidikannya ke Jawa untuk memperoleh tambahan ilmu, dan mereka itulah yang di kemudian hari menduduki tempat-tempat penting dalam struktur birokrasi Pemerintahan di daerah ini, atau menjadi tokoh-tokoh yang sanggup menggerakkan perubahan dalam masyarakat. Dari antara mereka pula nanti timbul organisator-organisator dari perkumpulan-perkumpulan kebangsaan di daerah ini. Perkumpulan-perkumpulan kebangsaan ini pada umumnya baru timbul setelah tahun dua puluhan (1920-an).

Suatu konsekuensi yang timbul sebagai makin meluasnya pendidikan Barat dan makin banyaknya orang yang terdidik, ialah hilangnya rasa enggan untuk meninggalkan desa atau tempat asal kelahiran, dan berpindah ke tempat lain untuk mencari pekerjaan yang bukan pertanian atau jenis pekerjaan lain yang bercorak tradisional seperti yang telah dilakukan oleh orang tua atau pun nenek moyang mereka. Atau pun mereka berpindah tempat karena ingin mencari suasana hidup yang lebih ramai dan lebih meriah dibanding dengan tempat asal mereka. Dengan demikian mulai terjadi arus perpindahan penduduk yang makin meningkat; demikian pula mobilitas penduduk juga meningkat.

Kota-kota yang ada di daerah ini mulai di isi oleh pendatang yang mencari kerja sebagai buruh atau pegawai rendah-an di kantor atau instansi pemerintah, begitu pula pada usaha niaga atau pun lapangan kerja lain yang memerlukan dasar pendidikan.

Cara hidup penduduk pun mulai berubah. Mereka yang mendiami kota mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengikuti cara hidup yang telah mengandung unsur tata hidup cara Barat, yang mereka pandang sebagai "cara hidup modern", yang sudah tentu sangat berbeda dengan cara hidup masyarakat di daerah-daerah asal mereka. Adat kebiasaan serta tradisi yang dijunjung tinggi oleh orang tua dan nenek moyang mereka, mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, adat kebiasaan yang baru mereka kenal setelah menjadi "orang kota" kini menjadi adat kebiasaan mereka. Keinginan untuk hidup yang lebih enak (*comfortable*) mendorong mereka untuk be-

kerja keras tidak kenal waktu. Hal ini berbeda sekali dengan gaya hidup orang di pedesaan yang santai. Tuntutan bermacam kebutuhan hidup, yang tidak dikenal oleh masyarakat pedesaan, kini bermunculan dalam kehidupan masyarakat kota.

Kesadaran akan kebutuhan hidup sehat menurut ajaran Barat, mengakibatkan tumbuhnya tuntutan akan tersedianya fasilitas kesehatan yang baik. Dokter masih amat terbatas jumlahnya; dokter yang bertugas di Pontianak yang permulaan abad ke-20 ini misalnya, adalah dokter militer, yang bertugas terutama untuk melayani kesehatan warga garnisun militer di Pontianak. Pemerintah sendiri belum dapat membuka rumah sakit pemerintah (*gouvernements ziekenhuis*) pada waktu itu. Pemerintah, dengan subsidiya kepada misi Katolik, mendorong pembukaan sebuah rumah sakit misi Katolik di Singkawang pada tahun 1918. 12). Di Pontianak sendiri, sebuah rumah sakit umum milik misi Katolik, baru didirikan pada tahun 1929. Dahulunya gedung yang dipakai oleh rumah sakit umum ini adalah sebuah tangsi polisi, yang sudah tidak dipakai lagi. 13).

Bersamaan dengan perkembangan kehidupan di kota-kota, timbul suatu lapisan baru dalam masyarakat kota, ialah lapisan kaum pertengahan atau lapisan menengah. Mereka itu adalah pegawai pemerintah atau pun kaum terpelajar yang bekerja di luar pemerintah, pedagang kaya dan orang yang berstatus "disamakan" (*gehijk gesteld*) dengan orang Belanda, di samping tentu saja para bangsawan. Hasrat mereka untuk berkumpul dan bercengkerama di waktu senggang, mendorong timbulnya perkumpulan-perkumpulan (*club*) olah raga dan rekreasi serta tempat berkumpul, ialah gedung yang biasanya dinamakan "soos" atau *societeit*. Pengunjung-pengunjung soos ini berasal dari lapisan elite masyarakat kota itu.

Buku-buku atau pun bahan bacaan lain, seperti surat kabar dan majalah, secara berangsur mulai banyak terdapat di daerah ini. Beberapa jenis koran datang dari Batavia, terutama yang memakai bahasa dan tulisan Cina, sedang koran yang ada di daerah ini, artinya yang terbit di daerah umumnya adalah organ atau terompet partai/organisasi. Di antara 1920 - 1921

12). Sejarah Gereja Katolik di Indonesia, op.cit., hal. 320.

13). Sejarah Gereja Katolik Indonesia, op.cit., hal. 320

di Pontianak terbit berkala "Borneo Barat Bergerak" yang berhaluan kiri. 14) Isi berkala yang menjadi organ partai/organisasi itu memang tidak sebagaimana isi koran biasa; karena lebih banyak memuat berita aktivitas organisasi dan tulisan yang bersangkutan dengan ideologi yang dianut.

Koran maupun berkala serta buku-buku itu memang berperan sebagai jembatan untuk memasukkan faham atau gagasan yang sedang berkembang, demikian pula tentang perkembangan politik yang terjadi di luar daerah dan di luar negeri. Demikianlah maka sejalan dengan perkembangan aliran *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) dan kemudian meluas dan menyusup di kalangan masyarakat melalui "Sarekat Rakyat" yang di daerah ini pun terdapat cabang-cabangnya, maka organ yang berhaluan kiri pun banyak bermunculan. Sekitar tahun 1925 timbul berkala "Berani" yang mencerminkan haluan politik yang dianut oleh Sarekat Rakyat, demikian pula berkala "Sinar Borneo" (1926) di Pontianak 15).

C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN PARTAI/ORGANISASI

Sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah ini, maka pertumbuhan dan perkembangan pergerakan kebangsaan tidaklah sepesat dan semaju pergerakan kebangsaan yang ada di Jawa maupun Sumatera. Pengenalan dan penghayatan terhadap gerakan politik baru tumbuh sesudah terbentuknya golongan terpelajar dalam masyarakat di daerah ini. Dan hal itu baru terjadi setelah lewat dekade pertama dari abad ke-20 ini.

Golongan terpelajar yang menikmati pendidikan Barat ini merupakan golongan yang mendapat tempat terhormat dalam masyarakat 16). Sebagai orang-orang yang dipandang memiliki kelebihan dalam ilmu, mereka mempunyai tempat atau kedudukan yang tinggi dalam hirarki sosial. Seperti dahulu para ulama, guru agama dan pendekar mendapatkan tempat yang terhormat, maka kaum inteligensia modern mendapatkan pengesahan sebagai pemimpin. Mereka itu dipandang oleh anggota masyarakatnya sebagai orang-orang yang dapat dijadikan pe-

14 dan 15). Penuturan Sdr. Tan Mohd. Saleh, Pemuka Masyarakat dan anggota Staf Bidang Pendidikan Masyarakat pada Kanwil Dep. P dan K.

16). Sartono Kartodirdjo, dkk. Sejarah Nasional Indonesia, V (Jakarta, 1977), hal. 174

gangan atau pedoman sebagai orang yang bisa dijadikan tumpuan tempat bertanya dan sebagai orang yang bisa dibanggakan, berkat ilmunya itu. Mereka itulah yang berkenalan, dan kemudian mendalami faham dan ajaran dari Barat, dan mereka pula yang kemudian secara sadar atau tidak, langsung maupun tidak langsung, menjadi "agen penyebaran" dari ajaran atau faham yang telah mereka kenal dan pelajari. Dalam usaha mencari dan menyebarkan pengaruh, mereka itulah yang kemudian mendirikan perkumpulan dan partai. 17). Namun karena pertumbuhan dan pembentukan golongan terpelajar di daerah ini dapat dikatakan terlambat, maka perkumpulan maupun kepartaian di daerah ini tumbuhnya terlambat pula.

Organisasi yang boleh dikatakan merupakan organisasi yang tertua di daerah ini, adalah *Sarekat Islam* yang diperkirakan didirikan pada tahun 1914 di Ngabang, yang pada masa itu merupakan ibukota kerajaan Landak. Daerah sekitar Ngabang ini terkenal sebagai daerah pertambangan emas dan intan, dan dengan demikian mengakibatkan bahwa kota Ngabang merupakan kota pedagang dan jauh hari dari Surabaya dan Banjarmasin. 18). Serikat Islam ini didirikan di daerah ini, sebagai perwujudan dari rasa tertarik dan simpati atas ide dan cita-cita Sarekat Islam, yang dibawa masuk dan dikenalkan oleh para pedagang pendatang itu.

Sarekat Islam dengan mudah berkembang di daerah ini mengingat maksud dan tujuannya yang mudah diterima dan difahami oleh lingkungan masyarakat yang taat beragama Islam di daerah ini, lebih-lebih yang bermata pencaharian dagang.

Tujuan Sarekat Islam itu, seperti yang disebutkan oleh Soesanto Tirtoprodjo 19), adalah:

1. memajukan perdagangan
2. memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesukaran.
3. memajukan kepentingan rohani dan jasmani dari penduduk asli.
4. memajukan kehidupan agama Islam.

17). Sartono Kartodirdjo, *opcit*, hal 174.

18). Penuturan Sdr. Tan Mohd. Saleh.

19). Soesanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Jakarta, 1970), hal.27

Sarekat Islam yang berdiri di Ngabang di tahun 1914 itu, merupakan cabang. Cabang itu mempunyai susunan pengurus yang diketuai oleh *Haji Ismail*, dengan wakilnya *Masudi Amin*. Dayatarik dari perkumpulan ini terutama adalah karena pengurusnya adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam daerah dan masyarakatnya, dan didukung pula oleh para ulama dan guru-guru agama (*ustadz*) dalam daerah itu, serta pula oleh para pedagang Islam di sana.

Di daerah pedesaan sekitar kota Ngabang, yang penduduknya taat beragama Islam, Sarekat Islam ini dikenalkan kepada masyarakat oleh para guru agama tersebut. Di Pontianak, cabang Sarekat Islam baru berdiri beberapa tahun kemudian, dan bersamaan itu berdiri pula sebuah cabang di Singkawang. Nampaknya Sarekat Islam hanya berkembang di daerah-daerah pantai, dimana hubungan dengan daerah lain gampang dilakukan.

Selain itu sangat mungkin pula kenyataan bahwa sebahagian besar penduduk pantai adalah beragama Islam dan terdiri dari suku bangsa Melayu, mendukung perkembangan dan pertumbuhan perkumpulan tersebut. Di wilayah kerajaan Sambas, Sarekat Islam terutama berpengaruh di kalangan rakyat petani. Persaingan tajam yang timbul antara petani penduduk asli yang umumnya beragama Islam, dengan petani Cina yang banyak terdapat dan berusaha di daerah kerajaan Sambas ini, telah mendorong timbulnya suatu usaha untuk mempersatukan diri dan memperkuat rasa setia kawan antara mereka; lebih-lebih setelah mereka melihat bahwa petani-petani Cina itu mempunyai ikatan persatuan yang kokoh, yang didukung oleh kelompok-kelompok penduduk Cina yang kuat ekonomi dan pengaruhnya di kota-kota. Akan tetapi perkembangan Sarekat Islam di daerah ini tidak dapat dikatakan lestari.

Beberapa tahun sesudah selesainya Perang Dunia I, keadaan ekonomi para petani dan pemilik kebun, makin baik. Kenaikkan harga hasil bumi dan hasil kebun sebagai akibat dari membaiknya pasaran hasil pertanian Indonesia di luar negeri, membawa kemakmuran bagi petani dan pemilik kebun itu. Tetapi kehidupan ekonomi yang lebih baik dan kemakmuran yang nampak dirasakan oleh rakyat petani (dan juga oleh pedagang), yang lebih baik daripada masa sebelumnya, membawa akibat

yang kurang menguntungkan bagi perkumpulan dan organisasi dimana banyak di antara mereka menjadi anggotanya. Rasa persatuan dan setia kawan yang dahulu terpupuk baik, dan semangat untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, mulai mengendor. Gejala ini juga meliputi para pemuka organisasi Sarekat Islam, mengingat bahwa mereka pun berasal dari lingkungan hidup yang sama. Mengendornya semangat para pemuka organisasi ini membawa akibat mengendornya kegiatan-kegiatan organisasi itu. Sebagai akibatnya, banyak anggota yang masih muda dan penuh semangat berjuang, merasa kecewa melihat keadaan seperti ini. Mereka beranggapan bahwa Sarekat Islam sudah tidak mampu memperjuangkan cita-citanya; di samping itu mereka melihat dengan rasa khawatir perkembangan penyebaran agama Kristen yang mendapat dukungan dari pemerintah kolonial dan makin hebatnya kegiatan pedagang-pedagang Cina untuk menguasai perekonomian di daerah-daerah kerajaan.

Di antara mereka yang kecewa terhadap kelambanan gerak organisasi dan kelemahan para pemukanya, adalah pemuda-pemuda yang berjiwa militan seperti Gusti Sulung Lelanang, Gusti Mahmud, Haji Rais bin Abdurrahman, Muhammad Hambal dan sebagainya. Mereka kemudian berpaling pada seruan dan tulisan dari tokoh-tokoh Sarekat Islam di Jawa yang telah terpengaruh oleh ide-ide sosialisme sebagaimana yang dipropagandakan oleh Sneevliet dan kawan-kawannya. Seruan maupun tulisan-tulisan itu masuk ke daerah ini, baik melalui selebaran/buletin yang dapat mereka peroleh, maupun melalui orang-orang yang pulang pergi melakukan hubungan dagang, dari daerah ini ke Jawa. Seperti diketahui, hubungan dagang antara daerah ini dengan pulau Jawa cukup ramai dan tidak mustahil apabila dalam interaksi perdagangan ini juga terjadi interaksi cita-cita dan faham-faham politik. Maka tidak mustahil apabila kemudian dalam tubuh Sarekat Islam di daerah ini, seperti di Singkawang, Pontianak maupun Ngabang sendiri, terdapat unsur-unsur yang mulai "membelot") terhadap pimpinan yang ada dan yang mereka nilai lemah itu. Mereka inilah yang kemudian merupakan *embryo* dari organisasi yang berhaluan kiri, yang ikut mengobarkan gerakan perlawanan di Kalimantan Barat sekitar tahun 1926 nanti.

Kedudukan wanita di daerah ini masih tetap seperti sedia kala, tidak banyak mengalami perubahan. Agama Islam memang kuat berakar dalam kehidupan masyarakat dan meskipun banyak adat kebiasaan yang ada hubungannya dengan kebudayaan Islam memasuki daerah ini, namun pengaruh budaya Islam tidak banyak menggoyahkan adat kebiasaan yang sudah turun temurun berlaku dan berakar dalam masyarakat. Bahkan dalam banyak hal, terjadi gejala sinkretisasi dari unsur budaya Islam dengan unsur adat dan budaya yang telah berabad lamanya berakar dalam masyarakat.

Kedudukan wanita di kalangan suku-suku Daya lebih bebas. Banyak dari mereka itu kemudian menjadi pemeluk agama Kristen Katolik yang disebarkan dengan giatnya oleh para misionaris Katolik. Ketika misi Katolik membuka sekolah-sekolah, anak-anak perempuan suku Daya ini pula yang banyak menjadi muridnya. Organisasi atau pun perkumpulan kaum wanita pada masa itu belum ada di daerah ini. Demikian pula halnya dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda atau semacamnya.

Pengaruh perkumpulan-perkumpulan pemuda di Jawa maupun daerah lain, seperti Sumatra, baik yang bercorak kebangsaan maupun yang masih bercorak kedaerahan, seperti *Jong Java*, *Jong Celebes*, *Jong Sumatra* dan sebagainya, belum menjamah daerah ini. Perkumpulan pemuda yang ada hanyalah perkumpulan yang bercorak rekreatif, misalnya perkumpulan sepak bola yang merupakan salah satu jenis olah raga yang digemari masyarakat daerah ini, atau pun hanya merupakan perkumpulan pemuda di kampung yang bertujuan bantu membantu mengatasi kesulitan hidup atau pun menjaga keamanan lingkungan hidup masing-masing. Perkumpulan pemuda pelajar praktis tidak terdapat di daerah ini. Kebanyakan pemuda terpelajar yang hidup di kota hanya menjadi anggota perkumpulan rekreasi dan klub yang ada di kota seperti Pontianak dan Singkawang.

Pergaulan pemuda terpelajar ini dengan sesamanya kaum muda dari lapisan lain dalam masyarakat, amat terbatas. Sampai tahun 1930, di daerah ini belum terdapat perkumpulan kepanduan. Perkumpulan kepanduan baru timbul sejalan dengan berkembangnya Muhammadiyah dan Partai Indonesia Raya. Muhammadiyah baru dikenal masyarakat daerah ini di sekitar

tahun 1925 dan 1926, dan pada tahun itu pula berdiri sebuah cabang Muhammadiyah di daerah ini. Bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah, berdiri pula organisasi pemudanya, yang bercorak kepanduan, ialah "Hizbul Wathan". Namun keanggotaan Hizbul Wathan itu pun terbatas di tempat yang ada Muhammadiyah, sedang kita ketahui bahwa pada tahun itu, Muhammadiyah di daerah ini belum dapat mengembangkan sayapnya. Bahkan kebanyakan umat Islam masih memandang hal ini dengan penuh rasa curiga terhadap organisasi Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan itu, yang dipandang sebagai organisasi terlalu modern dan kebarat-baratan.

Dengan berdirinya Partai Indonesia Raya (Parindra) sekitar tahun 1935 di daerah ini, maka berdiri pula organisasi pemudanya, yang juga bercorak kepanduan, ialah "Surya Wirawan". Parindra memang lebih luas daerah kegiatannya dan banyak anggotanya, juga di daerah-daerah. Oleh karena itu maka "Surya Wirawan" pun banyak berdiri di daerah-daerah dan menghimpun pemuda-pemuda anggota Parindra, maupun pemuda-pemuda yang bersimpati dengan cita-cita dan tujuan "Surya Wirawan" itu. Dapat disebutkan bahwa anggota-anggota "Surya Wirawan" kebanyakan memang berasal dari kalangan kaum muda yang telah menerima pendidikan. Dibandingkan dengan organisasi-organisasi pemuda lain, "Surya Wirawan" merupakan organisasi yang terbesar di daerah ini. Tokoh-tokoh pemimpinnya antara lain adalah: 1. Gusti Ahmad, 2. Uray Abdurrahman, 3. Makmun, dan 4. Soebiyanto dan lain-lainnya. Selain pakaian seragam kepanduannya yang menarik, juga salam "HIDUP" yang menjadi salam kepanduan mereka, sangat memikat pemuda dan remaja. 19 a).

D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914 - 1918)

Pada waktu Perang Dunia I pecah di Eropa di tahun 1914, pemerintah Kolonial Belanda di daerah ini masih disibukkan dengan kegiatan operasi pasifikasi, dengan tujuan untuk menundukkan suku-suku yang masih belum mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda, maupun mereka yang masih

19 a). Penuturan Sdr. Tan Mohammad Saleh.

melakukan perlawanan terhadap usaha Belanda di daerah-daerah, di mana secara resminya para rajanya sudah menandatangani Korte Verklaring.

Di samping itu dapat dikemukakan bahwa orang-orang Cina di sepanjang pantai di daerah Mempawah dan Singkawang pada tahun 1914 itu mengangkat senjata melawan Belanda. Mereka ini adalah sisa-sisa anggota kongsi Cina yang telah dibubarkan di akhir abad ke-19.

Gerakan pasifikasi ini berlanjut hingga tahun 1919 dan 1920, meskipun sesudah itu disana sini masih terdapat perlawanan lokal yang timbul dari kalangan rakyat, baik yang bermotifkan rasa tidak senang akibat tekanan pajak, maupun karena pengaruh cita-cita pergerakan kebangsaan, yang dipropagandakan dan disebar luaskan oleh organisasi kebangsaan yang telah berdiri di daerah ini, khususnya oleh Sarekat Islam. 19 b).

Gema dan pengaruh Perang Dunia I terasa pula di daerah ini. Daerah Kalimantan Barat, sejak abad ke-19 terkenal sebagai daerah yang menghasilkan komoditi yang laku dijual di pasar dunia, seperti lada, dan kemudian juga karet, ikut mengalami pukulan sebagai akibat terhentinya ekspor barang-barang tersebut ke Eropa, dan sebagai akibatnya merosotlah harga komoditi tersebut. Pada waktu itu hampir 60% penduduk menggantungkan nasibnya pada usaha mengumpulkan getah pohon karet. Jatuhnya harga karet membawa kesulitan yang tidak sedikit pada kehidupan para petani tersebut.

Kenyataan ini akan lebih berat lagi, apabila diingat bahwa pada umumnya para petani dan perkebunan karet itu hidupnya amat tergantung kepada *tauke* mereka, ialah pedagang atau orang-orang Cina yang membuka usaha di daerah pedesaan maupun di kota-kota, untuk menampung hasil kebun para petani itu dan sekaligus bertindak sebagai kreditor bagi mereka, baik dalam bentuk bahan kebutuhan hidup sehari-hari, maupun dalam bentuk uang. Kedudukan para pedagang Cina ini begitu kuat; merekalah yang merupakan "penentu" harga, dan dengan demikian juga "menentukan" nasib para petani dan perkebun itu.

19 b). Penuturan R. Mahmud Susilo Suwignyo, perintis, Pejuang kemerdekaan, dalam wawancara, Maret 1979.

Jatuhnya harga karet dan merosotnya tingkat hidup rakyat yang timbul sebagai akibatnya; ditambah lagi dengan pungutan pajak yang semakin intensif dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, menyebabkan kegelisahan di kalangan rakyat. Para pemungut pajak ini, dalam melakukan tugasnya sering dikawal dan diiringi oleh polisi atau pun sepasukan kecil militer Belanda, tidak jarang menjumpai tantangan atau perlawanan dari rakyat yang merasa keberatan membayar pajak, di masa yang sulit itu. Bahkan tidak jarang sikap melawan itu diwujudkan dalam bentuk perlawanan bersenjata. Perang Tumbang Titi (1914) di daerah Ketapang, adalah perang yang timbul dengan latar belakang penolakan rakyat terhadap pungutan pajak yang dirasakan berat itu.

Demikian pula gerakan perlawanan di daerah Ketungau di pedalaman Sintang pada tahun itu juga, yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang bernama *Mantio*. Di Nanga Payak, juga dalam *afdeeling* Sintang, suatu gerakan perlawanan rakyat yang bermotifkan serupa dengan gerakan rakyat di Tumbang Titi maupun di Ketungau, timbul di bawah pimpinan seorang pemuka suku Daya, yang dikenal dengan nama *Donda Apang Semangai*.

Perlawanan yang digerakkan oleh Apang Semangai itu menular ke seluruh kampung dan di daerah yang luas itu. Baru pada tahun 1918, empat tahun setelah ia mengobarkan gerakan perlawanan rakyat terhadap Belanda, di tahun 1918, ia dapat ditangkap oleh polisi Belanda. 20). Oleh megistrat Sintang kepadanya dijatuhkan hukuman penjara selama dua puluh tahun.

Di bagian selatan daerah Kalimantan Barat, dalam kerajaan Simpang, juga berkobar gerakan perlawanan rakyat, yang bermotifkan penolakan terhadap pemungutan pajak juga. Perang ini lebih dikenal dengan nama *Perang Belangkait*.

Kesulitan hidup rakyat yang dirasakan di daerah ini sebagai akibat memburuknya keadaan ekonomi karena merosotnya harga hasil bumi dan perkebunan, juga dirasakan oleh misi Katolik yang bergerak di daerah ini. Dalam laporan mereka disebutkan bahwa hasil dari kebun-kebun karet yang mereka miliki dan mereka usahakan, tidak laku dijual. 21). Hal ini mem-

20). Tamar Djaja, *Pusaka Indonesia* (Djakarta, 1966), hal. 576.

21). *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, opcit*, hal. 318.

bawa akibat bahwa mereka tidak dapat meluaskan kegiatan dan menghentikan kegiatan mereka untuk membuka obyek baru. Usaha untuk menolong rakyat kecil yang menjadi ummat mereka dan yang sangat memerlukan bantuan, juga amat dibatasi akibat kesulitan keuangan.

Pada sektor perdagangan, kegiatan perdagangan yang dahulu banyak ditangani dan diusahakan oleh para pedagang bangsa Indonesia, secara berangsur diambil alih dan dikuasai oleh para pedagang Cina. Seperti yang dikemukakan oleh Van Niel²²). dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat "golongan menengah" dalam arti kata yang sebenarnya seperti terdapat di negara Barat. Golongan menengah seperti inilah yang menurut Van Niel sebenarnya dapat menumbuhkan masyarakat yang merdeka dilihat dari segi politik dan yang berdaya tahan besar dalam segi ekonomi. Dalam masyarakat Indonesia, istilah "golongan menengah" ini hanya dipakai untuk menyebut golongan yang berpenghasilan cukup dalam masyarakat. Baik ia pedagang, petani, tetapi juga pegawai pemerintah, dokter, guru dan sebagainya. Dan tidak adanya golongan yang disebut sebagai golongan menengah dalam arti kata yang sebenarnya itu, menyebabkan mudahnya penguasaan ekonomi oleh golongan masyarakat yang bukan bumiputera terutama oleh orang-orang Cina dan Arab.

Di daerah ini, orang Cina lah yang berperan besar. Kedu-dukan yang kuat dalam perekonomian di daerah ini telah mereka warisi dari moyang mereka yang dengan kongsi-kongsinya telah menguasai perekonomian dari kerajaan-kerajaan di mana mereka bermukim. Dalam masa setelah tertanam kokohnya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, mereka sering diminta bantuan dan dipergunakan untuk bertindak membantu para *belastingcollecteur* (pengumpulan pajak) maupun sebagai "agen" dari perusahaan dagang Belanda untuk menyalurkan barang dagangan ke daerah pedalaman dan pedesaan serta menjadi pengumpul hasil kebun dari rakyat untuk kemudian dikirimkan ke perusahaan-perusahaan dagang Belanda di kota-kota besar, khususnya Pontianak, yang bertindak sebagai pengepor barang hasil kebun dan hasil bumi itu.

22). R. Van Niel *The Emergence of the Indonesian Elite*, (Bandung, 1960). Hal

Melalui jaringan hubungan mereka yang erat dan jangkauannya yang begitu luas, mereka juga melakukan usaha pengkreditan. Usaha ini biasanya mereka lakukan dengan cara memberikan hutang barang (tetapi kadang-kadang juga uang) kepada para petani maupun pengumpul hasil hutan, dengan jaminan bahwa nanti pihak yang berhutang akan meyetorkan hasil kebun atau hasil hutan yang mereka dapatkan, kepada orang-orang Cina itu. Usaha pengkreditan yang terselubung seperti inilah yang menyebabkan pengkreditan yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan rakyat, yang lebih dikenal dengan nama *Volkscredietwezen*, terbatas sekali dan tidak memperoleh ruang gerak.

Tahun-tahun semasa berkecamuknya perang di Eropa itu (Perang Dunia I), merupakan tahun-tahun konsolidasi dalam lapangan pemerintahan, bagi pemerintah kolonial Belanda di daerah ini. Struktur pemerintahan swapraja secara berangsur tetapi pasti, disesuaikan dengan struktur pemerintahan Belanda. Kekuasaan raja-raja dan penguasa swapraja makin berkurang dengan adanya jabatan administratif yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan dan peraturan pemerintah kolonial Belanda. Tahun-tahun bertepatan dengan berlangsungnya Perang Dunia I memang merupakan tahun-tahun pertama sejak pemerintah Belanda memaksakan berlakunya *Korte Verklaring* terhadap kerajaan-kerajaan.

Dalam dekade ketiga dari abad ke-20 itu di Kalimantan Barat tinggal lagi tiga belas kerajaan yang diakui sebagai "daerah yang berpemerintahan sendiri" (*zelfbesturende landschappen*) yang diperintah oleh Sultan ataupun Penembahan. Ketiga belas swapraja itu adalah: Pontianak, Landak, Mempawah, Sambas, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kubu Simpang, Matan dan Sukadana.

Para panembahan dan sultan tersebut pada hakekatnya adalah penguasa-penguasa nominal saja; kekuasaan yang sebenarnya dalam kerajaan-kerajaan berada di tangan para *gezaghebber* dan aparat pemerintah kolonial yang baru dibentuk dan berfungsi. Pemerintah kolonial Belanda menempatkan pejabat-pejabatnya di kerajaan-kerajaan, yang telah mengakui kedaulatan pemerintah kerajaan Belanda. Para pejabat ini, yang berpangkat *Controleur* maupun *gezaghebber*, membantu sultan/panem-

bahan dalam melaksanakan pemerintah menurut ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pemerintah Belanda serta mengawasi pelaksanaannya. Di tempat-tempat yang strategis dan dianggap rawan, seperti di Singkawang, Sambas, Sintang dan Ngabang, para *gezaghebber* juga merangkap menjadi komandan pasukan militer yang ditempatkan di situ. Pasukan itu meskipun kecil, namun cukup efektif untuk dipergunakan untuk menumpas gejala-gejala yang ada dalam masyarakat, baik yang timbul karena rasa ketidakpuasan para penguasa pribumi dan kaum kerabatnya, rakyat yang menderita akibat paksaan atau pun tekanan pajak; atau pun gerakan yang didorong oleh suatu cita-cita atau ideologi, seperti yang digerakkan oleh Sarekat Islam di sekitar tahun 1918 di Ngabang. *Gezaghebber* juga berfungsi sebagai hakim (*magistraat*) untuk mengadili perkara kejahatan di daerah tugasnya, sebelum pengadilan (*landgerecht*) dapat dibentuk dan berfungsi.

Upeti yang dahulu biasa diserahkan kepada raja/panembahan, sejak berlakunya pemungutan pajak oleh pemerintah kolonial, tidak lagi diperbolehkan. Sebagai gantinya, raja-raja dan panembahan memperoleh tunjangan (*onderstand*) atau subsidi dari pemerintah yang besarnya berkisar antara F. 11.000,- (untuk kesultanan Pontianak, yang dianggap sebagai swapraja terpenting) sampai F. 2.000,- untuk swapraja-swapraja yang kecil. 23).

Pejabat-pejabat dalam kerajaan yang diangkat berdasarkan struktur pemerintah baru yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, juga menerima gaji dari pemerintah.

Patut diketahui bahwa sesudah 1912, struktur baru dalam pemerintahan kerajaan, mulai diintrodusir. Jabatan tradisional seperti mangkubumi, laksamana, patih dan sebagainya, dihapuskan oleh pemerintah Belanda. Sebagai gantinya diadakan jabatan "Demang", ialah semacam *districthoofd* (kepala distrik). 24). Demang ini secara nominal tunduk kepada panembahan atau sultan, tetapi yang sebenarnya lebih banyak menerima perintah dari *gezaghebber* atau *Assistent Resident*. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan, bahwa misalnya kerajaan Lan-

23). Penuturan Sdr. *Gusti Abdul Hamid Aun*, seorang tokoh masyarakat, pejuang, kerabat dari panembahan Landak.

24). *G. Abdul Hamid Aun, opcit.*

dak dibagi menjadi dua distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang Demang, ialah distrik Landak Hulu dan Landak Hilir.

Para Demang itu membawahi kepala-kepala *onderdistrict* yang disebut *petinggi* atau *penggawa*, yang selanjutnya membawahi kepala-kepala kampung atau *temenggung* (kepala kelompok pada suku Daya). Sudah barang tentu mula-mula timbul rasa tidak senang di kalangan para pejabat tradisional dalam kerajaan-kerajaan akibat berlakunya struktur pemerintahan baru itu. Namun pemerintah kolonial Belanda pun tidak kehilangan akal. Mereka yang masih muda dan dapat diyakini kesetiaan mereka dikirimnya ke Jawa untuk memperoleh pendidikan pada lembaga pendidikan pejabat pemerintahan (OSVIA). Demikian pula beberapa panembahan atau sultan yang masih muda, diberi kesempatan melihat-lihat, meninjau dan belajar di Jawa. Anak-anak mereka didorong untuk masuk sekolah-sekolah yang mulai banyak dibuka seusainya Perang Dunia I, ialah sekolah-sekolah yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Semuanya ini diusahakan untuk mengurangi gejala/ rasa tidak puas di kalangan mereka, yang dapat berakibat buruk bagi pemerintah, jika mereka berusaha mempengaruhi dan mendapat dukungan rakyatnya. Gejala seperti itu memang telah terlihat dalam kerajaan Landak dan Mempawah. Namun kekuatan militer Belanda terlalu kuat untuk dilawan dengan kekuatan rakyat yang sederhana dan lokal sifatnya.

Suatu akibat lain yang bisa dilihat di daerah ini ialah, terdapatnya tokoh-tokoh bangsawan yang ikut aktif dalam kegiatan pergerakan kebangsaan mereka itu, ialah golongan bangsawan, merupakan kelompok kaum terpelajar yang pertamanya ada di daerah ini. Mereka pada umumnya dikirim oleh pemerintah Belanda, untuk belajar ke luar daerah, terutama ke Jawa. Pemerintah Belanda ingin menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang akan dapat menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan yang baru, dengan kata lain mereka diharapkan dapat menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda di daerah ini.

Tetapi memang tidak semua diharapkan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Sebagian lagi dari antara me-

reka diharapkan untuk menjadi guru, anggota kepolisian dan lain sebagainya. Maka banyak di antara bangsawan yang dikirim ke Jawa tadi memasuki *Normaalschool*, Sekolah Pertanian, KWS (*Koningin Wilhelmina School* = semacam sekolah tehnik) dan sebagainya.

Sepulang mereka dari Jawa, dengan harapan besar mereka ingin melakukan usaha memajukan rakyat mereka. Tetapi di antara mereka terdapat orang-orang yang merasa kecewa melihat keadaan dan nasib rakyat mereka, yang tetap menjadi obyek penindasan dan pemerasan dari kaum penjajah dan golongan lain dalam masyarakat yang kuat kedudukan ekonominya. Itulah sebabnya maka sejumlah bangsawan, terutama dari kerajaan/swapraja Landak, Mempawah dan Sambas, bergerak dengan mendukung organisasi pergerakan yang timbul. Di daerah-daerah swapraja lain, terdapat juga pemuka-pemuka dari kalangan bangsawan seperti itu, namun peranan mereka tidak menonjol dalam masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada ketiga swapraja tadi.

Dewan daerah (*locale raden*, atau pun sejenisnya) pada saat itu memang belum ada. Sampai dengan berlakunya *Bestuurschervormingswet* yang diundangkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) no. 276 tahun 1922, Dewan Swapraja gaya lama/tradisional, masih berfungsi. Dalam dewan tradisional seperti itu, pejabat-pejabat senior kerajaan menjadi anggotanya. Dalam kerajaan Landak misalnya, maka patih, mangkubumi dan laksamana menjadi anggota tetap dewan kerajaan itu. 25) Tetapi semua dewan swapraja itu hapus setelah Undang-undang Perubahan Pemerintahan itu berlaku. Fungsinya sebagai penasehat kepala pemerintahan (= raja) digantikan oleh *gezaghebber* atau pun kemudian oleh *Assistent Resident* sebagai wakil dari pemerintah Belanda. Sedang fungsinya sebagai badan pengadilan, digantikan oleh *magistraat* yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, dan kemudian oleh *landgerecht* (pengadilan negeri) menjelang pecahnya Perang Dunia II.

Dewan daerah itu baru ada setelah berlakunya Ordonansi Pembentukan Gubernur "Sumatra, Borneo dan Timur Besar" tahun 1936. Sesuai dengan pedomannya, Dewan Dae-

25). Keterangan Sdr. G. Abdulhamid Aun.

rah ini terdiri dari para pemuka masyarakat dalam daerah itu, atau pun orang yang dipandang dapat mewakili rakyat, melihat pengalaman atau kecakapannya. 26) orang-orang Belanda yang tinggal atau berada dalam daerah di mana ada Dewan daerah itu, dapat dipilih untuk duduk di dalamnya.

Mengenai *Volksraad*, dapat dikemukakan di sini, bahwa sampai tahun 1938, daerah Kalimantan Barat tidak diwakili dalam Dewan Rakyat itu. Sesuai dengan *Staatsblad* no. 216 tahun 1926 maka wilayah Hindia Belanda ini dibagi menjadi 12 daerah pemilihan (*kieskringen*) ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Kerajaan (Yogyakarta dan Surakarta), Sumatra Selatan, Minangkabau, Sumatra Utara, Sumatra Timur, Borneo, Celebes (Sulawesi), Maluku dan Sunda Kecil (kini: Nusa Tenggara. 27)

Borneo mendapat jatah untuk mengirimkan satu wakil, dan karena daerah ini terdiri dari Borneo bagian Barat dan Borneo Bagian Selatan dan Timur, maka diadakan penggiliran dalam penggunaan jatah itu. Baru setelah 1938 daerah ini punya wakil dalam *Volksraad*.

E. PERJUANGAN DI DAERAH

Seperti telah disebutkan di muka sampai dengan pecahnya perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial, di daerah ini hanya terdapat dua organisasi yang aktif bergerak. Yang satu adalah Sarekat Islam, merupakan organisasi kebangsaan yang mula sekali terdapat di daerah ini. Organisasi ini berkembang pesat sesudah tahun 1914, namun menjelang tahun 1920 nampak mulai mundur dan terhenti perkembangannya. Hal ini terutama disebabkan karena mundurnya tokoh-tokoh muda dari pimpinan Sarekat Islam. Mereka beranggapan bahwa Sarekat Islam terlalu lamban bergerak, hanya menjadi himpunan dari pedagang dan orang-orang kaya, sekali pun mereka beragama Islam; dan kurang melihat serta menghayati keadaan rakyat yang pada saat Perang Dunia I menderita sebagai akibat merosotnya harga hasil perkebunan dan pertanian. Di antara mereka terdapat sejumlah orang muda yang berpendidikan ba-

26). De Kat Angelino, A.D.A. *op cit*, hal. 456,

27). *Ibid*, hal. 461.

rat dan pernah belajar di Jawa seperti Gusti Sulung Lelanang yang berpendidikan Sekolah Guru, kemudian ada pula tokoh-tokoh yang luas pandangannya dan berani seperti Gusti Situt Mahmud, Muhammad Hambal, dan lain-lainnya.

Mereka mendengar tentang gagasan sosialisme yang sedang dicoba untuk disebarluaskan oleh Sneevliet dan kawan-kawannya, melalui ISDV. Sekalipun ISDV memang tidak dapat menyusup masuk Sarekat Islam, namun tokoh-tokoh pucuk pimpinan Sarekat Islam di Jawa, seperti Semaun dan Darsono, telah sempat terpengaruh oleh ide-idee sosialisme, yang anti kapitalis itu.

Di daerah ini, Gusti Sulung Lelanang dan kawan-kawan melihat perbedaan yang menyolok antara rakyat petani dan pekerja perkebunan dengan pemilik tanah dan kebun yang luas-luas; antara rakyat yang berpenghasilan kecil yang selalu terpukul dalam setiap krisis ekonomi, dengan golongan Cina yang merupakan golongan yang besar jumlahnya di daerah ini yang mempunyai kedudukan kuat dalam perekonomian, baik di kota (sebagai pedagang) maupun di desa (sebagai petani dan pemilik kebun) serta penguasa tambang. Lebih-lebih setelah terjadi pergolakan-pergolakan/perlawanan rakyat yang menentang pemungutan pajak oleh Belanda, berkobar di Ngabang dan sekitarnya pada tahun 1918. Pemberontakan ini memang tidak berhasil. Sebabnya adalah, karena kuatnya aparat keamanan Belanda yang ditugasi untuk menghadapinya, ditambah lagi dengan tidak cukupnya dukungan masyarakat terhadap gerakan perlawanan itu.

Kekecewaan tokoh-tokoh muda Sarekat Islam di daerah ini makin bertambah besar setelah melihat bahwa secara keseluruhan Sarekat Islam tidak dapat berbuat apa-apa untuk membela kaum tertindas itu. Maka tokoh muda itu secara bulat berpendapat bahwa hanya partai/organisasi yang berhaluan revolusioner yang akan dapat dijadikan tempat bernaung rakyat yang mengharapkan pembelaan atas nasibnya. Dengan demikian, pada tahun setelah 1919, Gusti Sulung Lelanang, Ahmad Sood, Gusti Situt Mahmud, Gusti Johan Idrus, dan beberapa tokoh lain, memisahkan diri dan membentuk kelompok tersendiri.

Mereka menyimak dengan cermat uraian-uraian Semaun,

Darsono, Haji Misbach dan tokoh-tokoh Sarekat Islam lain yang dianggap "murtad", termuat dalam surat kabar atau buletin yang sampai di daerah ini. Mereka pun sempat menerbitkan sebuah buletin, diberi nama "MENYALA"²⁸⁾ dan terbit secara tidak tetap selama beberapa tahun sampai tahun 1924. Kelompok itulah yang kemudian membentuk diri menjadi organisasi kebangsaan yang berhaluan kiri, ialah Sarekat Rakyat. Propaganda yang bergaya Haji Misbach dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin Sarekat Rakyat untuk mendapat pengaruh di kalangan rakyat yang umumnya taat beragama Islam tetapi miskin dan menderita.

Setelah "MENYALA" berhenti terbit, maka muncullah beberapa penerbitan berkala, pembawa suara dari Sarekat Rakyat. Semua berkala ini memang terbit secara tidak tetap. Pengawasan Belanda yang cukup ketat terhadap percetakan-percetakan yang ada, khususnya yang ada di Pontianak, menyebabkan atau merupakan salah satu faktor penyebab tidak tetapnya penerbitan penerbitan itu. Percetakan yang ada, jarang yang berani mencetak berkala yang berhaluan kiri itu.

Di antara berkala yang terbit sekitar tahun 1924, terdapat berkala yang menyerupai surat kabar harian, ialah "HALILINTAR" dan "BERANI". D.H. Assegaff²⁹⁾ menyebut berkala "HALILINTAR" sebagai salah satu dari surat kabar yang tercatat dalam laporan pemerintah daerah ini, yang digolongkan pada surat kabar pembawa suara golongan kiri, sedangkan Sudarjo Tjokrosisworo menyebutkan bahwa "HALILINTAR" merupakan salah satu dari tiga berkala berhaluan kiri, yang hidup hingga tahun 1926.³⁰⁾ Ketiga berkala yang disebut Sudarjo itu adalah "HALILINTAR", "BERANI" dan "WARTA BORNEO". Ketiga tiganya ini berhenti terbit setelah pergolakan rakyat tahun 1926 dapat ditindas dan Sarekat Rakyat dilarang berdiri.

Berkat media komunikasi massa yang dimilikinya itu dan kegiatan propagandis yang juga merupakan pemuka-pemuka Islam yang militan, maka Sarekat Islam sempat menanam pengaruhnya secara mendalam di kalangan rakyat di daerah pantai dan di kota-kota.

28). Penuturan sdr. Gusti A. Hamid Aun.

29). D.H. Assegaff, *Bunga Rampai Sejarah Media Massa*, (Jakarta 1978). Hal. 83.

30). *ibid.* hal. 114.

Sudah barang tentu, berkala tadi memang hanya menjadi konsumsi mereka yang dapat membaca dan menulis. Dan jumlah mereka yang bisa membaca dan menulis pada waktu itu belum cukup besar. Mereka ini pun umumnya terdapat di kota-kota. Penduduk daerah pantai memang berbeda sifat dan gaya hidupnya dengan penduduk daerah pedalaman. Penduduk daerah pantai ini terdiri dari berbagai macam suku dan asal keturunan, mempunyai latar belakang kultur dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Lagi pula kebanyakan kota di daerah ini juga tumbuh di daerah pantai. Terhadap pengaruh dari luar, mereka bersikap terbuka. Tidaklah mengherankan bahwa aliran modern dari Islam bisa berkembang subur di sini, demikian pula cara dan gaya hidup Barat dapat mudah diterima. Daerah pantai ini pun merupakan "daerah Cina"nya Kalimantan Barat, karena besarnya jumlah orang Cina yang bermukim di sini. Pergesekan-pergesekan karena perbedaan kedudukan sosial ekonomi ataupun karena perbedaan kultur mudah terjadi di sini.

Pemerintah Belanda tentu tidak tinggal diam. Karena Belanda mengetahui dan menyadari bahwa setiap gesekan (*friction*) yang ada, memberi peluang bagi lawan pemerintah untuk memperoleh pengaruh. Karena itu pengawasan pemerintah terhadap keadaan di daerah pantai cukup ketat. Hal itu lebih lagi setelah kegiatan-kegiatan kelompok yang berhaluan kiri meningkat menjelang tahun 1926. Segala gerak-gerik dari tokoh tokoh Sarekat Islam dan orang-orang yang bersimpati dengannya, betul-betul diawasi.

Ketika pemberontakan kaum kiri terjadi pada tahun 1926, baik di Jawa maupun Sumatra, maka kaum pergerakan di daerah ini pun tidak tinggal diam. Tokoh-tokoh Sarekat Rakyat mengambil kesempatan untuk menggerakkan perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial. Rakyat yang memang sudah merasa tertindih beban berat akibat pungutan pajak yang dilakukan oleh Belanda. Usaha membangkitkan perlawanan rakyat dilakukan melalui rapat-rapat yang diadakan pada beberapa kota; Pontianak, Mempawah, Ngabang, Singkawang, Pemangkat. Para pemuka Sarekat Rakyat mondar-mandir bergerak dari rapat ke rapat dan dari kota ke kota. Tetapi pemerintah Belanda bergerak cepat. Ketika di sana mulai timbul gangguan keamanan dan perlawanan terhadap pemerintah-pemerintah gubernemen, maka alat-alat keamanan pemerintah kolonial segera melakukan penangkapan penangkapan.

Pemerintah Belanda amat khawatir, jika propaganda dan hasutan perlawanan itu dapat mempengaruhi suku-suku Daya di pedalaman, maka akibatnya akan lebih fatal lagi. Suku-suku Daya memang sudah merasa tidak senang juga dengan pemerintah, karena pemerintah telah mengenakan berbagai larangan bagi mereka, yang amat membatasi kehidupan mereka. Selain itu mereka merasa terjepit pula oleh tekanan pajak.

Dari serentetan penangkapan yang dilakukan, boleh dikatakan hampir seluruh pemuka Sarekat Rakyat dapat ditangkap. Sepuluh di antara mereka yang ditangkap, merupakan tokoh-tokoh utama, antara lain : 1. Gusti Sulung Lelanang, 2. Gusti Situt Mahmud, 3. Gusti Johan Idrus, 4. Gusti Hamzah, 5. Mohamad Sohor, 6. Haji Rais bin Haji Abdurrahman, 7. Jeranding A. Rahman, 8. Ahmad Sood, 9. Mohammad Hambal, dan 10. Ahmad Marzuki.³¹⁾

Di samping itu terdapat tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang dapat ditangkap kemudian, di antaranya adalah Raden Machmud Susilo Suwignyo. semuanya tanpa kecuali dibuang ke Boven Digul, bersama sama dengan tokoh-tokoh pergerakan dari Banjarmasin, Celebes (Sulawesi) dan lain sebagainya. Semua media massa yang menjadi organ Sarekat Rakyat, dibreidel.

Sehubungan dengan itu dapat dikemukakan bahwa dalam laporan pemerintah di tahun 1928, tidak lagi terdapat nama sebuah surat kabar pun di daerah ini, sedang laporan dari tahun-tahun sebelumnya selalu menyebutkan media massa yang ada. Pers di daerah ini praktis tidak ada, sampai nanti pada tahun menjelang pecahnya Perang Dunia II, baru terdapat sebuah surat kabar lagi yang diterbitkan dan beredar di daerah ini ialah surat kabar "Borneo Barat," dengan penanggung jawab redaksinya R.J. Paat.³²⁾

Demikian pula setelah organisasi "Persatuan Anak Borneo" (PAB) lahir, maka terbit pula sebuah majalah yang diberi nama "PEMUDA". Majalah ini terbit di sekitar tahun 1938, diasuh dan dipimpin oleh tokoh ex-Digulis, yang telah dipulangkan oleh pemerintah kolonial. Penanggungjawab redaksi majalah tersebut adalah Haji Rais bin Haji Abdurrahman. Setelah tahun 30-an yang beredar di daerah ini terutama adalah surat kabar dan majalah terbitan Batavia.

31). Penjelasan sdr, Gusti Abdulhamid Aun,

32). Penjelasan sdr, Tan Mohammad Saleh,

Setelah Sarekat Rakyat dilarang hidup sebagai akibat dari perlawanan yang dilakukan olehnya terhadap pemerintah kolonial, maka kini tinggalah organisasi organisasi sosial yang masih bisa hidup. Organisasi-organisasi yang ada di daerah ini sifatnya masih lokal, banyak bercorak kekeluargaan atau kesukuan, dan tidak berkembang secara luas. Kebanyakan bertujuan memupuk persaudaraan, kerukunan antar keluarga kesatuan suku dan sebagainya. Yang menonjol di sini adalah organisasi kekerabatan di kalangan orang Cina. Mereka itu sedemikian erat kesatuan dan persatuannya, hingga sempat memiliki gedung pertemuan, mempunyai rumah pemujaan, yayasan kematian dan berbagai lembaga kegiatan mereka.

Di desa, kegiatan penduduk berjalan sebagaimana biasa. Banyaknya kebun baru (terutama kebun karet) yang dibuka, membawa masalah baru pula. Masalah yang terutama dirasakan dalam hal ini adalah masalah kurangnya tenaga. Usaha untuk mendatangkan tenaga dari pulau Jawa, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, maupun oleh misi Katolik, banyak mengalami kegagalan, terkecuali pada tempat-tempat tertentu.

Sebab utama dari kegagalan itu adalah kondisi tanah dan sifat air yang berbeda, yang bagi orang Jawa yang biasa mengolah tanah di kampung kelahiran mereka, merupakan sesuatu yang sulit dan tidak biasa. Lapisan humus yang tebal telah menyebabkan kesulitan untuk bertanam padi dan palawija. Hanya di daerah swapraja Mempawah dan Sambas, pendatang suku Madura yang ulet, berhasil membuka perladangan padi.

Masalah lain yang timbul, adalah pergesekan antara suku yang timbul sebagai akibat makin banyaknya pendatang yang menetap di daerah ini dan yang terutama berusaha untuk membuka perkebunan atau perladangan. Pergesekan itu timbul sebagai akibat perbedaan adat kebiasaan, tata cara hidup, sampai pula pada soal kepercayaan dan agama. Karena itu tugas kepolisian menjadi semakin bertambah.

Sejak tahun 20-an, pemerintah Belanda mulai menempatkan tenaga kepolisian (*veldpolitie*) pada tempat-tempat yang dipandang perlu, bersama dengan anggota militer, untuk membantu pejabat-pejabat setempat menegakkan kewibawaan pemerintah dan menjaga agar semua peraturan dan perundang-undangan, dijalankan dan ditaati.

Makin bertambahnya penduduk berarti makin banyak pula

masalah, demikian pula perbuatan kriminal semakin meningkat. Rumah rumah tahanan, yang kemudian diubah dan diperbesar sehingga menjadi rumah penjara, didirikan oleh pemerintah kolonial pada masa itu di hampir semua ibukota swapraja; Pontianak, Mempawah, Sambas, Sintang dan juga Singkawang. Meskipun penghuni rumah penjara itu tidak sebanyak penghuni rumah penjara di Jawa, namun terdapat pula di antara mereka terhukum yang bukan karena kejahatan biasa, tetapi karena membangkang terhadap peraturan pemerintah. Terhukum yang lama masa hukumannya dikirimkan ke luar daerah (Jawa dan Sumatra) sebagai "orang rantai (belunggu)".

Keadaan ekonomi yang membaik setelah Perang Dunia I juga membawa akibat bagi perkembangan kota. Pemerintah mulai mengatur tata kota, dengan mencontoh kota yang telah berkembang di Jawa. Di Pontianak, selain parit (kanaal) yang berfungsi sebagai jalan lalu lintas dan perdagangan, mulai dibuat pula jalan raya. Kanaal mulai diatur dengan *berm* (barau) untuk mencegah longsornya tanah dan diawasi kebersihannya. Kompleks perdagangan mulai pula dibangun di tepi sungai Kapuas. Sungai Kapuas masih tetap merupakan urat nadi perhubungan satu satunya ke daerah pedalaman pada masa itu. Penerangan jalan mulai mendapat perhatian, dengan pemasangan lampu minyak yang ditempatkan pada tiang-tiang dan dipasang pada jalan jalan atau simpang jalan yang penting.

Sebuah rumah sakit yang diusahakan oleh misi Katolik mulai dibuka masa itu di kota Pontianak. Disamping itu rohaniawan Katolik yang merangkap sebagai tenaga para-medis, giat mengunjungi kampung-kampung; selain memberikan bantuan medis kepada yang memerlukan, mereka juga mengajarkan agama Kristen.

Kesenian juga menerima pengaruh Barat yang semakin nyata, dalam kehidupan masyarakat. Musik-musik Barat (orkestra) yang dimainkan di "rumah rumah makan//restaurant (*societeit*) mulai menarik perhatian masyarakat. Perayaan perkawinan tidak dipandang lengkap jika tidak ada orkestra yang menghiburnya.

BAB IV

KEADAAN DI DAERAH ANTARA 1928 - 1942

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA SEKITAR TAHUN 1930

Menurut konstataasi Pluvier 33), tahun antara 1908 hingga tahun 1926 merupakan "tahun persiapan" bagi perkembangan selanjutnya dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Sesudah tahun 1926, orang melihat lahirnya gerakan kebangsaan yang bercorak dan berlandasan nasionalisme murni, yang mengambil bentuk dan wujudnya dalam Partai Nasional Indonesia tahun (1927).

Partai yang bercorak nasionalis ini memiliki sikap perjuangan, yang berorientasi kepada usaha untuk mencapai emansipasi politik, dengan berlandaskan kepada persatuan bangsa, dan emansipasi politik itu diusahakan untuk dicapai dengan memupuk dan membina kemampuannya sendiri untuk memperjuangkannya, tanpa harus bekerjasama dengan penjajah atau pun menerima bantuannya. Maka mulailah periode "non kooperasi" yang terkenal itu dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia.

Dalam periode itu pula berkobar semangat persatuan dan kesatuan, serta usaha yang tidak putus-putusnya yang dilakukan oleh orang-orang pergerakan, untuk menciptakan persatuan, dan usaha ini tidak hanya melibatkan organisasi organisasi politik saja, tetapi juga organisasi organisasi dari kaum wanita.

Di fihak lain, ialah di fihak pemerintah Belanda, sikap keras dan represif yang telah ditunjukkannya dalam menghadapi pergolakan golongan kiri di tahun 1926, masih belum juga dapat dihilangkan. Pemerintah Belanda masih bersikap penuh rasa curiga menghadapi pergerakan kebangsaan. "Artikel artikel karet", ialah artikel-artikel 153 *bis* dan *ter*, artikel 161 *bis* dan artikel 171 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terkenal itu, merupakan senjata yang ampuh dari pemerintah ko-

33). Pluvier, J.M., *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesia, in de jaren 1930 - 1942 (Bandung, 1953)* hal. 27.

lonial, yang selalu siap siaga menjebloskan setiap orang yang disangka bertindak mengganggu *rust en orde* dalam kawasan Hindia Belanda.

Aparat keamanan pemerintah kolonial yang ditugaskan khusus untuk mengawasi gerak gerik kaum pergerakan, ialah *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID), makin ditingkatkan jumlah anggotanya maupun kewenangannya. Tidak mengherankan apabila dalam periode sesudah tahun 1926, perjuangan gerakan kebangsaan menjadi lebih berat. Di daerah Kalimantan Barat, akibat tindakan represif pemerintah kolonial terhadap pergolakan rakyat tahun 1926, masih amat terasa. Pemimpin-pemimpin pergerakan yang aktif di daerah ini kebanyakan justru berasal dari Sarekat Rakyat, yang terlibat dalam pergolakan melawan pemerintah kolonial di tahun 1926 itu. Banyak pemimpin pergerakan di daerah ini karenanya diuber-uber oleh Belanda, dan kemudian ditangkap, untuk sesudah mengalami pengadilan yang singkat, dikirim ke tempat pembuangan di Boven Digul. Mereka dipandang berbahaya bagi pemerintah Belanda di daerah ini. Mereka itulah tokoh-tokoh yang aktif bergerak dan memimpin pergerakan di daerah ini, sejak Sarekat Islam berdiri di tahun 1914.

Banyak di antara mereka adalah kaum bangsawan, karena mereka itulah yang merupakan golongan terpelajar di daerah ini. Gusti Sulung Lelanang, misalnya, tokoh Sarekat Rakyat yang terkenal dan salah seorang pemimpin pergerakan yang dibuang ke Boven Digul, adalah putera Pangeran Laksamana kerajaan Landak, dan berpendidikan *Normaalschool*.

Dengan ditangkapnya pemimpin-pemimpin itu dan dengan dibubarkannya Sarekat Rakyat, maka praktis kegiatan pergerakan yang bercorak politik di daerah ini lumpuh. Pemimpin-pemimpin lain, juga dari Sarekat Rakyat, yang tertangkap dan dibuang ke Boven Digul di antaranya adalah Raden Machmud Sudilo Suwignyo, Jeranding Abdurrahman, dan lain-lainnya.

Lumpuhnya pergerakan kebangsaan yang bercorak politik di daerah ini, selain karena tindakan represif dari pemerintah kolonial, juga disebabkan karena tidak adanya kader-kader pemimpin yang disiapkan untuk memimpin gerakan kebangsaan manakala para pemimpin seniornya sudah tidak ada. Nampaknya ini memang merupakan salah satu kelemahan pokok dari pergerakan kebangsaan di daerah ini. Maka dapatlah dikatakan

bahwa dalam periode sesudah 1926, sampai saat berdirinya Partai Indonesia Raya di daerah ini nanti di tahun 30-an, pergerakan kebangsaan di daerah ini, berada dalam keadaan "tidak bergerak".

Tetapi hal ini hanya meliputi kegiatan pergerakan yang bercorak politik, sementara gerakan-gerakan rakyat yang bercorak dan berlandaskan sosial tetap berjalan. Dalam periode sesudah tahun 1926 itu memang hanya organisasi-organisasi sosial saja yang dapat hidup dan berkembang di daerah ini.

Organisasi sosial yang berasas Islam, seperti Muhammadiyah misalnya, diperkenalkan di daerah ini di sekitar tahun 1926, oleh muballigh muballigh dari Minangkabau, yang datang di Kalimantan Barat. Organisasi itu cepat berpengaruh pada penduduk daerah pantai, yang rata-rata lebih maju dan lebih terbuka pikiran dan hatinya kepada gagasan dan pandangan baru dalam Islam. Sebagai organisasi sosial, Muhammadiyah cepat berkembang dan dalam waktu beberapa tahun saja telah dapat mendirikan cabang-cabangnya di Pontianak dan Singkawang, dua kota penting di daerah ini. Selain itu mereka pun membuka sekolah, dan sesuai dengan prinsip yang dianut Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu berbeda sifatnya dengan madrasah biasa. Organisasi-organisasi sosial semacam Muhammadiyah itu memang tidak merupakan organisasi yang mengambil sikap keras atau pun "non kooperasi" terhadap pemerintah kolonial. Dengan demikian maka pergesekan-pergesekan sebagai akibat masalah "non kooperasi", tidak terdapat di daerah ini, karena memang tidak ada partai atau pun organisasi yang ada di daerah ini yang berhaluan revolusioner dan mengambil sikap non kooperasi terhadap pemerintah kolonial.

Demikian pula halnya dengan apa yang dinamakan "sekolah liar". Jikalau istilah "sekolah liar" ini diterapkan untuk menyebut semua sekolah swasta yang tidak bersubsidi, menurut istilah yang dipergunakan oleh Sartono ³⁴⁾, maka semua sekolah (atau madrasah) yang ada di sini dan yang didirikan oleh rakyat atau pun organisasi-organisasi sosial itu, adalah "sekolah liar atau *Wilde Scholen*. Belanda mempergunakan istilah "sekolah liar atau *Wilde Scholen*" untuk sekolah-sekolah swasta yang tidak bersubsidi", dan pengertian "liar" di sini diberikan

34). Sartono Kartodirdjo, dkk, op.cit, jilid V. hal. 142.

karena sifatnya yang sering bercorak anti kolonial dan juga karena sekolah-sekolah itu sering mengalami masa pasang naik dan pasang surut.

Tidak mengherankan, karena sekolah-sekolah swasta seperti itu memang membiayai dirinya sendiri; pengadaan gedung dan perabotan, pengadaan guru dan penggajiannya, pengadaan buku-buku pelajaran, dan sebagainya.

Dan pasang surutnya disebabkan oleh dua hal; pertama, ketidakmampuan dari para penyelenggaranya untuk meneruskan usahanya sebagai akibat besarnya pembiayaan dan kecilnya jumlah murid, yang menyebabkan kecilnya pendapatan; dan kedua: tidak jarang sekolah-sekolah itu mengalami gangguan atau tindakan dari polisi dan penguasa-penguasa pemerintah kolonial setempat, akibat rasa tidak senang mereka terhadap sekolah-sekolah itu.

Tergolong dalam kategori sekolah liar itu, adalah sekolah-sekolah yang didirikan dan termasuk dalam mata rantai dari organisasi-organisasi sosial yang besar seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa. Sekolah yang didirikan Muhammadiyah di daerah ini pada masa itu hanya berjumlah satu buah. Disamping Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam lain di kota Pontianak ini mendirikan sekolah "Islamiyah".

Disamping kedua organisasi yang bercorak Islam itu, di daerah ini banyak sekali terdapat sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat Cina. Menurut penuturan mereka yang hidup pada masa itu, jumlah sekolah-sekolah Cina seperti itu lebih dari 34 buah, tersebar dari desa-desa (yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Cina).

Perlu diketahui bahwa di daerah ini penduduk Cina, yang berusaha sebagai petani dan pekerja kebun, seperti nenek moyang mereka dari zaman kejayaan kongsi-kongsi, banyak yang bermukim di pedesaan, dengan demikian tidak mengherankan apabila banyak desa sebagian besar penduduknya terdiri dari orang-orang Cina itu.

Untuk kepentingan anak mereka, mereka mendirikan sekolah, kalau toh boleh disebut seperti itu. Murid-murid yang belajar di "sekolah-sekolah" semacam itu, berkisar antara 10 hingga 50 atau 60 orang. Guru-guru untuk sekolah-sekolah Cina di desa-desa seperti itu terdiri dari orang Cina penduduk desa itu yang dipandang pandai, atau mendatangkan dari desa lain.

Bahasa pengantarnya adalah bahasa *Kuo Yu*, dengan dipengaruhi kuat oleh dialek yang berlaku setempat. Di kota-kota, sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat Cina itu lebih teratur organisasinya. Umumnya sekolah-sekolah itu diasuh dan dibina oleh yayasan yang didirikan oleh penduduk Cina. Di Pontianak misalnya, yayasan seperti itu banyak terdapat, di antaranya yayasan *Chen Chiang*. Mereka mengatur sekolahnya dengan cara disesuaikan dengan organisasi sekolah-sekolah pemerintah. Namun bahasa pengantar yang dipakai tetap bahasa Cina. Hal ini memang berlainan dengan sebuah HCS yang telah ada, yang didirikan oleh misi Katolik di Pontianak. Sebuah HCS lagi terdapat di Singkawang, juga didirikan oleh misi Katolik. Namun nampaknya pemerintah kolonial Belanda di daerah ini tidak berbuat apa-apa untuk melarang berdirinya sekolah-sekolah seperti itu.

Wilde scholen Ordonnantie (Undang Undang Sekolah Liar) memang diumumkan dan diketahui oleh orang banyak, namun sejauh yang dilakukan pemerintah Belanda disini hanyalah melakukan pencatatan dan pengawasan. Rupanya pemerintah tahu keadaan sekolah-sekolah swasta seperti itu; pemerintah berpikiran bahwa tanpa ditindak atau ditutup, sekolah-sekolah swasta seperti itu bisa hancur dengan sendirinya sebagai akibat sedikit sekali jumlah murid dan besarnya pembiayaan, seperti yang telah disebutkan di muka.

Lagi pula pemerintah kolonial melihat bahwa organisasi nasional atau partai politik yang bersikap "keras" disini tidak ada, jadi pendukung yang bersikap keras dan berbahaya bagi pemerintah pun tidak ada.

Pengawasan terhadap madrasah-madrasah oleh pemerintah, juga tidak mudah. Hal ini disebabkan oleh begitu banyaknya madrasah yang berdiri di daerah ini. Madrasah-madrasah ini umumnya memberikan pelajaran agama dan akhlak, tetapi ada pula madrasah yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Organisasi madrasah juga berbeda-beda, dari yang kurang teratur, sampai kepada yang baik pengurusannya. Madrasah *Al Sultahaniyah* di Sambas yang didirikan sekitar tahun 1929, dan madrasah *Tarbiyatul Islamiyah* juga di Sambas, termasuk di antara sedikit madrasah yang baik dan teratur pengurusannya, lagi pula kuat dukungannya yang diperoleh bagi pembiayaannya. Madrasah *Al Sultahaniyah* di Sambas itu mendapat subsidi

dari kesultanan Sambas.

B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Keadaan perekonomian yang buruk sebagai akibat jatuhnya harga hasil pertanian dan perkebunan karena terhentinya ekspor ke Eropa semasa berlangsungnya Perang Dunia I di Eropa, telah berangsur menjadi baik setelah perang di Eropa itu berakhir. Permintaan dalam jumlah besar akan hasil bumi dan tambang Indonesia, meningkat sekali, sehingga mendorong naiknya harga hasil perkebunan dan pertanian, serta pertambangan itu.

Kalimantan Barat, yang secara tradisional telah menjadi salah satu daerah penghasil kopra dan karet (sejak karet diperkenalkan menjadi salah satu komoditi yang laku di pasar dunia), ikut menikmati kenaikan harga itu. Membaiknya harga hasil perkebunan, terutama karet untuk daerah ini, telah menyebabkan banyak orang bergairah untuk menanam modalnya dan membuka kebun-kebun karet dan perkebunan lainnya. Baik petani biasa, pedagang yang menanamkan modalnya pada usaha perkebunan, maupun penguasa perkebunan, sama-sama berharap agar situasi harga yang membaik itu tidak akan berubah (merosot kembali). Akan tetapi ketergantungan kehidupan rakyat pada hasil perkebunan (khususnya karet) inilah yang merupakan salah satu faktor pokok penyebab labilnya kehidupan rakyat di daerah ini

Hampir seluruh daerah kerajaan Sambas, Mempawah, Landak, Tayan, Simpang, Matan, dipenuhi oleh kebun-kebun yang luas, baik milik raja-raja dan kaum kerabatnya, maupun milik penguasa dan rakyat jelata. Perkebunan-perkebunan milik Belanda, baru ada menjelang tahun 1925, dan terdapat di daerah pedalaman. Di masa harga karet cukup tinggi, mereka menikmati kehidupan yang lebih baik. Pembangunan rumah baru, pembelian emas dalam jumlah yang banyak, menjadi ciri-ciri pokok dari kemakmuran penduduk. Tetapi kemakmuran itu tidak merata. Para pemilik perkebunan biasanya orang-orang yang berada, pedagang, raja-raja dan kaum kerabatnya, dan orang-orang Cina. Merekalah yang menikmati porsi yang jauh lebih besar daripada apa yang dinikmati oleh rakyat kecil, yang bekerja sebagai buruh penyadap atau pemungut hasil karet.

Orang-orang Cina itu mengerjakan tanah-tanah milik bangsawan dan raja-raja, ataupun menyewa kebun milik para bangsa-

wan itu dengan sistem *pacht*. Mereka juga menampung hasil sadapan karet dari rakyat, dan dalam banyak hal mereka berlaku sebagai kreditor dan *supplier* bagi rakyat untuk barang keperluan hidup yang dibutuhkannya.

Perkebunan Belanda, seperti telah disebut di muka, dibuka pada pertengahan dasawarsa ketiga dari abad ke-20 ini, mengalami hambatan pada mulanya, karena kesulitan tenaga pekerja. Oleh karena itu mereka mendatangkan tenaga pekerja dari pulau Jawa, untuk bekerja di perkebunan-perkebunan itu. Hal seperti ini terdapat misalnya di daerah kerajaan Sintang. Perkebunan Belanda itu mengolah sendiri hasil sadapan karetnya. Cara pengolahan hasil karet yang lebih baik, menyebabkan mutu karet juga baik dan harga yang diperoleh tinggi. Kenyataan ini juga mengakibatkan terdorongnya perbaikan pada usaha-usaha pengolahan karet, termasuk pembangunan rumah-rumah pengasapan yang banyak bertebaran di daerah ini.

Usaha pertambangan, khususnya pertambangan emas dan intan baik di kerajaan Sambas maupun Landak, masih dilakukan juga, meskipun hasilnya tidak seberapa lagi bila dibandingkan dengan hasil di masa lampau. Konsesi atas daerah pertambangan ini pun pada umumnya berada di tangan orang Cina dan orang (atau pengusaha) Belanda, yang memperoleh kepercayaan dari raja-raja yang menguasai daerah pertambangan itu. Pemerintah kolonial menarik keuntungan yang besar dari usaha pertambangan ini, baik berupa pajak dan cukai yang dipungut dari perdagangan ini.

Peningkatan kegiatan perdagangan dan ekspor ditunjukkan pula oleh peningkatan masuknya kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan daerah ini. Disamping pelabuhan Pontianak, yang merupakan pelabuhan utama di daerah ini, terdapat dua pelabuhan yang mempunyai "daerah belakang" (*hinterland*) yang kaya. Pelabuhan yang dua itu adalah pelabuhan Singkawang dan Sambas, keduanya terletak dalam daerah kesultanan Sambas.

Melihat keuntungan yang bisa diperoleh dari hasil pendapatan dua pelabuhan yang dahulunya tidak penting di mata Belanda itu, maka pemerintah Belanda segera memperbaiki kedua pelabuhan itu, dengan memberikan fasilitas sehingga baik kapal-kapal KPM (kongsi pelayaran Belanda) maupun kapal-kapal dari kongsi pelayaran asing, dapat berlabuh. Hubungan dengan Singapura, daerah ekspor tradisional di ambang pintu Kalimantan

Barat, semakin meningkat. Sebaliknya, sejalan dengan meningkatnya ekspor, maka impor pun mengalami peningkatan.

Tetapi kemakmuran yang nampak sesudah tahun ke-19 - 20 - an itu rupanya sementara sifatnya. Menurut Pluvier 35), depresi ekonomi itu sudah menampakkan tanda-tandanya menjelang tahun 1926, pada sektor perdagangan hasil perkebunan dan hasil pertambangan. Akibat permintaan yang semakin meningkat akan hasil perkebunan seperti yang telah disebutkan di muka, maka orang bergairah untuk melakukan inventarisasi besar-besaran pada sektor perkebunan. Ini berarti pula diperlukannya barang modal dalam jumlah besar, yang kesemuanya harus di impor dalam jumlahnya yang besar pula. Kredit diminta dalam jumlah besar dari Bank-bank, dan impor pun meningkat. Dalam keadaan seperti itu, krisis ekonomi dunia pecah. Akibat yang menimpa tanah jajahan dari negara-negara itu.

Bagi Indonesia, menurut Pluvier, datangnya krisis ekonomi itu membawa bencana ganda bagi perekonomian tanah jajahan itu.

Pertama: hasil ekspor Indonesia yang sebagian besar berupa hasil perkebunan dan hasil ekstraktif lainnya, turun harganya secara drastis.

Kedua: harga barang yang diimpor dari luar negeri melonjak tinggi. Dan patut diketahui bahwa sebagian besar bahan modal dan hasil industri yang diperlukan Indonesia, berasal dari impor.

Sekali lagi terjadi, seperti halnya dengan keadaan semasa Perang Dunia I, rakyat kecil dan rakyat petani terpukul lagi. Kesulitan hidup yang timbul sebagai akibat krisis ekonomi kali ini, melanda mereka dengan hebat. Hasil perkebunan mereka tidak laku dijual, padahal mereka harus membeli bahan keperluan hidup sehari-hari yang meningkat harganya. Uang susah didapat, pengangguran sebagai akibat tindakan penghematan atau *bezuiniging* yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, makin meluas, sedang penghasilan pegawai pemerintah maupun pekerja dunia usaha juga berkurang akibat politik penghematan itu. Para pegawai yang diberhentikan di kota-kota banyak yang kembali ke desa atau kampungnya, mencoba mengadu nasib dengan mengolah tanah. Tetapi sekali lagi disini me-

35). Pluvier, J.M., *opcit*, hal. 29

reka terbentur dengan nasib buruk, hasil kebun atau tanah mereka tidak laku dijual. Semua organisasi yang ada dan bergerak di daerah ini mengalami kelumpuhan, banyak sekolah swasta yang diusahakan oleh masyarakat, mati dan banyak kegiatan sosial terhenti.

C. INTERAKSI DENGAN KEGIATAN PARTAI-PARTAI

Masa sesudah tahun 1930 merupakan masa yang suram, baik bagi kehidupan rakyat pada umumnya, maupun kehidupan berorganisasi. Kemiskinan yang merata dialami oleh rakyat kecil, baik yang menggantungkan diri dari mata pencaharian bercocok tanam atau berkebun, maupun yang menjadi pekerja upahan, menyebabkan mereka tidak tertarik kepada masalah lain, selain yang bersangkutan dengan kehidupannya.

Pengangguran yang disebabkan oleh pengurangan jumlah pegawai dan pekerja pemerintah maupun perusahaan; sulitnya mencari uang pada masa itu dan jatuhnya harga hasil bumi, menyebabkan penderitaan yang hebat. Dimana-mana orang berusaha mencari dan membuka lapangan kerja baru, akan tetapi usaha itu tidak banyak berhasil.

Pemerintah kolonial memang berusaha mencari jalan meringankan kehidupan rakyat, di antaranya dengan mengaktifkan pemberian kredit dengan bunga rendah untuk modal usaha, dan dengan membuka pegadaian di mana-mana (misalnya: pegadaian dibuka di Pontianak pada tahun 1931). Pemerintah berusaha mencegah usaha peminjaman uang gelap (riba) yang akan lebih mengancam lagi kehidupan rakyat yang sudah buruk itu.

Untuk memulihkan lagi semangat rakyat dalam usaha membuka kembali kebun-kebun mereka, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan jatah (*quota*) pembelian karet, terhadap hasil karet rakyat. Sesuai dengan peraturan itu pemerintah akan membeli karet rakyat dalam jumlah yang ditetapkan pada kartu jatahnya, dengan harga yang telah ditetapkan. Bila hasil karet itu melebihi *quota* yang telah ditetapkan, maka rakyat diperbolehkan menjualnya kepada para pedagang atau siapa saja yang akan membelinya.

Dunia pendidikan terpukul pula oleh malaise itu. Banyak sekolah swasta yang terpaksa tutup, sebagai akibat tidak mampu membiayai lagi, dan sangat berkurangnya murid. Sekolah pemerintah di desa atau kota kecil pun tidak luput terlenda ge-

jala ini. Sebagai gambaran dapat dikemukakan, bahwa menurut laporan Keuskupan Pontianak, sebagai akibat dari malaise itu, di wilayah kerjanya tinggal 6 buah sekolah yang masih bisa hidup.

Kelesuan dan kesulitan kehidupan di masa itu membawa akibat yang besar bagi sektor-sektor lain dalam hidup manusia. Baru setelah keadaan berubah di sekitar tahun 1935, nampak lagi kegairahan untuk menaruh minat dan perhatian pada sektor kehidupan lain, termasuk kegairahan untuk berorganisasi.

Berbicara mengenai organisasi dan kepertaian yang ada pada dasa warsa terakhir dari masa penjajahan Belanda di Indonesia, dapat disebutkan bahwa di daerah ini organisasi yang hidup dan bergerak adalah:

1. Partai Indonesia Raya (PARINDRA), dengan Organisasi pemudanya, "Surya Wirawan".
2. Persatuan Anak Borneo (PAB)
3. Muhammadiyah.

1. *Partai Indonesia Raya (PARINDRA).*

Seperti telah disebutkan dalam bagian terdahulu maka sebagai akibat tindakan represif dari pemerintah kolonial dalam peristiwa perlawanan rakyat tahun 1926, maka tidak ada lagi organisasi politik yang bisa hidup. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1936 di daerah ini,

Sebagai akibat berdirinya Partai Indonesia Raya pada tahun 1935 di Jawa, yang mengambil haluan "mau bekerja sama" dengan pemerintah kolonial, maka di Kalimantan Barat pun berdiri Partai tersebut, Komissariat Parindra daerah Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak, beranggotakan tokoh-tokoh sebagai berikut:

1. Raden Koempoel, Kepala Kantor Pos Pontianak,
2. Hadjarati, Guru HIS.
3. Mustamir, Ajun (*Ajunct Landbow consulent*)
4. A. Harahap, Kepala Pelabuhan Pontianak,

dibantu lagi oleh pemuka-pemuka masyarakat kota Pontianak, dari kalangan swasta, seperti Raden Wariban, Doelhadji, dan sebagainya.

Cabang pertama dari Parindra, berdiri di kota Pontianak. Pada tahun 1937 berdiri cabang Parindra di Ngabang, dengan to-

koh-tokohnya: Gusti Effendy Rani, Pangeran Natakusuma, Mohammad Amir, dan sebagainya. 36)

Pada tahun itu pula berdiri cabang di Sambas, yang merupakan cabang Parindra yang terbesar di Kalimantan Barat. Cabang ini mendapat dukungan dari keluarga sultan, dan pegawai pegawai pemerintah di Sambas boleh dikatakan kebanyakan merupakan anggotanya. 37)

Pimpinan cabang Parindra Sambas itu antara lain adalah Machrus Effendy, Mursid Idris, Uray Amir, Ir. Soetjitro, dan lain-lain. Sambas pernah menjadi tempat diselenggarakannya konferensi daerah Parindra.

Di Mempawah pimpinan Parindra berada di tangan Mas Mohammad, sedang pimpinan Parindra cabang Sintang berada di tangan Gusti Ismail. Di Sintang, seperti halnya di Ngabang dan Sambas, Parindra mendapat banyak pengikut. Pimpinan Parindra di Sintang juga banyak yang berasal dari kalangan bangsawan, seperti Gusti Taufik, Gusti Mustafa, sedang di kota-kota pelabuhan Singkawang dan Pemangkat, pemimpin-pemimpin Parindra adalah tokoh masyarakat terkemuka seperti Djenawi Thahir, Raden Jusuf, A. Muin dan Tarmidji.

Selama hayatnya, sampai saat datangnya tentara Jepang, Parindra Daerah Kalimantan Barat sampai tiga kali mengadakan konferensi daerah. Konferensi Daerah yang pertama, setahun setelah Parindra berdiri di daerah ini, diadakan di Pontianak. Konferensi daerah yang kedua diadakan di Singkawang, sedang konferensi daerah yang ketiga dilaksanakan di Sambas.

Sebagai *onderbouw* (bagian yang bernaung di bawah) Parindra, adalah organisasi-organisasi pemudanya, yang bernama "Surya Wirawan". Organisasi pemuda Parindra ini mirip dengan organisasi kepanduan. Anggotanya cukup banyak, dan cabangnya ada pada setiap tempat. Di antara pemimpin Surya wirawan terdapat Gusti Ahmad, Subiakto, Rasib Abdurrahman, dan sebagainya. "Salam tiga jari" merupakan salah organisasi Surya Wirawan.

2. *Persatuan Anak Borneo (PAB)*

Pemerintah Belanda mengetahui benar bahwa pengaruh

36). Penjelasan sdr. Tan Moh. Saleh dan M. Nasir Effendy

37). Ibid

Parindra sangat besar dalam masyarakat. Mereka tahu bahwa partai ini merupakan partai terbesar yang pernah berdiri di daerah ini. Oleh karena itu pemerintah kolonial berpikir untuk mengusahakan terbentuknya organisasi tandingan yang bercorak provincialisme. Kalau Parindra dapat menghimpun semua golongan dan suku yang tinggal di daerah ini dan karena ini pula corak nasionalismenya kentara sekali, maka pemerintah Belanda berharap bahwa organisasi yang dapat menghimpun penduduk asli daerah ini, akan cukup kuat dan besar. Pemerintah kolonial Belanda menghimbau dan membujuk Raden *Muslimun Nalaprana*, Demang Pontianak, seorang terpelajar lulusan OSVIA, untuk membentuk organisasi yang dikehendaki Belanda itu. Organisasi itu diberi nama "Persatuan Anak Borneo". Anggotanya cukup banyak, berkat bujukan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Belanda terhadap anak-anak daerah.

Tetapi kemudian Raden Muslimun tahu juga bahwa sebenarnya Belanda ingin menggunakan PAB untuk menandingi Parindra yang besar itu. Raden Muslimun bahkan menghimbau tokoh-tokoh *ex Digulist* yang sudah kembali, seperti Gusti Sulung Lelanang H. Rais dan lain-lain, untuk membantunya. Tujuan dari PAB adalah untuk membangkitkan rasa harga diri pada putra daerah, mendorong mereka untuk belajar, agar jangan ketinggalan dengan saudara-saudara sebangsanya yang ada di daerah lain. Dengan Parindra, Raden Muslimun mengusahakan hubungan baik. Karena itu tidak mengherankan, ketika Raden Muslimun dicalonkan Belanda untuk menjadi anggota *Volksraad* sebagai wakil Kalimantan (wakil seluruh Kalimantan hanya satu) dan Parindra mendukungnya. Usaha Belanda untuk melakukan *divide et impera* gagal.

Lambang PAB adalah gambar pulau Borneo, dengan di tengah-tengahnya terlukis gambar pohon karet dan kelapa. Seperti halnya dengan Parindra, PAB tidak aktif pada masa pendudukan Jepang. Raden Muslimun Nalaprana sempat menduduki jabatan sebagai anggota *Volksraad* selama dua tahun (1940-1942) sampai saat jatuhnya pemerintah Hindia Belanda.

3. Muhammadiyah

Seperti telah disebutkan di muka Muhammadiyah diperkenalkan di daerah ini pada tahun 1926, dan sejak itu terus berkembang, sekalipun lambat. Baru setelah masa depresi ber-

ubah menuju perbaikan, kira-kira tahun 1936, Muhammadiyah berkembang pesat.

Selain organisasi pemudanya, Muhammadiyah sempat juga mendirikan sekolah di Pontianak. Organisasi yang bercorak ke-Islam-an ini pun pada masa pendudukan Jepang terpaksa harus menghentikan kegiatannya, dan sekolahnya diambil alih oleh pemerintah.

Setelah matinya Sarekat Islam di daerah ini, tidak ada lagi organisasi Islam yang berorientasi pada politik. Banyak orang Islam atau tokoh-tokoh Islam yang ingin memperjuangkan politik, mengalihkan perhatiannya kepada partai-partai yang ada di daerah ini. Berdirinya PII (Partai Islam Indonesia) di Jawa, rupanya tidak nampak pengaruhnya di daerah ini.

Banyak tokoh Islam di daerah ini berpendapat bahwa Belanda memang mencurigai setiap gerakan Islam dan akan segera bertindak, apabila ada gejala akan timbulnya partai Islam di daerah ini. Karena itulah maka banyak di antara tokoh itu lalu aktif dalam Parindra dan PAB.

D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA - BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG

1. *Sikap Pemerintah Hindia Belanda*

Menurut Anderson 38) pemerintah kolonial Belanda di Indonesia itu bertopang di atas tiga sendi tehnik politis, ialah:

- a. Usaha untuk tetap menumbuh-suburkan perpecahan dan pertikaian antar suku, antar golongan maupun antar lapisan masyarakat.
- b. Usaha untuk tetap memelihara eksistensi penguasa tradisional, yang secara berangsur diubah kedudukannya sehingga hanya menjadi aparat pemerintahan yang menerima gaji, berkedudukan di bawah penguasa orang kulit putih, tetapi secara efektif bisa berfungsi sebagai jembatan untuk meneruskan (dan memaksakan) keinginan penguasa Belanda kepada rakyat jelata.

38). B.R.O. G. Anderson, cs. *South East in World War II, Four Essays* (Yale Univ. New York, USA), p. 17.

- c. Usaha pemupukan secara sadar terhadap mitos tentang keunggulan rasial dan superioritas intelektual dari bangsa kulit putih.

Dengan bertopang pada tiga sendi seperti tersebut diatas, maka kekuasaan Belanda dapat tertanam kokoh dan dengan demikian sifat penjajahan mereka dapat berlangsung 3½ abad lamanya.

Walaupun daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, secara riil relatif belum lama berada di bawah penjajahan Belanda, namun praktek politik seperti yang telah disebutkan di atas, dapat dibuktikan kenyataannya. Kalimantan Barat boleh dikatakan mempunyai penduduk yang *multi etnis* sifatnya: suku-suku Dayak yang berbelas jumlahnya dengan perbedaan yang nyata dalam cara hidup, bahasa dan adat istiadat; kelompok penduduk keturunan Cina yang sejak berabad telah bermukim di daerah ini namun tetap memelihara dan mempertahankan kultur leluhurnya dengan kuat; di samping kelompok-kelompok suku Melayu dan kaum perantau yang datang dari berbagai bagian Nusantara ini.

Sifat multi rasial dan multi kultur dari masyarakat daerah ini, sedikit banyaknya membantu dan memudahkan Belanda untuk menarik keuntungan politis, dengan tetap dan menghidupkan api pertentangan dan rivalitas di antara mereka.

Pemerintah kolonial juga tetap mengusahakan adanya jarak (*gap*) antara kaum elite pribumi (bangsawan dan kaum kerabat raja) dengan rakyat kecil. Kaum elite ini tetap mendapatkan kedudukan yang baik, hak-hak istimewa (*privilege*) yang tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang, misalnya pendidikan di sekolah khusus yang dibuka dan disediakan pemerintah Belanda untuk mereka, jabatan dalam struktur pemerintahan yang baru (bagi bangsawan dan kerabat raja yang oleh Belanda dipandang dapat diandalkan kesetiiaannya, atau bagi anggota masyarakat yang berpendidikan baik), dan berbagai perlakuan lain yang khusus. Termasuk dalam hal ini adalah "persamaan hak" (*gelijkstelling*) dari golongan elite masyarakat yang menghendaknya, sehingga kedudukan mereka sama dengan kedudukan orang Eropa (= Belanda) dalam segi hukum. Dengan demikian, golongan elite ini terpisah dengan rakyat kecil (masyarakat luas). Dalam masyarakat daerah ini terdapat jarak atau jurang yang cu-

kup dalam antara golongan rakyat kecil dengan golongan elite-nya.

Terhadap daerah-daerah swapraja, yang diakui berdirinya sejumlah tiga belas buah, pemerintah Belanda melakukan pengawasan ketat lewat pejabat-pejabatnya yang ditempatkan untuk "menasehati" raja atau sultan-sultan itu. Terhadap beberapa swapraja, terutama terhadap kerajaan Landak dan Sambas, Belanda senantiasa bersikap waspada, mengingat bahwa bangsawan dan kerabat raja dalam kerajaan-kerajaan itu banyak berpikiran maju dan cenderung bersimpati kepada pergerakan kebangsaan.

Pergolakan tahun 1922, 1925 dan 1926 banyak terjadi di daerah-daerah itu. Banyak perkumpulan pergerakan kebangsaan lahir dan berkembang pesat dalam daerah-daerah kerajaan tersebut. Sarekat Islam tumbuh dan berkembang pesat dalam daerah kerajaan Landak, Mempawah dan Sambas; Parindra di tahun-tahun menjelang pecahnya Perang Dunia II mendapat banyak pengikut, bahkan juga PAB (Persatuan Anak Borneo), sebuah gerakan rakyat lokal, mempunyai banyak pendukung.

Jumlah orang Belanda yang berada di daerah ini, salah satu daerah *buitengewesten* memang tidak banyak. Mereka terdiri dari pegawai pemerintah, dokter, anggota militer, guru maupun rohaniwan dari gereja Katolik. Para pegawai dan orang-orang Belanda ini praktis terpisah dari golongan masyarakat lain, dalam kehidupannya sehari-hari.

Banyaknya usahawan Jepang yang membuka toko di daerah ini, khususnya di kota-kota sepanjang pantai seperti Pontianak, Singkawang, Pemangkat, dan juga daerah-daerah yang terjangkau hubungan darat, seperti Bengkayang dan Sambas, sempat mengecewakan pemerintah Belanda. Menurut penuturan, di daerah ini disebut-sebut sejumlah lebih dari 40 buah toko Jepang yang buka dan mengembangkan usahanya beberapa tahun saja menjelang pecahnya Perang Dunia II. Setelah Belanda takluk dan Jepang berkuasa di daerah ini ternyata bahwa kebanyakan pengusaha toko Jepang itu adalah perwira tentara Jepang yang datang di daerah ini kembali dan bertugas dalam pemerintahan militer Jepang (*Minseibu*).

Sadar akan arti pentingnya daerah ini jika dipandang dari segi letak maupun dari banyaknya kerajaan/Swapraja dan terutama juga banyaknya orang Cina, yang orientasi hidupnya tetap mengarah pada tanah leluhurnya, dan status mereka sebagai

Hoakiao, maka pemerintah Belanda sesuai dengan *Bestuurher-
vormingswet* tahun 1936 dan yang kemudian disusul dengan
Keputusan (*Besluit*) Gubernur Jenderal menetapkan lebih jauh
Ordonansi yang mengatur pembentukan gubernemen Sumatra,
Borneo, dan Timur Besar (*Groote Oost*). Dibentuklah dua keresi-
denan dalam Gubernemen Borneo itu. Salah satu dari karesiden-
an yang dibentuk berdasar Ordonansi yang berlaku mulai 1 Juli
1938 adalah *Residentie Westerafdeeling Borneo* (karesidenan
Borneo Barat) dengan ibu kota Pontianak. 39)

Residensi Borneo Barat ini dibagi menjadi empat *afdeeling*
ialah:

- a. *Afdeeling Pontianak*, dengan ibukota Pontianak, *Af-
deeling* ini dibagi lagi atas tiga *onderafdeeling*, ialah:
onderafdeeling Pontianak (dengan ibu kota Pontianak),
onderafdeeling Mempawah (dengan ibukota Mempa-
wah) dan *onderafdeeling* Landak (dengan ibukota Nga-
bang).
- b. *Afdeeling Singkawang*, dengan ibukota Singkawang.
Afdeeling ini terbagi pula atas tiga *onderafdeeling*,
ialah: *onderafdeeling* Singkawang (dengan ibukota
Singkawang), *onderafdeeling* Sambas (dengan ibuko-
ta Sambas), dan *onderafdeeling* Bengkayang (dengan
ibukota Bengkayang).
- c. *Afdeeling Sintang*, (dengan ibukota Sintang). *Afdee-
ling* ini juga terbagi menjadi tiga *onderafdeeling*, ia-
lah: *onderafdeeling* Sintang (dengan ibukota Sintang),
onderafdeeling Melawi (dengan ibukota Nanga Pinoh)
dan *onderafdeeling* Boven Kapuas (Kapuas Hulu) (de-
ngan ibukota Putussibau).
- d. *Afdeeling Ketapang* dengan ibukota Ketapang, juga
terdiri dari tiga *onderafdeeling*, ialah: *onderafdeeling*
Matan Hilir (dengan ibukota Ketapang), *onderafdee-
ling* Matan Hulu (dengan ibukota Nanga Tayap) dan
onderafdeeling Sukadana (dengan ibukota Sukadana).

Setiap *onderafdeeling* kemudian dibagi lagi atas sejumlah
district (distrik) yang dikepalai oleh seorang pejabat yang berge-

30)., Sejarah Singkat Perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Ka-
limantan Barat (1957 - 1976), (Pontianak, 1976), hal. 1.

gelar Demang. Seperti dikatakan di muka, seorang Demang adalah pejabat pemerintah, yang dengan sendirinya menerima perintah dari Kepala Onderafdeeling (*ialah Assistent Resident*), walaupun secara nominal ia tunduk juga kepada penembahan atau sultan (kepala swapraja). Tetapi sifat tunduk ini bersifat upacara saja.

2. *Keadaan masyarakat*

Keadaan masyarakat daerah ini menjelang Perang Dunia ke-II sebenarnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan keadaan pada masa-masa sebelumnya. Benar apabila dikatakan bahwa setelah tahun 1930-an telah tampak berbagai kemajuan dan perubahan, baik di lapangan pendidikan, perekonomian, kerohanian/penyebaran agama maupun juga di lapangan politik, namun perubahan dan kemajuan ini terutama hanya bisa dilihat dan dinikmati oleh penghuni kota-kota maupun masyarakat yang hidup dalam jangkauan jaringan perhubungan komunikasi sehingga merasakan perubahan. Malaise di tahun 30-an, sekali lagi telah menjatuhkan harga karet dan menyebabkan kemiskinan. Perintah Belanda dengan menggunakan lembaga yang bernama *Rubberfonds* atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama NIRUB berusaha keras untuk menolong keadaan rakyat ini. Sistem *quota* lebih dikenal dengan nama "sistem kupon" dijalankan untuk mencegah jatuhnya harga karet. Di lain segi, kehidupan rakyat kecil dimasa Malaise yang sulit ini agak tergolong dengan adanya barang-barang Jepang yang murah harganya, karena dijual dengan harga yang disebut "harga dumping".

Kedudukan golongan Cina tidak banyak terpengaruh oleh malaise. Di desa-desa mereka adalah petani yang ulet, sedang di kota-kota mereka adalah pedagang-pedagang yang tangguh. Banyaknya orang Cina yang bermukim di Pontianak dan Singkawang, mendorong pemerintah Belanda untuk mengatur mereka, agar mudah mengawasinya.

Di Pontianak, kepala dari kelompok penduduk Cina, diangkat oleh pemerintah, dengan pangkat *majoor der Chineezzen* (mayor orang Cina). Ia membawahi "kaptan Cina" (*kapitein der Chineezzen*) dan "letnan Cina" (*luitenant der Chineezzen*). Di Singkawang, pangkat tertinggi dari kepala penduduk Cina adalah *luitenant der Chineezzen*. di Kampung-kampung di mana bermukim banyak orang Cina, terdapat kepala kam-

pung (*wijkmeester*) yang bertanggungjawab akan keadaan mereka.

Sebagian dari masyarakat Cina di kota-kota ini diusahakan agar dapat menerima kebudayaan Barat. Bagi mereka, terutama bagi anak mereka, dibuka sekolah-sekolah khusus, dengan sistem pendidikan Barat (HCS = *Hollandsch Chineesche School*) di Pontianak, HCS ini telah dibuka oleh para Bruder dari Orde Kapusin pada tahun 1924, ⁴⁰⁾ dan berkembang setelah tahun itu. Sesuai dengan perkembangannya, beberapa tahun menjelang menyerahnya Belanda kepada Jepang, di Pontianak dibuka pula sebuah "Sekolah Dagang" (*Handelsschool*), yang diurus oleh para Bruder pula.

Orang-orang Cina juga merupakan kelompok-kelompok penduduk yang pertama-tama menerima dan memasuki agama Kristen. Perkembangan gereja Katolik sendiri cukup pesat. Dari beberapa stasi yang berdiri di awal abad ke-20 ini, pada tahun 1938 telah bisa dibentuk Vikariat Apostolik Pontianak pada 21 Mei 1938. ⁴¹⁾ Umatnya sebagian besar masih terdiri dari penduduk Cina yang telah berpendidikan Barat, dan suku-suku Daya, yang dengan giatnya telah diagamakan oleh penyebar-penyebar agama Katolik (misi Katholik). Mereka juga sangat giat mendirikan sekolah-sekolah dan prasarana kesehatan seperti poliklinik, dan sebagainya. Sekolah Menengah Pertama (MULO) merupakan satu-satunya sekolah lanjutan yang ada di daerah ini, yang juga didirikan oleh misi Katolik menjelang pecahnya Perang Dunia II. Sekolah-sekolah Guru (*Normaal school* dan *Kweek-school*) tidak ada di daerah ini. Mereka yang berminat untuk menjadi guru yang berwenang penuh untuk mengajar di Sekolah Rakyat Sempurna, harus pergi belajar ke Jawa (Solo dan Jogja) atau ke Sumatra (Bukittinggi). Namun banyak juga yang pergi belajar ke perguruan-perguruan kebangsaan yang telah dikenal orang di daerah ini, seperti Taman Siswa di Yogyakarta, atau INS di Kayutanam (Sumatra Barat). ⁴²⁾

Di Kalimantan Barat hanya terdapat tiga buah CVO (*Cursus tot Opleiding Voor Vokschoolarwijzers* yang menyiapkan guru-guru untuk Sekolah Desa (*Voksschool*). Walaupun *Volkschool* dibuka hingga ke desa-desa yang penting pada tingkat

40) ———, Archdiocese of Pontianak, *opcit*, hal. 26.

41) ———, Archdiocese of Pontianak, *opcit*, hal. 20.

42) Catatan saudara Tan Mohd. Saleh, *opcit*.

onderdistrict, namun sebagian besar rakyat tetap tidak dapat menikmati pendidikan.

Selain dari kemampuan ekonomis mereka yang masih rendah, juga sikap yang tidak menyukai pendidikan Barat dan lebih suka belajar pada madrasah, yang ditunjukkan oleh penduduk di daerah-daerah di mana agama Islam merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan masyarakat; menyebabkan sekolah-sekolah desa itu sedikit sekali muridnya.

Daerah Kalimantan Barat sejak awal abad ke-20 telah menjadi daerah yang subur bagi misi keagamaan Kristen. Sejak awal abad ini ordo Kapusin dari Gereja Katolik telah melakukan kegiatan penyebaran agama, terutama di daerah permukiman suku Dayak.

Pada tahun 1930 jumlah suku Dayak meliputi 45,8% dari seluruh penduduk daerah ini, dan penduduk golongan Cina meliputi 13,5%.⁴³⁾ Kedua golongan etnis inilah yang menjadi sasaran utama dari misi Katolik. Pusatnya mula-mula di Singkawang, tetapi pada tahun 1909 Prefek Apostoliknya, Ngr. Pasificus Bos, memindahkan kedudukannya ke kota Pontianak, sejalan dengan dibangunnya sebuah gereja kecil di sana. Sejak itu Pontianak yang menjadi pusat kegiatan misi. Dari kota ini diatur pelaksanaan kegiatan penyebaran agama, pendidikan dan sebagainya.⁴⁴⁾

Kegiatan gereja Kristen Protestan baru nampak sesudah tahun 30-an, tepatnya setelah masa malaise. Mula-mula didirikan gereja di Singkawang dan kemudian di Pontianak. Gereja Protestan yang mula-mula, berasal dari mazhab *Gereformeerd*, yang pusatnya ada di Negeri Belanda dan yang sudah lama berkembang di Jawa. Jemaatnya banyak terdiri dari para pegawai pemerintah yang berasal dari daerah lain yang ditempatkan di sini, serta anggota militer Belanda dari suku Ambon dan Menado.

Perkembangan agama Islam boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan masa sebelumnya. Muhammadiyah, yang berkembang di daerah ini sesudah tahun 1926, mengalami perkembangan pesat di daerah-daerah pantai. Namun pemikiran dan cita-cita Muhammadiyah dipandang kurang cocok dengan alam pikiran kebanyakan ummat Islam di pedalaman,

43) Data dari Kantor Sensus dan Statistik Kalimantan Barat, 1971.

44) ———, Archdiocese of Pontianak, *opcit*, hal. 19.

yang lebih suka berpaling pada fatwa-fatwa ulama-ulama mereka daripada menerima sesuatu yang baru, yang mereka curigai sebagai telah dimasuki oleh fikiran dan gagasan Barat.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah dari angkatan pertama di daerah ini antara lain: Muhammad Akib, Jayali Saman, Muhammad Arsyad, dan lain-lainnya.⁴⁵⁾ Muhammad Arsyad ini adalah pemimpin percetakan "An Nazaar" di Pontianak, dan karenanya ia merupakan pendukung utama dalam hal keuangan bagi organisasinya. Di Pontianak itu pula, Muhammadiyah mendirikan sebuah sekolah dasar, semacam *Volksschool* yang disempurnakan sesuai dengan garis pikiran dan cita-cita Muhammadiyah. Sekolah ini didirikan di Gang Mariana, Pontianak.

Mengingat bahwa penduduk daerah ini, berdiam di daerah-daerah pantai, khususnya di Afdeeling Pontianak dan afdeeling Singkawang, meliputi swapraja-swapraja Pontianak, Mempawah, Landak dan Sambas, maka sejalan dengan dibukanya Pengadilan Negeri di afdeeling-afdeeling itu setelah tahun 1938, Belanda membuka pula pengadilan agama Islam (Mahkamah Syariah), untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan agama dan adat kebiasaan Islam.

Kehidupan penduduk golongan Cina tidak banyak mengalami perubahan. Walaupun dalam tahun 1937 pecah Perang-Cina, dan walaupun kebanyakan orang Cina di daerah ini bersimpati kepada pemerintahan Kuo Min Tang di Cina, namun mereka tetap bersikap biasa. Kehidupan ekonomi merupakan titik perhatian mereka yang terutama. Mereka memperhatikan keadaan di tanah leluhur mereka melalui koran-koran berbahasa Cina yang masuk ke daerah ini, baik yang berasal dari Batavia, maupun yang dimasukkan dari Singapura.

Seperti diketahui, hubungan perdagangan dengan Singapura cukup ramai, lebih-lebih setelah kapal KPM secara tetap melayari lintas Pontianak-Singapura.

3. Sikap masyarakat terhadap pemerintah

Dilihat dari keadaan sosial, masyarakat Kalimantan Barat pada masa menjelang pecahnya Perang Dunia II dapat dibagi atau digolongkan atas tiga golongan, ialah:

45) Penuturan sdr. Muh. Yamin, seorang anggota Muhammadiyah angkatan tua, kini berdomisili di Pontianak.

- a. golongan atau lapisan atas masyarakat, yang terdiri dari kaum terpelajar dan pegawai-pegawai pemerintah, serta kaum kerabat penguasa-penguasa swapraja.
- b. golongan rakyat kebanyakan atau rakyat jelata, yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat daerah ini. Mereka adalah golongan yang rendah tingkat pendidikannya menurut ukuran Barat. Mereka adalah petani, pedagang kecil, nelayan, penduduk pedesaan dan pegawai rendahan pada kantor-kantor gubernemen yang terbesar di mana-mana.
- c. golongan penduduk Cina, yang dapat dikatakan besar jumlahnya. Mereka ini dimasukkan sebagai golongan tersendiri, sebagai akibat sifat dan cara hidup mereka di daerah ini, peranan mereka dalam kegiatan perekonomian di daerah ini.

Dari kalangan atas masyarakat itu tampillah orang-orang yang ikut serta berkecimpung dan bergerak dalam pergerakan kebangsaan di daerah ini. Pemimpin-pemimpin Pergerakan Nasional dari Partai Indonesia Raya (PARINDRA), berasal dari golongan ini, demikian pula sebagian dari anggota-anggotanya.

Hal yang serupa berlaku pula pada PAB (Persatuan Anak Borneo), suatu organisasi yang sebenarnya dibentuk atas "saran" pemerintah Belanda di daerah ini, untuk menyaingi dan menahan lajunya perkembangan Perindra.

Organisasi-organisasi non politik yang bergerak di daerah ini pun mempunyai keadaan serupa. Kaum terpelajar (termasuk di dalamnya kaum bangsawan dan kerabat raja-raja yang telah menerima pendidikan Barat) itulah yang menggerakkan perubahan dan usaha perbaikan kehidupan rakyat; mereka pula yang menjadi teladan bagi rakyat banyak. Mereka pada umumnya bersikap loyal pada pemerintah, dalam hal ini menunjukkan sikap kooperatif terhadap pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan karena banyak dari mereka yang bekerja pada pemerintah dan mempunyai kedudukan, dan sebagaimana lazimnya pada zaman itu, mereka ingin mempertahankan kenikmatan dan penghasilan tetap yang diperolehnya, apalagi mengingat masa setelah tahun 1930 adalah masa yang sulit karena malaise.

Sebagian lagi dari mereka, walaupun bukan pegawai pada jawatan atau dinas gubernemen, tetapi karena kedudukan mereka yang baik, mereka tidak berhasrat untuk menentang pemerintah. Pengalaman pahit yang dipelajari dari gerakan-gerakan perlawanan

yang berkobar di sekitar tahun 1925 dan 1926, dengan keras ditindas oleh pemerintah kolonial, dan banyak pemimpin gerakan itu yang dibuang ke Boven Digul, rupanya menjadi sebab mengapa gerakan kepartaian di daerah ini tidak banyak mau bertindak menentang pemerintah.

Golongan penduduk Cina jelas tidak menunjukkan sikap antipati terhadap pemerintah kolonial, karena mereka punya kepentingan untuk mempertahankan peranannya dalam bidang perekonomian di daerah ini. Selama pemerintah tidak mengusik atau mengganggu kedudukan mereka, mereka tidak akan bersikap melawan pemerintah.

Demikian pula para pemuka dan kaum terpelajar mereka menunjukkan sikap setia kepada pemerintah, lebih-lebih di masa setelah pecahnya Perang Jepang-Cina (1937), dan makin besarnya bayangan ancaman Perang Dunia II di Pasifik.

4. *Keadaan pemerintah Hindia Belanda pada saat terakhir*

Berita jatuhnya Negeri Belanda ke tangan Jerman pada tanggal 10 Mei 1940, diterima dengan rasa cemas oleh kalangan, masyarakat atas kaum nasionalis dan terutama oleh orang Belanda sendiri. Banyak orang mulai sangsi, apakah peperangan yang sedang berkecamuk di Eropa itu nantinya tidak akan merembet ke bagian dunia yang lain. Hal ini dihubungkan pula dengan kenyataan bahwa Jepang telah menandatangani pakta persekutuan (AS) dengan Jerman dan Italia. Dan jika peperangan itu nanti terjadi di kawasan Asia, timbul pertanyaan orang, apakah pemerintah Hindia Belanda sanggup dan mampu bertahan terhadap serangan atau invasi dari negara-negara anggota persekutuan As itu?

Rasa cemas akan ancaman meringkuk di bawah penjajahan kaum Nazi dan fasis, dan rasa solidaritas terhadap nasib rakyat Nederland, telah menyebabkan timbulnya dukungan yang berupa aksi solidaritas, revolusi yang bernada simpati dan pernyataan kesetiaan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sungguhpun golongan terpelajar dan kaum nasionalis yang berada di belakang aksi solidaritas itu mengetahui benar bahwa sikap pemerintah terhadap tuntutan perubahan dan kemajuan dari masyarakat adalah negatif, namun mereka berharap bahwa dengan menunjukkan rasa simpati dan rasa solidier terhadap nasib rakyat Negeri Belanda, akan membuka mata pemerintah atas kenyataan yang ada dan

akan mendorong pemerintah untuk berfikir lebih luas, dengan demikian Pemerintah Belanda akan lebih mengerti hasrat masyarakat.

Harapan mereka itu menjadi buyar, ketika menteri-menteri pemerintah Kerajaan Belanda dalam pengasingan, ialah Welter dan Van Kleffens pada bulan Maret tahun 1941 tiba di Indonesia dan menyatakan bahwa perubahan yang mendasar dalam pemerintahan dan kehidupan politik di Hindia Belanda, baru bisa dipertimbangkan setelah selesainya perang.⁴⁶⁾ Kekecewaan bagi masyarakat terhadap kenyataan itu tetap meninggalkan kesan, sampai kedatangan tentara Jepang.

Hal ini ditunjukkan dengan sikap acuh tak acuh dalam masalah pertahanan dan pembelaan negeri, menghadapi kedatangan tentara Jepang, setelah pecahnya Perang Pasifik. Di daerah ini, kewaspadaan Belanda ditingkatkan, setelah bayangan pecahnya perang di kawasan Pasifik makin nyata. Di daerah ini hanya terdapat satu batalyon pasukan KNIL dengan persenjataan yang lengkap, dan garnisun utamanya berada di Pontianak.⁴⁷⁾ Beberapa detasemen pasukan KNIL ditempatkan di kota-kota yang dipandang strategis seperti Singkawang dan Sambas, demikian pula untuk menjaga lapangan terbang di Sanggau Ledo, yang berfungsi sebagai "basis perbekalan" (supply base) bagi pesawat-pesawat Sekutu yang akan bertugas di daerah ini dan Serawak.

Lapangan Sanggau Ledo ini memang bukan merupakan lapangan terbang militer yang lengkap, tetapi letaknya tepat berada di tengah jalan antara kota-kota di pantai Barat Serawak, dengan Pontianak. Pada saat didudukinya kota-kota seperti Miri, oleh Jepang, maka pesawat-pesawat Sekutu yang menyerang pasukan Jepang itu dalam perjalanan pulang, singgah di Sanggau Ledo untuk mengisi bahan bakar dan amunisi.

Mengingat kenyataan bahwa pasukan KNIL di daerah ini hanya kecil jumlahnya, demikian pula kepolisian Belanda, maka pemerintah mengusahakan dibentuknya pasukan pertahanan rakyat (*landwacht*). Anggota-anggota *Landwacht* terdapat di kota-kota penting, khususnya di kota-kota pantai. *Landwacht* ini dipimpin oleh opsir (perwira) KNIL atau oleh anggota *Veldpolitie* (kepolisian). Di Singkawang dan Pontianak, di mana

46) Koch, DMG. *opcit*, hal. 135.

47) Penuturan sdr. *Jatman*, Purnawirawan pegawai PU dan ex anggota KNIL di masa penjajahan Belanda, di Pontianak.

banyak orang Cina tinggal, didirikan *Landwacht* yang anggotanya terdiri dari orang-orang Cina.

Kegiatan organisasi, yang berupa pertemuan, rapat dan sebagainya, masih diperbolehkan, sekali pun dibatasi dan mulai mendapat pengawasan keras dari PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*).

Pengawasan secara keras pula terhadap lalu lintas penduduk, penduduk yang datang maupun yang pergi didaftar. Persediaan bahan makanan dan bahan kebutuhan hidup yang vital mulai diawasi, oleh karena kebanyakan bahan kehidupan itu didatangkan dari lain daerah.

Sebagaimana di daerah lain, pers pun mendapat pengawasan keras. Surat-surat kabar, baik yang terbit di Pontianak sendiri maupun yang masuk dari daerah lain (terutama dari Batavia) semuanya mendapat pemeriksaan, baik dalam pemberitaan maupun gambar-bambarnya. Harian berhuruf dan berbahasa Cina mendapat banyak perhatian dan pembaca di daerah yang banyak penduduknya orang Cina. Demikian pula harian yang dimiliki dan diasuh oleh penerbit orang Cina, seperti *Keng Po*.

Sedang majalah yang banyak dibaca di daerah ini adalah majalah "Sri Pustaka" mempunyai banyak penggemar pula di kalangan penduduk yang beragama Islam, sungguh pun masih kalah populer dengan "Sri Pustaka". Di kota-kota pantai yang banyak penduduknya merupakan golongan terpelajar Islam, beredar pula majalah "Panji Islam". Semua majalah tersebut berisi masalah keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan tidak menyinggung masalah politik.

E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

I. *Propaganda Jepang yang terasa di daerah ini*

Keadaan ekonomi di daerah ini pada tahun-tahun sebelum pecahnya Perang Dunia II di kawasan Pasifik, memang tidak menggembirakan. Daerah ini adalah daerah agraris, dengan penghasilan pokok dari rakyat, adalah menyadap getah karet. Getah mentah ini kemudian dijual pada pedagang dan tengkulak (kebanyakan orang Cina) yang kemudian memprosesnya untuk bisa siap diekspor. Kehidupan para penyadap karet amat tergantung pada tengkulak dan pedagang penampung ini.

Akibat malaise di tahun 30-an, maka harga karet sangat

merosot. Tidak lakunya karet untuk dijual pada masa sulit uang itu, menyebabkan kemiskinan melanda sebagian besar rakyat pedesaan. Hal yang serupa dengan keadaan petani karet, melanda pula para petani kelapa di daerah-daerah pantai. Meskipun pemerintah Belanda berusaha meningkatkan harga karet dengan menjalankan sistem *quota* yang diatur dengan kupon, namun keadaan penduduk masih belum banyak tertolong. Di samping menjalankan sistem *quota*, pemerintah Belanda membentuk *Rubberfonds* (Dana Karet) yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perkebunan karet rakyat, meningkatkan mutu produksinya dan menstabilisasi harga karet. Tetapi betapa pun juga kehidupan rakyat dalam masa menjelang pecahnya perang, memang menyedihkan. Keadaan ekonomi yang suram karena tidak lakunya hasil perkebunan rakyat, sulitnya memperoleh uang; telah mendorong orang untuk hidup berhemat dan mencari barang keperluan hidup yang murah harganya.

Dalam hubungan ini maka barang buatan Jepang yang banyak masuk dan dijual atau dijajakan orang, banyak memperoleh pasaran di kalangan rakyat kecil. Toko-toko Jepang pun bermunculan dalam periode lima atau enam tahun menjelang pecahnya Perang Dunia II. Barang buatan Jepang itu selain harganya sangat murah di mata rakyat banyak, mutunya juga tidak banyak berbeda dengan barang buatan Eropa yang mahal harganya. Dari tahun ke tahun permintaan akan barang Jepang makin meningkat saja. Vlekke⁴⁸⁾ antara lain menyebutkan bahwa impor Indonesia (= Hindia Belanda) dari Jepang di tahun 1934 saja berkisar 14% dari seluruh impornya, sedangkan ekspornya ke Jepang hanya berjumlah 5% dari seluruh ekspornya.

Sekali pun membanjirnya barang Jepang hingga ke pelosok pedesaan itu menggembirakan hati rakyat yang berpenghasilan rendah dan mengalami kesulitan hidup sebagai akibat malaise, namun pemerintah Belanda memandangnya dengan rasa cemas. Hal ini disebabkan karena pemerintah Belanda merasa curiga melihat kenyataan bahwa justru karena murahness barang buatan Jepang itu, secara tidak sengaja dan tidak langsung, rakyat bersimpati kepada Jepang. Di samping itu pasaran barang buatan Eropa sangat terdesak. Harga-harga barang yang sangat murah itu seakan akan menjadi bahan propaganda Jepang yang ampuh bagi rakyat banyak.

48) Vlekke, BHM. *Nusantara* ('s Gravenhage, 1959) hal. 388.

Cara propaganda yang lain memang tidak ada. Propaganda melalui media surat kabar tidak akan mempunyai pengaruh apa pun di daerah ini, mengingat kenyataan bahwa surat kabar masih terbatas daerah peredarannya dan hanya dibaca oleh kalangan tertentu.

Walaupun koran-koran Cina terbitan Batavia mempunyai jumlah pembaca yang banyak di kalangan penduduk Cina di kota, namun haluan koran-koran Cina itu lebih cenderung untuk mendukung pemerintahan *Kuo Min Tang* yang menjadi musuh Jepang. Dengan demikian maka rasa simpati orang banyak kepada Jepang bukan timbul sebagai akibat kegiatan propaganda yang dilancarkan oleh dan melalui surat kabar ataupun organisasi atau partai yang bergerak di daerah ini, akan tetapi bersumber kepada rasa senang rakyat kecil yang merasa tertolong hidupnya sebagai akibat adanya barang buatan Jepang yang murah, dan terjangkau daya beli mereka yang amat lemah, pada masa yang sulit itu.

Tambahan lagi rasa tidak senang yang sudah cukup lama berkembang di kalangan rakyat terhadap pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, dan dirasakan berat, nampaknya mendorong kedudukan Jepang di mata rakyat, sebagai penolong atau penyelamat yang bisa diharapkan. Hal ini akan terlihat nanti pada waktu tentara Jepang tiba di Kalimantan Barat.

2. *Kedatangan Tentara Jepang*

Pada tanggal 8 Desember 1942, pecahlah Perang Pasifik, yang lebih dikenal dengan nama "Perang Asia Timur Raya", setelah Jepang secara tiba-tiba menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour, Kepulauan Hawaii. Bersamaan dengan itu secara serentak Jepang melakukan pemboman atas Singapura, Pulau Wake, Pulau Midway, Pulau Guam, Manila, Hongkong, dan Pulau Nauru. Bertepatan dengan serangan Jepang yang membuka Perang Dunia II di kawasan Pasifik itu, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Tjarda van Starckenborgh Stachower berkata bahwa Pemerintah Hindia-Belanda menerima tantangan itu dan mengangkat senjata terhadap Jepang.⁴⁹⁾ Dengan cepat Jepang menyerbu daerah-daerah di selatan, ialah kawasan Asia Tenggara, yang merupakan daerah yang kaya dengan bahan mentah, teruta-

40). R. Djajoeman, "Sejarah Perang Jepang melawan Hindia-Belanda", dalam *Majalah Sejarah Militer Angkatan Darat*, SA 7 (1960) halaman 33.

ma minyak yang amat diperlukannya itu.

Sasaran utama di wilayah Hindia-Belanda, adalah sumber minyak bumi. Tarakan, di bagian timur Pulau Kalimantan, merupakan kota pertama yang menjadi sasaran serangan Jepang. Demikian pula halnya dengan Miri, sebuah kota di pantai Serawak, yang sekitarnya terdapat ladang minyak bumi.

Pada tanggal 10 Januari 1942, dengan mempergunakan armada yang kuat (enam kapal penjelajah, dua puluh dua kapal transport, kapal suplai, dan penyapu ranjau), pasukan Jepang mendarat di Tarakan. Pertahanan Belanda di sana begitu lemahnya, sehingga hanya beberapa hari mereka dapat bertahan terhadap gempuran tentara Jepang.

Setelah melakukan bumi hangus secara besar-besaran atas instalasi minyak di sana, pasukan Belanda pun menyerah kepada Jepang. Serangan udara yang dilakukan oleh pesawat Jepang terhadap sejumlah kota di Indonesia bagian barat, telah dilakukan jauh sebelum Tarakan jatuh.

Pada tanggal 8 Desember 1941, dua belas hari setelah pecahnya perang antara Jepang dengan Hindia-Belanda, pesawat-pesawat Jepang mulai menyerang dan membom Pontianak dan lapangan terbang Sanggau Ledo (dua ratus kilometer di sebelah utara Pontianak). Menurut para pengamat, serangan pesawat-pesawat Jepang itu dilakukan dalam beberapa gelombang dengan tujuan menyerang bangunan militer di pusat kota Pontianak; dan bom pembakar yang dijatuhkan itu telah menimbulkan kebakaran pada rumah-rumah di sekitar kompleks bangunan militer itu serta korban, di samping menimbulkan rasa panik di kalangan rakyat banyak.⁵⁰ Serangan kedua dan ketiga terhadap Pontianak dilakukan pada tanggal 22 dan 27 Desember 1941.

Penduduk merasa cemas dan gelisah karena mereka menyaksikan bahwa tentara Belanda yang ditempatkan di sini tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan serangan udara Jepang itu. Banyak orang mulai menghubungkan adanya serangan itu dengan kemungkinan segera mendaratnya tentara Jepang di Kalimantan Barat. Kegelisahan rakyat bertambah setelah melihat gerakan dan sikap pasukan Belanda (KNIL) dan pasukan bantuan Sekutu yang ditempatkan di daerah ini, yang tidak menunjukkan

50). Penuturan *Br. Bruno Rijnaerts*, Ketua Yayasan Sekolah-Sekolah Brunder di Pontianak. Beliau adalah saksi mata kejadian pemboman Jepang di dekat sekolah yang dipimpinnya pada tanggal 19 Desember 1941 itu.

tanda-tanda keampuannya untuk menanggulangi serangan lawan, bahkan cenderung untuk bersikap panik. Mereka bahkan melakukan persiapan untuk membumi-hanguskan bangunan militer dan juga sipil yang dipandang vital, sekiranya tentara Jepang nanti mendarat. Demikian pula persiapan dilakukan untuk menumpuk bahan makanan dan bahan bakar.

Pendaratan pasukan Jepang memang terjadi tidak lama setelah berlangsungnya rentetan pemboman di daerah ini. Pada akhir bulan Januari 1942, serombongan kapal perang Jepang menampakkan diri di dekat pantai Kalimantan Barat sebelah utara.

Pendaratan secara serentak oleh pasukan Jepang dilakukan di Pemangkat dan muara Sungai Kapuas. Kota pelabuhan Pemangkat direbut tanpa perlawanan yang berarti dari pihak Belanda, pada tanggal 1 Februari 1942. Pasukan pelopor itu, yang menurut dugaan kuat adalah dari Tentara ke-29 yang merupakan bagian dari "*Kwangtung Army*", merupakan pasukan elite dari Angkatan Darat Jepang.

Setelah merebut kota Pemangkat, mereka bergerak dalam dua cabang; sebagian bergerak ke selatan dengan tujuan bergabung pasukan-pasukan yang mendarat di muara Sungai Kapuas, kemudian bersama-sama merebut kota Pontianak; sedang sebagian lagi bergerak ke timur, dengan tujuan merebut lapangan terbang Sanggau Ledo yang dipandang strategis itu.

Mereka merebut pula kota Sambas yang telah sempat dibumi-hanguskan sebagian oleh Belanda. Namun Belanda tidak sempat merusakkan jembatan beton, yang baru saja siap dibuat pada tahun 1941, menjelang pecahnya perang. Di selatan Pemangkat, kota Singkawang dapat direbut dengan mudah karena pasukan Belanda yang mempertahankan kota itu terburu melarikan diri. Demikian pula halnya dengan lapangan terbang di Sanggau Ledo, sekalipun sebagian perbekalan perang dan amunisi sempat dihancurkan oleh Belanda.

Pasukan yang menuju selatan, setelah bergabung dengan pasukan yang mendarat di muara Sungai Kapuas, bergerak merebut kota Pontianak. Perlawanan Belanda tidak dapat dikatakan hebat, karena mereka tidak memperoleh dukungan rakyat, lagi pula mereka nampak tidak bersemangat untuk berperang. Sebagian sempat mengundurkan diri memudiki Sungai Landak dan bertahan di Ngarabang, yang belum jatuh ke tangan Jepang. Namun nasib kota Ngarabang pun sudah dapat ditentukan sejak jatuhnya Pontianak.

Dari Pontianak, pasukan Angkatan Darat Jepang itu kemudian memudiki Sungai Kapuas, merebut Tayan, Sanggau, dan Sintang, ialah kota-kota penting di pedalaman, tanpa perlawanan yang berarti.

Raja-raja dan panembahan segera menyatakan tunduk dan setia kepada pemerintahan Dai Nippon, dan bendera "*Hinomaru*" segera berkibar di mana-mana di daerah ini.

Segera setelah jatuhnya kota Pontianak (2 Pebruari 1942) komandan pasukan pendudukan yang menguasai kota itu mengumumkan tidak berlakunya lagi pemerintahan Belanda, dan semua orang Belanda khususnya pegawai-pegawai dan pejabat Belanda di kota itu diwajibkan lapor.

Uang kertas dan uang logam Belanda masih berlaku untuk sementara, sebelum beredarnya uang kertas yang dikeluarkan oleh Jepang, yang nantinya berlaku untuk seluruh daerah Hindia-Belanda.

Pada pertengahan tahun 1942, pasukan Angkatan Darat ini mulai ditarik, dan pasukan Angkatan Laut (*Kaigun*) datang menggantikan mereka. Pemerintahan Angkatan Laut ini, yang dipegang oleh Komando Armada Selatan ke-2, berpusat di Makassar dan wilayahnya meliputi pulau-pulau Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi, Sunda Kecil, dan Papua (Irian Barat)⁵¹). Maka mulailah pemerintahan Angkatan Laut, yang lazimnya disebut dengan istilah *Minseibu*.

3. Sikap Jepang terhadap aparat pemerintah Hindia-Belanda

Seperti halnya dengan daerah lain yang berada di bawah pendudukan Jepang, maka di daerah ini pun dibentuk pula pemerintahan militer. Daerah ini, termasuk dalam daerah pendudukan Angkatan Laut, pemerintahan militer di sini disebut dengan nama *Minseibu*. Setiap *Minseibu* didukung oleh komandan-komandan militer setempat dan dikepalai oleh perwira yang paling tinggi pangkatnya di daerah itu. Perwira Jepang yang tertinggi di daerah ini berpangkat Letnan Kolonel.

Kepala *Minseibu* membawahi komandan-komandan lapangan yang selain bertugas sebagai komandan pasukan, juga merupakan pengawas pelaksanaan pemerintahan sipil di tempat tugasnya dan daerah sekitarnya. Struktur pemerintahan yang berlaku

51). Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia *Op cit*, Jilid VI, halaman 5.

semasa pemerintahan Hindia-Belanda dahulu, tetap dipertahankan. Para kepala swapraja tetap diakui sebagai kepala atau pemimpin dari swaprajanya masing-masing. Walaupun demikian para raja/panembahan ini berada di bawah pengawasan *Minseibu* dan merupakan kaki tangan mereka.

Para kepala swapraja ini menjelang saat mendaratnya tentara Jepang, telah mendapat tawaran dari pemerintah Hindia-Belanda untuk diungsikan ke Australia, namun berdasarkan beberapa pertimbangan, semua raja menolak tawaran itu dan memilih tetap tinggal dan memimpin rakyat kerajaan mereka masing-masing.⁵²⁾

Semua orang Belanda, baik ia bekas anggota tentara, pejabat, orang preman maupun para rohaniwan Kristen dan Katolik, diwajibkan lapor. Mereka kemudian ditangkap dan diangkut ke kamp tawanan perang di Serawak.

Menurut penuturan seseorang yang ditawan bersama-sama sejumlah besar orang Belanda itu, dan kemudian dapat kembali dengan selamat ke Pontianak sesudah selesainya Perang Dunia II, jumlah orang yang ditawan di kamp tawanan perang di Kuching, Serawak, berjumlah lebih dari tiga ribu orang.⁵³⁾ Dari jumlah itu lebih dari separuhnya tidak kembali lagi, yaitu meninggal dalam tawanan.

Seperti di masa Hindia-Belanda, maka pada setiap kerajaan kini ditempatkan seorang penasihat Jepang. Pejabat tertinggi *Minseibu* di daerah ini, bergelar *Syuutizityo*. Kepala Distrik, ialah Demang, diberi gelar *Guntyo*, sedang Kepala Onderdistrict disebut *Sontyo*. Kota Pontianak diperintah oleh seorang pejabat yang berpangkat *Syityo*. Seorang *Keisatsukutyo*, memimpin jawatan kepolisian ini tidak seluas kekuasaan kepolisian militer (*Kempeitai*) yang praktis mengendalikan semua kegiatan pengawasan dan tindakan represif atas apa pun yang terjadi di daerah ini.

Gereja Kristen dan Katolik tidak terlepas dari akibat pendudukan Jepang ini. Mereka dicurigai karena kebanyakan rohaniwan mereka adalah orang Belanda dan mereka dianggap sebagai "musuh" oleh pemerintah militer Jepang.

Jalur pengawasan aparat pemerintah kini diperketat

52). A. Halim R. "Mengenang kembali 20.000 korban-korban Jepang di Kalimantan Barat" *Akcaya* Nomor 131 Tahun V 16 Juni 1977.

53). Penuturan Pater Martinus OFM. Cap. seorang rohaniwan di Keuskupan Agung Pontianak.

Kepala-kepala Distrik, Kepala Onderdistrik, Kepala Desa atau kampung tidak diperkenankan bergerak atau bepergian dengan bebas. Hal ini disebabkan karena kecurigaan yang besar dari pemerintahan pendudukan Jepang terhadap mereka, baik karena mereka adalah termasuk pejabat yang dulu mengabdikan kepada pemerintahan Hindia-Belanda, maupun karena pengaruh mereka terhadap rakyatnya.

Pertimbangan lain adalah karena luasnya daerah dan dirasa sulit untuk diawasi secara efektif oleh tentara pendudukan Jepang yang kecil jumlahnya di daerah ini.

4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia

Seperti di daerah lain di Indonesia, pada umumnya rakyat kecil bersikap acuh tak acuh terhadap perang dan perkembangan Perang Pasifik. Mereka tidak ambil peduli terhadap apa saja yang terjadi. Hanya saja mereka merasa gembira mendengar kedatangan Jepang karena mereka masih terkesan oleh "budi baik" di masa malaise yang lalu, yang berupa barang Jepang yang murah harganya.

Pada waktu Jepang mulai menegakkan kekuasaan mereka, mereka berusaha mendekati rakyat dan tokoh-tokoh/pemimpin mereka. Mereka selalu mengatakan di mana-mana bahwa mereka datang tidak untuk memusuhi rakyat, tetapi untuk membawa perdamaian dan kebebasan. Mereka mengatakan kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin rakyat bahwa mereka tidak akan mengusik kedudukan mereka. Dan memang pada mulanya sikap *Minseibu* terhadap raja-raja adalah demikian.

Walaupun demikian sikap Jepang ketika mereka datang di tahun 1942, namun pemimpin-pemimpin dan kaum terpelajar sudah merasa khawatir. Terhadap golongan muda, pemerintah Jepang bersikap ingin menghimpun dan mengarahkan.

Pada waktu Jepang tiba di daerah ini, terdapat tiga belas organisasi pemuda yang bersifat lokal, seperti Surya Wirawan, Pemuda Muhammadiyah, dan Persatuan Anak Borneo.⁵⁴⁾ Semua organisasi ini kemudian dibubarkan oleh *Minseibu*. Sebagai gantinya, dalam tahun 1942 itu, *Minseibu* membentuk organisasi pemuda yang disebut *Nissinkai*. Pembentukan itu direstui pula oleh Komandan Teritorial Angkatan Laut, Letnan Kolonel Yamakawa.⁵⁵⁾

54). Mawardi Rivai, *Peristiwa Mandor* (Jakarta, 1978) halaman 40.

55). *Ibid*, halaman 42.

Jepang berharap bahwa melalui *Nissinkai* ia dapat mempengaruhi golongan pemuda dan masyarakat, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan guna mendukung kepentingan-kepentingannya. Namun beberapa waktu kemudian ternyata bahwa usaha mempengaruhi golongan pemuda tidaklah semudah apa yang mereka bayangkan. Hal ini disebabkan karena banyak anggota *Nissinkai*, terutama para pemimpinnya, adalah bekas anggota dan pemimpin organisasi pemuda di zaman Belanda. Notoesoedjono misalnya, tokoh *Nissinkai*, dahulunya adalah seorang pemimpin organisasi pemuda, yang ber-naung di bawah Partai Indonesia Raya.

Banyak di antara pemuda terpelajar yang sedari semula memang tidak setuju dengan tujuan *Nissinkai*. Mereka itu berusaha untuk dapat menghimpun kekuatan untuk menentang Jepang secara diam-diam. Walaupun demikian harus disebutkan bahwa pihak *Minseibu* juga tidak kurang waspada.

Bahan makanan hanya disediakan untuk mereka yang bekerja pada jawatan dan dinas pemerintah. Rakyat kebanyakan terpaksa mengusahakan sendiri bahan makanan untuk kehidupannya karena bahan makanan dari luar daerah tidak dapat dimasukkan ataupun kalau dapat dimasukkan melalui perahu-perahu karet, maka bahan makanan itu langsung dikuasai oleh pemerintah.

Semua organisasi dan perkumpulan kebangsaan, dilarang bergerak. Gereja pun praktis tidak dapat melakukan kegiatannya karena para rohaniwan yang kebanyakan berkebangsaan asing (— Belanda) ditangkap. Hanya dua orang pastor yang dibiarkan bebas, karena mereka bukan orang Belanda; seorang adalah pastor Cina dan seorang pastor Jawa.

Perdagangan memang tidak diganggu atau diusik oleh pemerintah. Namun lalu-lintas dagang terasa lesu, karena barang yang diperdagangkan sangat langka. Hubungan antar daerah baik melalui darat maupun sungai tidak dapat berlangsung lancar, karena ketiadaan bahan bakar. Perahu-perahu bermotor yang menjadi alat perhubungan dengan daerah pedalaman, hanya dapat berlayar bila mengangkut barang pemerintah, karena dengan demikian mereka memperoleh jatah minyak bakar.

Dalam masa kehidupan yang sulit ini, idea-idea baru timbul di kalangan rakyat banyak, untuk sekedar dapat mengatasi kebutuhan hidup mereka. Misalnya mereka berusaha membuat garam dari abu pelepah daun/pohon sagu. Demikian pula di daerah pedalaman, mereka berusaha untuk menanam tembakau, suatu ba-

han keperluan hidup yang penting bagi mereka, tetapi yang selama itu selalu didatangkan dari luar daerah.

Golongan penduduk Cina pun tidak merasa senang dengan pemerintahan Jepang sekali pun secara terang-terangan mereka tidak berani mengemukakannya. Orang-orang Cina di sini, khususnya yang tinggal di kota-kota, memang bersimpati dengan *Kuo Min Tang*.

Sementara itu dengan makin terdesaknya Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, terutama setelah pertempuran di Laut Karang (Oktober 1942) dan berbaliknya posisi Sekutu dari posisi defensif ke ofensif, maka penindasan pemerintah militer Jepang makin meningkat.

Kerjapaksa untuk kepentingan militer secara sistematis terus ditingkatkan dengan mengerahkan puluhan ribu rakyat, tua maupun muda, dan korban makin besar juga. Di lain pihak, *Keibitai* (kepolisian) dan *Kenpeitai* (polisi rahasia) melakukan pengawasan yang semakin ketat dan melakukan tindakan penahanan dan penangkapan secara lebih intensif terhadap mereka yang disangka anti terhadap Jepang ataupun yang dicurigai terlibat dalam gerakan melawan Jepang.

Alat komunikasi massa seperti radio dan film, dikuasai oleh pemerintah *Minseibu*. Pesawat radio milik rakyat disegel pada gelombang pendeknya, sehingga mereka hanya bisa mendengar siaran radio *Hosokyoku* (station pemancar radio) milik pemerintah. Pemerintah Jepang juga menempatkan pesawat radio umum pada tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul, atau pada simpang-simpang jalan yang strategis di kota-kota. Di tempat semacam itu selalu terdapat apa yang disebut sebagai *radio to*, ialah kotak bertonggak untuk meletakkan pesawat radio umum itu. Siaran yang dipancarkan oleh Pontianak *Hosokyoku* adalah berita ataupun siaran yang telah diperiksa oleh pemerintah, tentu isinya mendukung atau setidak-tidaknya tidak merugikan Jepang.

Media massa lain yang diawasi pemerintah, adalah sebuah koran lokal, yang dinamakan *Borneo Shimbun*. Surat kabar ini seakan-akan melanjutkan dari surat kabar yang telah ada menjelang jatuhnya pemerintah Hindia-Belanda, ialah surat kabar "*Borneo Barat*."

Di Pontianak, terdapat satu sekolah menengah saja, yang dinamakan *Cyuugakko*. Menjelang jatuhnya pemerintah Hindia-Belanda di kota itu memang terdapat Sekolah Dagang (*Handels-*

school) dan MULO (Sekolah Menengah Umum) yang diasuh oleh misi Katolik, tetapi di zaman Jepang sekolah-sekolah itu ditutup. Kepala sekolah pertama dari *Cyuugakko* itu seorang Jepang, yang namanya Prof. Murakawa.

5. *Sikap Bangsa Indonesia terhadap Jepang*

Telah disebutkan di muka bahwa rakyat kecil tidak begitu menghiraukan tentang siapa yang datang dan berkuasa, tidak mengacuhkan bagaimana dan apa maksud peperangan berlangsung. Bahkan pada mulanya mereka cenderung untuk menyambut gem-bira kedatangan tentara Jepang, mengingat kenangan mereka di masa lalu, pada zaman malaise, akan barang buatan Jepang yang murah dan melimpah.

Pada mulanya memang sikap tentara pendudukan Jepang adalah lembut, apa lagi setelah pada hari raya *Kigensetsu* (11 Pebruari) tahun 1942, mereka membebaskan pejabat-pejabat bangsa Indonesia dan kaum Cerdik-cendikia yang mereka tawan pada saat mereka merebut daerah ini.

Selanjutnya pimpinan bala tentara Jepang mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengganggu kedudukan raja-raja dan tidak pula akan mengganggu kelancaran penghidupan rakyat jelata. Namun keadaan seperti ini tiba-tiba berubah, lebih-lebih setelah penggantian kekuasaan dari Angkatan Darat ke Angkatan Laut. Terasa kehidupan rakyat semakin tidak menentu. Suasana tegang dan suram meliputi kehidupan dari segala lapisan masyarakat. Pola kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh pemerintahan Angkatan Laut (*Minseibu*) berbeda dengan apa yang pernah dijalankan oleh Angkatan Darat mereka.

Pemerintah *Minseibu* segera bertindak mengganti pejabat-pejabat tinggi bangsa Indonesia dengan orang Jepang. Jabatan *Syityo* (Kepala pemerintahan kota) Pontianak mulai bulan Agustus 1942 dipegang oleh orang Jepang. Orang Indonesia paling tinggi hanya dapat menduduki jabatan sebagai *guntyo* (Kepala Distrik).

Secara berangsur, orang-orang Jepang memperketat kendali pemerintahan. Raja-raja dan para kepala swapraja hanyalah penguasa-penguasa di atas kertas saja. Hal ini sungguh tidak menyenangkan hati raja-raja itu.

Guru-guru dan pegawai pemerintah merupakan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang secara menyolok disibukkan.

Pelajaran bahasa Jepang secara intensif diberikan dan harus diikuti oleh para pegawai, oleh karena kemahiran berbahasa Jepang menjadi ukuran seseorang untuk bisa meningkatkan karir dan kedudukan sosialnya.

Melalui sekolah, pelajaran nyanyi (*uta*) dan tari-tarian (*odori*) diberikan kepada para pelajar secara intensif, demikian pula tata kebiasaan dan adat-istiadat Jepang, cerita rakyat seperti *Momotaro* dan sebagainya diperkenalkan melalui anak-anak sekolah. Anak-anak Sekolah Menengah diikuti-sertakan dalam latihan perang-perangan (*kyoren*) dan kerja bakti (*kinrohooshi*).

Dengan sendirinya, jika murid-muridnya terlibat dalam kesibukan yang luar biasa itu, guru-gurunya pun turut juga.

Di pedesaan, Jepang mengumumkan larangan menyimpan senjata. Dengan demikian, penduduk dilarang untuk memiliki senapan berburu dan senjata-senjata lain untuk keperluan itu. Padahal berburu merupakan bagian dari kehidupan mereka dan tidak sekedar sebagai penyaluran minat atau hiburan saja. Sejak itu praktis penduduk pedalaman tidak dapat lagi berburu binatang besar, dan mereka amat tidak senang dengan larangan itu. Secara sembunyi-sembunyi masih terdapat orang-orang yang nekad menyimpan senjata, dengan risiko dapat dihukum mati karenanya.

Rasa tidak senang rakyat kecil makin hari makin bertambah luas, karena ada saja peraturan atau larangan yang dikeluarkan oleh *Minseibu* ataupun oleh pejabat-pejabat setempat. Larangan menyelenggarakan pesta perkawinan ataupun kenduri, menyakitkan hati rakyat, karena adat menyelenggarakan upacara perkawinan atau penyelenggaraan selamatan, telah melembaga sejak nenek-moyang mereka. Alasan Jepang melarang dilaksanakannya kepercayaan itu adalah karena tidak ekonomis. Lagi pula menurut mereka hanya membuang waktu berharga yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk "kinrohoshi."

Di kalangan kaum cerdik pandai dan terpelajar, rasa kegelisahan menjadi-jadi. Mereka selalu dicurigai oleh aparat keamanan pemerintah *Minseibu*, karena dahulu termasuk golongan yang penting dalam masyarakat di masa penjajahan Belanda. Atas prakarsa Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Al Kadri, pada bulan April 1942, diadakan musyawarah para kepala swapraja di daerah ini, bertempat di istana Kadariyah, Pontianak.⁵⁷⁾ Mereka berkum-

57). A. Halim R. Akcaya, *opcit.* nomor 129, 15 Juni 1977.

pul dari seluruh daerah swapraja yang ada di Kalimantan Barat, untuk bersama-sama membicarakan serta membahas situasi pada dewasa itu dan kecemasan/ketakutan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat. Mereka secara diam-diam juga bersatu pendapat bahwa penderitaan dan ketakutan rakyat hanya bisa dihilangkan, jika Jepang dapat dienyahkan. Maka mulailah timbul *embryo* gerakan perlawanan anti Jepang, yang terorganisasi.

Kelompok anti Jepang yang mulai mewujudkan diri itu kemudian bertambah nyata dengan ikut serta berperannya bekas pejabat pemerintah jajahan Belanda dahulu, seperti J.E. Pattiasina, seorang bekas *Hoofdcommies* pada Kantor Residen di Pontianak, yang setelah dibebaskan oleh Jepang pada bulan Pebruari 1942, diangkat lagi oleh Jepang sebagai *Soomukakarityo* (Kepala Urusan Umum) pada Kantor *Syuutizityo*.⁵⁸⁾

Kelompok ini nampaknya punya pengaruh pula dalam organisasi pemuda yang ada pada waktu itu ialah *Fissinkai*. Hal ini tidak mengherankan oleh karena banyak tokoh *Nissinkai*, dahulunya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam organisasi pemuda semasa penjajahan Belanda dahulu. Notosoedjono, misalnya, seorang tokoh utama *Nissinkai*, seperti yang telah disebut di muka, adalah bekas pimpinan dari organisasi pemuda yang ber-naung di bawah panji-panji Parindra.

Pattiasina berhasil meyakinkan tokoh-tokoh pemuda itu bahwa keadaan rakyat telah sedemikian rupa, sehingga perlu mulai dipikirkan langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat, dan jalan yang dipandang terbaik adalah menggerakkan perlawanan terhadap Jepang. Ia menyatakan pula bahwa pihak Sekutu berdiri di belakang gerakan ini.

Kelompok anti Jepang ini pun berusaha menghubungi dan mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat Cina yang ada di kota Pontianak, dan di kota-kota di mana penduduk Cina banyak bermukim. Penduduk Cina, terutama kaum terpelajar dan mereka yang kaya, memang merasa tidak senang dengan situasi yang makin hari terasa makin menghimpit kedudukan mereka.

Di antara tokoh masyarakat Cina di Pontianak, yang dihubungi itu, terdapat nama Ng Nyap Sun, seorang tokoh yang terkenal, dan yang oleh Jepang ditunjuk sebagai *Kakyo Toseikatyo* (Kepala Urusan Orang Asing) pada Kantor *Syuutizityo*; Kei Kiang

58). Mawardi Rivai, *opcit*, halaman 53.

Kie, Ng Nyap Kan, Ong Tjoe Kie, Ng Noeng Khoi, dan Theng Swa Theng.⁵⁹⁾

Menurut catatan dan perhitungan dari para saksi mata yang dewasa ini masih hidup, jumlah tokoh gerakan di bawah tanah anti Jepang adalah enam puluh sembilan orang, karena itu sering pula diberi nama sebagai "*Gerakan Enam Sembilan*." Mereka itu ialah anggota-anggota kelompok rahasia itu, sering bertemu dan berkumpul di gedung "Medan Sepakat" yang terletak di Landraadweg 16, Pontianak. Gedung itu memang merupakan gedung pertemuan umum, yang biasa dipakai oleh golongan atas masyarakat dan golongan terpelajar di kota Pontianak sejak zaman penjajahan Belanda, untuk bertemu, main kartu ataupun main bilyard. Penggunaan gedung itu untuk berkumpul dan berbincang-bincang oleh kelompok rahasia di bawah tanah itu, adalah untuk menghindari kecurigaan dari pihak kepolisian ataupun alat keamanan Jepang, beserta para kaki-tangannya.

Hubungan secara teratur dilakukan oleh para pemuka gerakan itu dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, termasuk raja-raja, pemuka masyarakat, dan lain sebagainya, baik yang ada di kota Pontianak sendiri, maupun yang ada di tempat lain, di luar kota Pontianak. Rapat-rapat sering diadakan oleh kelompok gerakan di bawah tanah itu, dengan kedok "rapat-rapat *Nissinkai*."

Berita-berita yang sampai ke telinga mereka tentang ber kobarnya pemberontakan rakyat di Kalimantan Selatan, memperbesar semangat juang para pemimpin kelompok gerakan rahasia anti Jepang itu. Menurut penuturan, berita itu dibawa oleh seorang bekas pejabat pemerintah Belanda, yang bernama Makaliwey, yang oleh Jepang sudah diangkat menjadi *Noomu Kakarityo* pada Kantor *Syuutizityo* di Pontianak.

Sementara di kota-kota pantai dan Pontianak suasana menghangat akibat aktivitas dari gerakan di bawah tanah itu sedangkan di pedalaman, suasana juga hangat. Suku-suku Dayak kehidupannya makin hari makin terdesak sebagai akibat adanya berbagai peraturan dan larangan yang ditimpakan kepada mereka. Pemimpin-pemimpin suku Dayak mulai memikirkan untuk mengangkat senjata terhadap Jepang. Maka beredarlah di daerah pedalaman, "mangkuk merah" ialah mangkuk yang berisi darah binatang (ayam/babi) sebagai pertanda bangkitnya sebuah perlawanan

59). Mawardi Rivai, *opcit*, halaman 53.

rakyat di kalangan suku-suku Daya.

Di daerah Meliau, yang terletak di hulu bagian tengah dari Sungai Kapuas, suku-suku Dayak telah bersiap untuk melakukan perlawanan sebagai akibat rasa tidak senangnya atas tingkah-laku pejabat-pejabat Jepang di daerah itu, tambahan lagi mereka merasa terhimpit oleh kehidupan yang sangat sulit. Perlawanan yang mula-mula bersifat insidental, makin meluas secara diam-diam mendapat restu dari pihak swapraja di sana.

Pemerintah *Minseibu*, yang mendapat laporan tentang hal ini, merasa khawatir dan cemas. Mereka khawatir kalau-kalau gerakan ini akan lebih meluas lagi, hingga melibatkan suku-suku Dayak yang lain di daerah pedalaman. Maka dikirimkanlah satu pasukan kecil tentara Jepang dari Pontianak, di bawah pimpinan Letnan Nagatani, seorang perwira *Kenpeitai*, untuk menangkap pelaku-pelaku pemberontakan itu dan menindas perlawanan itu.

Perlawanan rakyat itu dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin Suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau serta sekitarnya. Pertempuran hebat terjadi antara pasukan Nagatani dengan rakyat yang dipimpin oleh Pang Suma. Nagatani tewas dalam pertempuran itu dan ekspedisinya gagal.

Gagalnya ekspedisi itu sangat menggemparkan pejabat-pejabat militer Jepang di Pontianak. Nagatani terkenal sebagai perwira yang cakap dan tangguh, tetapi ternyata ia tidak mampu menghadapi rakyat yang bersenjata sederhana dan tidak mengenal tehnik perang modern itu. Para pejabat *Minseibu* berkesimpulan bahwa kemenangan gerakan rakyat di Meliau dan Tayan itu pasti akan mengobarkan perlawanan di tempat lain. Karena itu mereka lebih meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi hal itu. Mereka pun mulai mencurigai sikap dan gerak-gerik pejabat-pejabat bangsa Indonesia yang ada dalam *Minseibu*, demikian pula sikap dan gerak-gerik raja-raja.

Tentang keterlibatan pejabat-pejabat Indonesia peluang kepada orang-orang yang tidak senang pada mereka, untuk bisa berkomplot dan bertemu setiap saat, dengan harapan nanti jika benar-benar terdapat cukup bukti, mereka tinggal menangkap secara sekaligus saja. Tetapi ada pendapat lain. Pendapat ini menyebutkan bahwa kaum intelektual Indonesia dan raja-raja itu merasa bertanggungjawab terhadap keselamatan rakyat, terpaksa mengambil langkah untuk melawan Jepang, yang mereka anggap sudah kele-

wat batas dalam melakukan penindasan terhadap rakyat.

Penangkapan secara massal terhadap para pemuka gerakan di bawah tanah, mulai dilakukan pada 23 Oktober 1943, seminggu setelah berlangsungnya rapat rahasia yang dihadiri oleh tokoh-tokoh gerakan di bawah tanah di Pontianak.⁶⁰⁾ Rupanya rapat ini diketahui oleh mata-mata *Kenpeitai*. Penangkapan segera dilakukan terhadap tokoh-tokoh seperti Notosoedjono, Panangian Harahap (penilik sekolah dan sahabat Sultan Pontianak), J.E. Pattiasina, Ng Nyap Sun, dan lain-lainnya. Penangkapan ini dilakukan secara rahasia, selalu dilakukan di waktu malam.

Penangkapan berlangsung sejak saat itu sampai saat menyerahnya Jepang. Korban yang ditangkap tidak pernah mengetahui, ke mana mereka akan dibawa, karena tiap korban penangkapan ditutup mukanya (istilah daerah *disungkup*). Mereka tidak pernah dihadapkan pada pengadilan macam apa pun, dan setelah diinterogasi, mereka langsung dibawa ke tempat mereka menjalani hukuman mati.

Mengenai tuduhan bahwa komplotan anti Jepang itu akan menggerakkan pemberontakan, seperti yang dikatakan oleh pemerintah *Minseibu* dalam pengumumannya di "*Borneo Shimbun*" 1 Shichigatsu 2604 (1 Juli 1944), masih belum dapat dibuktikan kebenarannya, apakah benar demikian halnya. *Borneo Shimbun* tanggal 1 Juli 1944 itu menyebutkan dengan kepala berita besar "*Komplotan Besar yang mendoerhaka oentoek melawan Dai Nippon soedah dibongkar sampai keakar-akarnya. Kepala-Kepala Komplotan serta lain-lainnya ditembak mati.*"

Kaum yang dikatakan termasuk dalam komplotan itu tentu-lah menyadari bahwa kekuatan mereka belum cukup kuat untuk dapat menghadapi Jepang. Mereka tentulah tidak pernah berpikiran nekad untuk berjudi dengan nasib ratusan, bahkan ribuan orang, jika mereka belum yakin bahwa gerakan mereka akan berhasil.

Apakah sebenarnya yang terjadi? Apakah Jepang memang memancing terjadi usaha untuk merobohkan pemerintahannya? Apakah tidak ada motif lain yang lebih jauh lagi jangkauannya dengan memusnahkan tokoh-tokoh rakyat yang ribuan banyaknya itu? Tabir gelap masih menyelubungi peristiwa berdarah itu. Apa yang diumumkan dalam *Borneo Shimbun*, hanyalah sebagian kecil dari

60). A. Halim R. *opcit.*

mereka yang menjadi korban pembunuhan oleh Jepang, dari periode 1943 sampai tamatnya penjajahan Jepang.

Dalam surat kabar itu hanya dimuat nama tokoh-tokoh yang terkenal saja, seperti: dr. I. Roebini, Panangian Harahap, Noto-soedjono, Dr. Ismail Maidin, Sawon Wongso Oetomo, Ng Nyap Soen, Ong Tjoe Kie, Amat Doegoen Siregar, dan lain-lainnya.

Sesungguhnya diperkirakan lebih dari dua puluh satu ribu orang terbunuh dalam gerakan pembunuhan besar-besaran itu, ada yang sempat memperhitungkan sekitar dua puluh satu ribu tiga puluh tujuh; tetapi ada pula yang menetapkan besarnya angka hingga lima puluh ribu orang korban. Angka yang tepat tidaklah pernah diketahui.

Korban-korban ini hanya mereka yang diakibatkan oleh penangkapan-penangkapan saja, tidak terhitung mereka yang gugur dalam perlawanan langsung melawan Jepang. Gerakan perlawanan langsung melawan Jepang itu terutama berkobar di daerah pedalaman, digerakkan oleh suku-suku Dayak yang bekerjasama dengan suku-suku Melayu dan lain-lain. Mereka menjalankan *hit and run warfare* (semacam perang gerilya) dan mengacau jalan komunikasi dan perbekalan. Terkenal di pedalaman, legende tentang "Panglima Burung" ialah seorang panglima Daya yang perkasa, yang memimpin rakyatnya beroperasi dari wilayah Kabupaten Ketapang hingga ke daerah Kabupaten Sanggau sekarang.

Mereka itu kecil jumlahnya namun dengan bantuan rakyat mereka yang melitang dan dengan memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh alam, berupa rimba belantara dan sungai serta rawa dan daerah yang sulit ditempuh, mereka berhasil memusingkan kepala pejabat-pejabat Jepang, dan menciptakan gangguan/keamanan.

Dapat dikemukakan bahwa semua kepala swapraja ditangkap oleh Jepang dan mereka termasuk dalam daftar korban pembunuhan itu. Demikian pula sejumlah besar kaum terpelajar, golongan Cina yang ada di daerah ini, tidak luput dari pembunuhan yang sistematis itu.

Semua ini menunjukkan bahwa di daerah ini, seperti halnya dengan rakyat di daerah lain, rakyat bergerak sebagai akibat himpitan penindasan yang dirasakannya kelewat batas. Korban pergerakan dan gerakan perlawanan itu berserakan di mana-mana, tetapi yang terbesar jumlahnya terdapat di Mandor delapan puluh lima kilometer sebelah timur Pontianak, di tengah hutan belantara. Mereka sudah tidak bisa lagi dikenali identitasnya lagi.

DAFTAR NAMA INFORMAN

- A.
1. Nama : Uray Aliudin Jusba
 2. Usia : 50 tahun
 3. Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Barat.
 4. Keahlian : Bahasa dan Sastra Indonesia
 5. Catatan : Yang bersangkutan adalah anggota keluarga Kerajaan Sambas.
- B.
1. Nama : Gusti Abdulhamis Aun
 2. Usia : 54 tahun
 3. Jabatan : Pengawas pada Bidang Pendidikan Guru, Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Barat.
 4. Catatan : Yang bersangkutan adalah anggota keluarga Kerajaan Landak. Pernah menjabat sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Pontianak (sampai dengan 1974). Beliau adalah pula Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- C.
1. Nama : Tan Muhammad Saleh
 2. Usia : 54 tahun
 3. Jabatan : Staf pada Bidang Pendidikan Masyarakat Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Kalimantan Barat.
 4. Catatan : Yang bersangkutan pernah berkecimpung dalam PARINDRA dan aktif dalam kegiatan pers. Dalam masa perjuangan fisik (1945-1946) aktif sebagai pejuang dan kini tercatat sebagai anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

- D. 1. Nama : Br. Bruno Rijnaerts
 2. Usia : 69 tahun
 3. Jabatan : Ketua Yayasan Sekolah-Sekolah Bruder, Keuskupan Agung Pontianak.
 4. Catatan : Yang bersangkutan adalah salah satu rohaniwan yang bertugas di Pontianak ketika Jepang datang; ikut ditawan selama perang dan aktif melakukan tugas membangun kembali kegiatan pendidikan Katolik sesudah perang di daerah ini.
- E. 1. Nama : M. Yatiman
 2. Usia : 58 tahun
 3. Jabatan : pensiunan pegawai PU
 4. Catatan : Yang bersangkutan adalah bekas anggota KNIL semasa penjajahan Belanda, dan masuk menjadi pegawai negeri di masa penjajahan Jepang.
- F. 1. Nama : Raden Machmud Susilo Suwignyo
 2. Usia : 64 tahun
 3. Jabatan : -----
 4. Catatan : Yang bersangkutan adalah ex-Digulist, aktivis pergerakan angkatan lama. Di masa Jepang beliau dibawa ke Kuala Lumpur dan setelah kembali, aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Beliau adalah Perintis Kemerdekaan, yang masih hidup di daerah ini.
- G. 1. Nama : H.M. Gusti Effendy
 2. Usia : 58 tahun
 3. Jabatan : swasta
 4. Catatan : Yang bersangkutan adalah Mangkubumi terakhir dari Kerajaan Landak. Aktif dalam perjuangan kemerdekaan di daerah ini. Anggota Veteran PKRI.

- H. 1. Nama : Uray Abdulhamid
2. Usia : 55 tahun
3. Jabatan : swasta
4. Catatan : Yang bersangkutan adalah tokoh politik, pemuka daerah Sambas, pernah ditahan selama Orde Lama. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- I. 1. Nama : Ignatius Deggol, BA
2. Usia : 40 tahun
3. Jabatan : Kepala Seksi Kebudayaan pada Kantor Departemen P dan K Kabupaten Ketapang.
4. Keahlian : Sejarah daerah Ketapang dan adat-istiadat.
- J. 1. Nama : M. Nasir Effendy
2. Usia : 53 tahun
3. Jabatan : Staf pada Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan, Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Barat.
4. Catatan : Yang bersangkutan adalah tokoh politik baik di zaman penjajahan maupun setelah kemerdekaan, anggota Veteran PKRI.
- K. 1. Nama : Johannes Baptista Soeranto
2. Usia : 49 tahun
3. Jabatan : Guru pada Sekolah Katolik Nyarumkop, Kabupaten Sambas.
4. Catatan : Yang bersangkutan adalah orang Katolik yang bermukim di daerah pedesaan sejak zaman sebelum kemerdekaan.
- L. 1. Nama : Pater Serenus
2. Usia : 60 tahun
3. Jabatan : Pastor paroki Singkawang
4. Catatan : Yang bersangkutan adalah salah satu rohaniwan Katolik tertua yang masih bertugas di daerah ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

1. Abdurrahman Surjomihardjo, *Some Aspects of the Indonesian Press, 1900 – 1942* (paper, Sixth Conference of, IAHA, Yogya, 1974).
2. Arsip Nasional, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda, 1839 – 1848* (Jakarta, 1973).
3. Assegaff, D.H., *Bunga Rampai Sejarah Media Massa*. (Jakarta, 1978).
4. Bosch, F.D.K., *Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia* (Jakarta, 1974).
5. de Kat Angelino, A.D.A., *Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch Indie*, (s' Gravenhage, 1930).
6. de Klerck, E.S., *History of the Netherlands – Indies* 2 vols (Rotterdam, 1938).
7. Dawan Rahardjo, M., *Pesantren dan Pembaharuan* (LP3ES, Jakarta, 1974).
8. de Groot, J.J.M., *Het Kongsi Wezen in West Borneo* (Martinus Nijhoff, Den Haag 1880).
9. Djarrawi Hadikusumo, H., *Dari Jamaluddin al Afghani sam K.H. Ahmad Dahlan* (Persatuan, Yogyakarta, tanpa tahun).
10. Hall, D.G.E., *A History of South East Asia*, (New York, 1974).
11. Kodam XII/Tanjungpura, *Tanjungpura Berjoang* (Pontianak, 1970).
12. Koch, D.M.G., *Om de Vrijheid* (Pembangunan. Jakarta, 1950).
13. Kahin, George Mc. Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Cornell Universitas Press Ithaca, 1955).

14. Kantor Wali Gereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*, Jilid 3A (Arnoldus, Ende, 1974).
15. Keuskupan Agung Pontianak, *Archdiocess of Pontianak* (Pontianak, 1978).
16. Lontaan, J.U, *Sejarah Hukum Adat dan Adat-Istiadat Kalimantan Barat* (Pemda Kalimantan Barat, Pontianak, 1975).
17. Pane, Armijn, *Habis Gelap Terbitlah Terang* (Balai Pustaka, Jakarta, 1972).
18. Paryono Suryodipuro, *Alam Fikiran* (Sumur Bandung, Jakarta, 1960).
19. Pluvier, J.M. *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesie in de Jaren 1930 tot 1942* (den Haag, 1953).
20. Purcell, V., *The Chinese in South East Asia* (Oxford University, Press, London, 1965).
21. Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia* (BPA-UGM, Yogyakarta, 1967).
22. Sartono Kartodirdjo, *Pergerakan Sosial dalam Sejarah Indonesia* (UGM – Yogyakarta, 1967).
23. Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V dan VI*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1977).
24. Soebardi, Cs, *Pengantar Sejarah dan Ajaran Islam* (Bina Cipta, Jakarta 1969).
25. Soekmono, R, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, Jilid I sampai dengan III*, (Kanisius, Yogyakarta, 1973).
26. Soesanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Pembangunan, Jakarta 1970).
27. Soedjito Sastrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa*, suatu analisa. (Karya, Yogyakarta, 1968).
28. Sumadi, Mayor Jendral, *PGRS-PARAKU dan Subversi Komunis Internasional di Asia Tenggara* (thesis Sarjana, Fakultas Sosial Politik Universitas Jayabaya, Jakarta 1972, Tidak diterbitkan).

29. Spencer, Elizabeth H., *Basic Concepts of Historical Geology* (Chicago, 1962).
30. Sutjipto, F.A., *Panembahan dalam sistem tituluatur tradisional* (UGM – Yogyakarta, 1970).
31. Schermerhorn, *Het Dagboek Van Schermerhorn*, deel I – II (Wolters, Groningen, 1970).
32. Rivai, Mawardi, *Peristiwa Mandor* (Pustaka Antara, Jakarta, 1977).
33. Tamar Djaja, *Pusaka Indonesia* (Bulan Bintang Jakarta, 1966).
34. Van der Wal, S.L., *Officiele Bescheidenheid Betreffende de Nederlandsch-Indonesische Betrekkingen, 1945-1950*, deel I-IV, (s' Gravenhage 1973).
35. Van Leur, J.C., *Indonesian Trade and Society* (Sumur Bandung, 1960).
36. Van Niel, R., *The Emergence of the Indonesia Elite* (W.v. Hoeve, Bandung, 1960).
37. Veth, P.A., *Nederlandsch Oost Indie*, 2de deel, (Leiden, 1894).
38. Vlekke, B.H.M., *Nusantara*, (Den Haag, 1959).
39. Wolters, O.W., *Early Indonesian Commerce* (Ithaca, New York 1967).
40. Yamin, Muhammad, *Atlas Sejarah* (Jambatan, Jakarta, 1956).

B. MAJALAH DAN RISALAH

1. *BKI*, deel 132 (Eerste Aflevering) Martinus Nijhoff, Den Haag, 1976.
2. *Berita Penelitian Arkeologi* nomor 6 (P3N, Jakarta, 1977).
3. *Indonesia*, Volume 19., 1975 (Cornell Univ. Press, Ithaca New York).
4. *Majalah Angkatan Darat*, SA-7, 1968, Dispenad, Jakarta.
5. *Journal South East Asian Studies*, 1971 (Cornell Univ. Press Ithaca, New York, 1971).
6. Pemda Kotamadya Pontianak, *Dua Ratus Tahun Kota Pontianak* (1771 – 1971) Pontianak, 1971.

7. Pemda Kotamadya Pontianak, *Buku Petunjuk Kota Pontianak* (Pontianak, 1978).
8. Pemda Kotamadya Pontianak, *Sejarah Masjid Agung Sambas*, (Sambas, 1975).
9. Pemda Kabupaten Sintang, *Silsilah raja-raja Kerajaan Sintang* (Sintang, 1974).
10. Pemda Kalimantan Barat, *Warta Kalimantan Barat* (1973).
11. Pemda Kalimantan Barat, *Sejarah Singkat Perkembangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat 1957 – 1976* (Pontianak, 1976).
12. "Sumbangsih" Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908 – 1918 (Amsterdam, 1918).

C. ENSIKLOPEDI

1. Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, 2 de druk ('s Gravenhage, 1919).
2. Winkler Prins Encyclopaedie, deel 13, vijfde druk (Den Haag, 1937).

D. MANUSKRIP/NASKAH

1. —————, *Sejarah Matan (salinan)*
2. Yusuf Sahar, Kerajaan Mempawah dalam lintasan (tanpa tahun).
3. Gusti Abdulhamid, *Sejarah Landak* (tanpa tahun).
4. Widodo Adisidharto, *Sekelumit kisah pembunuhan oleh Tentara Pendudukan Jepang di Kabupaten Ketapang* (tanpa tahun).
5. Ibrahim Baidjuri, *Catatan tentang bahan-bahan Sejarah Kerajaan Matan* (1958).
6. Laporan dari Kepala Seksi Kebudayaan pada Kantor Departemen P dan K Kabupaten Ketapang, 1975.
7. Laporan Kepala Seksi Kebudayaan pada Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sanggau, 1977.

E. HARIAN

Harian "Akcaya" Pontianak:

- a. tanggal 13 Juni 1977 nomor 128/V
- b. tanggal 16 Juni 1977 nomor 130/V
- c. tanggal 18 Juni 1977 nomor 131/V
- d. tanggal 23 Juni 1977 nomor 137/V
- e. tanggal 28 Juli 1977 nomor 164/V
- f. tanggal 9 Pebr. 1977 nomor - / V
- g. tanggal 15 Mei 1977 nomor 129/V.

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

001324.3



G3.1



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA